

WAJIDI

ARTUM ARTHA

Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan
Kalimantan Selatan



ARTUM ARTHA
Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan
Kalimantan Selatan

ARTUM ARTHA

Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan

Penyusun : Wajidi

Penerbit : Debut Press

Jl. Sisingamangaraja 23 Yogyakarta 55153

e-mail: debutpress@yahoo.com

Penyunting : Rusma Noortyani, M.Pd

Cetakan Pertama Tahun 2008

Hak Cipta © pada Penyusun dilindungi Undang-undang

ISBN 978-979-96468-36-X

WAJIDI

ARTUM ARTHA
Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan
Kalimantan Selatan

Debut Press

PUI SI

Kawan!
Waktu itu
Perjuangan

Sebuah perguruan
Dan barisan pelajar sebuah wadah penjara
Dan bangunan Belanda
Aku, seorang penghuninya

Sebuah cahaya pelita
Terdampar di sana
Pada terali besi tua
Dada
Jiwa
Dalam pesta cahaya
Aku merdeka!

Pada detak jantung
Tinggal di sini
Puisi abadi

Banjarmasin, Selasa 4 November 1980

Artum Artha

KATA PENGANTAR

Pada diri seorang Artum Artha terdapat beberapa *talenta*. Beliau dikenal sebagai seorang sastrawan (penyair), wartawan, dan budayawan.

Pada masa muda, beliau juga seorang yang pernah aktif dalam pergerakan kebangsaan seperti menjadi guru bantu Sekolah Medan Antara di Kandangan, memasuki kepanduan, aktivis organisasi politik Parindra, dan organisasi lainnya.

Aktivitas itu terus berlanjut pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1945-1949. Pada periode ini beliau turut berkecimpung dengan membentuk Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GEPERINDO), dan menjadi staf Penerangan/Keuangan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, sebuah organisasi kelaskaran terbesar di Kalimantan Selatan.

Meski Artum Artha bukan termasuk salah seorang yang mendapat pengakuan dari Pemerintah (Departemen Sosial RI) sebagai perintis atau veteran pejuang kemerdekaan. Kenyataannya beliau adalah seorang yang turut berperan dalam merintis, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan. Aktivitas yang bersifat kontra pemerintah kolonial itulah yang mengakibatkan beliau beberapa kali merasakan ditangkap, diperiksa, dan bahkan ditahan di penjara yang sempit dan pengap oleh aparat pemerintah Hindia Belanda.

Pak Artum, demikian seringkali beliau dipanggil, sebenarnya lebih dikenal sebagai seorang wartawan kawakan, baik sebagai pimpinan, staf redaksi, atau koresponden surat kabar atau majalah. Karir puncak sebagai wartawan adalah ketika beliau menjadi Ketua PWI Cabang

Kalimantan Selatan periode 1961-1963. Selain sebagai seorang wartawan dan penulis berita, beliau juga aktif menulis dan mempublikasikan puisi, cerpen, esai sastra, dan roman/novel yang dilakukannya sejak 1937, sehingga beliau dikenal pula sebagai penyair yang handal.

Beliau juga seorang yang sangat peduli terhadap kebudayaan dan sejarah lokal Kalimantan Selatan sebagaimana tercermin pada karya tulis yang dihasilkan dan aktivitasnya secara langsung dalam kegiatan pelestarian benda peninggalan sejarah dan purbakala seperti memimpin Museum Banjar 1967-1972, turut aktif memperjuangkan Pangeran Antasari dan Brigjend H. Hassan Basry sebagai Pahlawan Nasional.

Banyak penghargaan/piagam yang diterimanya dari berbagai kalangan. Sebagai penulis, beliau pernah menjadi Juara I Sayembara Karang Mengarang “Pemuda Harapan Bangsa” yang diselenggarakan oleh Jawatan Penerangan Provinsi Kalimantan di Banjarmasin tahun 1950.

Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan Hadiah Seni dari Gubernur KDH Tk. I Provinsi Kalimantan Selatan (Soebardjo Surosarodjo) pada tanggal 17 Agustus 1973, atas prestasi, reputasi, dan dedikasinya yang menonjol di bidang penggalan kebudayaan daerah Banjar di Kalimantan Selatan.

Sebagaimana dikatakan sendiri oleh beliau bahwa aktivitas sebagai seorang wartawan, koresponden, reporter, penyair, penulis atau pengarang mendorongnya memiliki banyak sahabat atau kenalan, di lembaga swasta maupun pemerintah, di kalangan masyarakat luas maupun di dunia politik.

Dunia politik bukanlah dunia yang asing baginya. Setidaknya pengalaman sebagai aktivis organisasi pergerakan dan luasnya pergaulan menjadi modal baginya

saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kotapradja Banjarmasin 1954-1961.

Paparan yang dikemukakan di atas, hanyalah sekelumit dari kisah perjalanan hidup seorang Artum Artha. Banyak hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Oleh karena itulah, buku ini disajikan dengan maksud untuk menampilkan perjalanan Artum Artha secara lebih luas.

Maksud penulisan buku dengan mengangkat kisah hidup seseorang tidaklah dimaksudkan untuk “menyanjung” apalagi mengukhtuskan seorang tokoh. Sama sekali tidak demikian.

Latar belakang penulisan riwayat hidup seorang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa daerah Kalimantan Selatan sesungguhnya mempunyai tokoh yang layak diangkat perjalanannya hidupnya sebagai sebuah kisah sejarah.

Selama ini, seakan-akan Kalimantan Selatan kering dengan tokoh sejarah lantaran kurangnya buku biografi, autobiografi, atau memoar tokoh lokal yang ditemui di perpustakaan maupun toko buku di daerah ini. Sementara buku sejenis yang menampilkan tokoh lokal daerah lain banyak dan mudah didapatkan.

Kondisi demikian, tentu saja akan berdampak kepada minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tokoh panutan dari daerah sendiri. Sehubungan dengan itu, maka penulisan dan penerbitan biografi, autobiografi, atau memoar tokoh Kalsel sudah selayaknya untuk dilaksanakan.

Buku ini mengambil judul “*Artum Artha: Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan*”. Judul tersebut sengaja diambil untuk menampilkan aktivitas yang menonjol pada diri Pak Artum, meski disadari beliau sebenarnya pernah pula berkiprah di dunia politik seperti

anggota beberapa organisasi politik sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kotapraja Banjarmasin.

Selain itu, isi buku ini lebih bersifat memoar yang redaksinya disusun sedemikian rupa dengan pola “bertutur” sehingga seperti sebuah autobiografi, atau dengan kata lain lebih mencerminkan publikasi dari sebuah “naskah sumber” yang barangkali dapat digunakan sebagai data untuk penulisan sejarah/biografi yang sesungguhnya atau petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Meski buku ini memaparkan kisah hidup seorang Artum Artha, hanya sedikit yang dapat diungkapkan mengenai perjalanan hidupnya dari masa kecil hingga meninggal di tahun 2003 yakni dari masa Penjajahan Hindia Belanda, masa Pendudukan Jepang, dan masa pemerintahan NICA/Perang Kemerdekaan, dan masa di alam kemerdekaan.

Kebanyakan informasi tentang Artum Artha bersumber dari dokumen, buku, dan memoar beliau sendiri yang penulis cantumkan judulnya dalam daftar pustaka, dan sebagian lagi berasal dari beberapa pustaka yang dihasilkan oleh penulis lainnya.

Untuk mengetahui sosok Artum Artha secara lebih “utuh” tentu saja buku ini belum memadai, apalagi jika menyangkut pemikiran, atau gagasan beliau di bidang kebudayaan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para pembaca untuk menggali pemikiran atau gagasan beliau melalui buku atau karya tulis yang pernah beliau hasilkan.

Pengumpulan dan rekonstruksi kembali data-data tentang kehidupan Artum Artha, bukanlah pekerjaan yang mudah. Meski naskah buku ini telah dipersiapkan sejak tahun 2004 sampai purnanya buku ini di awal 2008, masih ada beberapa hal yang belum terungkap dengan jelas. Belum

lagi adanya kemungkinan adanya kelemahan bahkan mungkin kesalahan. Namun saya meyakinkan kepada para pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Selesainya buku ini tidak terlepas dari berbagai bantuan. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak seperti bapak Yusni Antemas (Anggraini Antemas) yang telah memberikan beberapa informasi berharga, terutama sekali kepada keluarga besar Artum Artha, seperti ibu Saniah yang telah mengizinkan saya untuk mengangkat perjalanan hidup Artum Artha, dan juga kepada saudara Aidin Nasydiansyah yang telah berkenan membantu menghimpun berbagai dokumen dan meminjamkannya kepada saya untuk menyusun buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat.

Banjarmasin, September
2008

Wajidi



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya menyambut baik penerbitan buku “*Artum Artha: Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan*”, yang berisi kisah seorang tokoh. Redaksinya disusun dengan pola bertutur, sehingga dengan membaca buku ini seolah-olah Pak Artum Artha masih berada di antara kita; sedang bertutur, mengisahkan perjalanan hidupnya kepada para pembaca.

Pada diri Artum Artha memang dapat dipetik beberapa suri tauladan, terutama aktivitasnya sebagai seorang sastrawan, wartawan, dan budayawan pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Pendudukan Tentara Jepang, Pemerintahan NICA atau Perang Kemerdekaan, dan di era Pembangunan.

Beliau memang telah tiada, namun kiprahnya akan terus dikenang. Setidaknya, buku ini akan menjadi saksi dari perjalanan hidup beliau, di samping karya- karya tulisnya sendiri yang cukup beragam.

Mudah-mudahan buku ini ada manfaatnya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iii

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN ~ ix

DAFTAR ISI ~ xi

BAB I LINGKUNGAN, KELUARGA, DAN
PENDIDIKAN ~ 1

A. Kandangan Kota Perjuangan ~

B. Masa Kecil dan Pendidikan ~

BAB II PERGULATAN HIDUP DI ZAMAN
HINDIA-BELANDA ~

A. Kondisi Kehidupan Ekonomi, Sosial,
dan Politik ~

B. Organisasi Pergerakan yang Pertama
di Kalimantan Selatan ~

C. Memasuki Dunia Pergerakan ~

D. Propagandis Gerakan Swadesi dan
Koperasi ~

E. Masuk Penjara ~

F. Berkenalan dengan Jurnalistik ~

G. Pemerintah Hindia Belanda
Mengekang Pegawai Negeri ~

H. Kaum Tani Turut dalam Pergerakan
Kebangsaan ~

BAB III DI MASA PENJAJAHAN JEPANG ~

A. Perang Asia Timur Raya ~

B. Pasukan Jepang Memasuki
Kandangan ~

C. Potong Leher ~

D. Mereka Memanggilnya Mina-san ~

E. Nipponisasi ~

		F.	Bekerja di Perusahaan Jepang ~
		G.	Kukenang Tuan Shumano yang Memberitahukan Proklamasi ~
		H.	Perpisahan dengan Tuan Shumano ~
BAB	IV		IKUT MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN ~
		A.	Panitia Pasar Malam Kemerdekaan ~
		B.	Ditangkap Belanda ~
		C.	Wartawan Republiken ~
		D.	Staf Rahasia ALRI Divisi IV ~
		E.	Proklamasi 17 Mei Th. IV Rep ~
		F.	Masalah Musim Haji Tahun 1949 ~
		G.	Menyampaikan Mosi ke Yogyakarta ~
BAB	V		DI ALAM KEMERDEKAAN ~
		A.	Bertemu Jodoh ~
		C.	Bertugas di Balikpapan ~
		B.	Organisasi Perintis Kemerdekaan ~
		C.	Ketua DPRD, Ketua PWI, dan Pimpinan Museum ~
		E.	Kepada Semua Anak Cucuku ~
DAFTAR PUSTAKA ~			
LAMPIRAN ~			

BAB I

LINGKUNGAN, KELUARGA, DAN PENDIDIKAN

A. KANDANGAN KOTA PERJUANGAN

Parincahan, sebuah nama desa di Kelurahan Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, mungkin saja dahulunya berasal dari kata “marincah”. Marincah berarti kegiatan menebas rumput di sawah tadah hujan dengan alat pertanian tradisional bernama “tajak” untuk mempersiapkan pengolahan tanah guna ditanami padi. Asal dari kata marincah itulah, maka parincahan artinya “tempat marincah”.

Di Desa Parincahan itulah aku dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Zamrud pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 1920. Oleh ayahku, Abubakar, aku diberi nama M. Chusrien. Namun, entah kenapa, sejak kecil aku dipanggil dengan nama “Artum”. Nama itulah yang kemudian sering kupakai saat usiaku remaja dan bahkan dewasa sebagai nama pena dalam dunia tulis menulis.

Aku memang mempunyai beberapa nama pena atau nama samaran seperti Artum Artha, M. Ch. Artum (Muhammad Chayrin Artum), Bujang Jauh, Emhart, HR Bandara, dan Murya Artha yang kugunakan pada saat aku sebagai penyair, wartawan, atau nama samaran pada saat perjuangan melawan Belanda dahulu di Kalimantan Selatan.

Aku, di katakan penyair, sebab kata orang aku pandai menciptakan kalimat syair, pantun, puisi dan cerita pendek, juga menulis berita-berita. Wadah kami bersenandung dan menyatakan kemerdekaan hati nurani diantaranya adalah majalah “Terang Boelan” Surabaya, majalah “Keinsyafan”

Gorontalo, dan majalah “Mandau” Surabaya. Saat itulah kupakai nama samaran agar Belanda tidak kenal kami.

Di zaman Hindia Belanda, seorang penyair, penulis cerita atau dia seorang koresponden, reporter, *verslag-gever* gampang saja ditangkap Belanda kalau isi sajak atau tulisannya dianggap menyindir, samar-samar apalagi jika terang-terangan menghina pemerintah atau orang Belanda. Oleh karena itu, nama samaran penting sekali pada zaman itu.

Kandangan, kota tempat kelahiranku, dahulu merupakan pusat perjuangan, pusat kegiatan ekonomi, sosial bahkan pusat penataan politik partai dan politik pemerintahan se-Hulu Sungai. Lumrah juga disebut kota terpenting di daerah Banua Lima.

Kandangan tempat strategis: kota pemerintahan, kota perdagangan-perekonomian, perindustrian, juga pusat kebudayaan. Pada masa pemerintahan NICA, Kandangan merupakan ibukota Afdeling Hulu Sungai dipimpin seorang *Assistent Resident* dengan beberapa perangkatnya, antara lain: *Detachment Commandant Koninklijk Nederlands Indische Leger van de Afdeling Hulu Sungai*, *Veld Politie Centraal van de Afdeling Hulu Sungai*, *Departement Financien van de Hulu Sungai*, dan tempat kedudukan kepala pemerintahan *Onderafdeling* atau *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* yang dipimpin oleh seorang *Controleur* (masyarakat setempat mengejanya: kontelir, kontlir, atau kontolor).

Di Kandangan terdapat pabrik seperti, karet, minyak kelapa, es. Kandangan juga merupakan pusat pasar Hulu sungai. Kendaraan roda empat seperti taksi, truk paling banyak, sementara perahu yang hilir mudik melalui sungai Amandit, sungai Negara, sungai Balangan, Batang Alai sampai sungai Tabalong dan Barito.

Kandangan tempat *Landraad Kantoer* (Pengadilan Negeri) se Hulu Sungai. Ada kantor Penasihat Hukum dan Keadilan atau kantor Advokad yang dipimpin Mr. Rusbandi dan Mr. Tadjuddin Noor. Ada *Persbeureuw en Agentschap Pustaka Raya* (Kantor Berita dan Perpustakaan Nasional).

Kandangan juga berperan dalam dunia pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Kepala pengawas sekolah rakyat Hulu Sungai berkedudukan di Kandangan (*Hoofd der School Opziener*). Di Kandangan ada sekolah Guru Desa, Sekolah Guru bantu. Sekolah pertanian (*Landbouw School*) berada di Padang Batung. Pada tahun 1941, gedung Landbouw School ditempati Belanda untuk keperluan *Stadswacht* (Pengawal Kota) selama Perang Dunia II.

Partai-partai politik dan Islam yang berdiri di Kandangan antara lain Partai Politik Ekonomi Kalimantan (PEK) Pimpinan Anang Acil Kesuma Wiranegara (1931), Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Kemudian Partai Politik Islam Indonesia (PII) pimpinan Zafry Zamzam, dan organisasi Islam lainnya, antara lain: Musyawaratutthalibin (M. Th), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai lambang persatuan umat Islam dan wadah ibadah muslimin-muslimat, di tengah kota Kandangan berdiri “Masjid Taqwa” yang pada zamannya sebagai masjid terbesar di Hulu Sungai.

Di Kandangan terdapat Kantor Kesehatan dan Rumah Sakit (*Zieken Huis*) dengan satu orang dokter untuk melayani seluruh Hulu Sungai. Dokter terakhir sampai zaman pendudukan Jepang adalah dr. Soemarno. Dia anggota Parindra.

Dalam Dunia olahraga, misalnya sepakbola, terdapat klub-klub seperti VC. *Zuid Amandit*, VV. *Adelaar*, *Militaire Voetbal Club* (MVC), PS. Perseka dan PS Pemuda, juga perkumpulan main tenis TC. Amandit.

Persuratkabaran: Suara M.Th, Purnama Raya, Pembangun Semangat, Brosur Pelajar Pemantara. Di Barabai terbit mingguan seperti Berita Kesadaran Kalimantan dan Berita Nahdlatul Ulama. Zaman perang kemerdekaan di Kandangan terbit: Kalimantan Berdjung, majalah politik Republik dan Pedoman Puteri. Sementara koran NICA di bawah pengawasan RVD SK Sinar Hulu Sungai. Pada zaman pendudukan Jepang terbit *Borneo Simboen*. Penerbitnya *Borneo Simboensja*. Secara umum Kandangan merupakan pusat pemerintahan Afdeling Hulu Sungai, pusat pergerakan dan pusat kebudayaan.

Kandangan juga menerima masukan berbagai surat kabar: Harian Umum, Terang Bulan, ketiganya terbitan Surabaya. Majalah lain seperti Suara Parindra, Suara Surya Wirawan, Suara Muhammadiyah, Suara PSII, Pustaka Timur, Abad Dua Puluh, Pedoman Masyarakat, Panji Islam, dan lain-lain.

Nama Kandandangan atau Kandangan (sekarang) sudah disebut-sebut dalam hikayat terbentuknya Kerajaan Negara Dipa sekitar abad ke-14 Masehi. Kandandangan disebut-sebut pula dalam Negarakertagama yang ditulis Mpu Prapanca 1365 M sebagai jajahan Majapahit. Kandangan pusat sejarah dan kebudayaan, bahkan menjadi wadah kegiatan kaum sastrawan, seniman dan seniwati, terlebih lagi dalam tahun 1930-1945.

Tatkala terjadi revolusi fisik 1945-1949, Kandangan menjadi pusat perjuangan organisasi kelaskaran terbesar di Kalimantan Selatan yakni ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.

B. MASA KECIL DAN PENDIDIKAN

Pada waktu usiaku mencapai tujuh tahun, aku telah mengenyam pendidikan di *Gouvernement Inlandse School*

tingkat kelas satu. Setiap sore hari Sabtu di halaman Sekolah Negeri GIS atau sekarang namanya Sekolah Dasar Negeri, aku melihat dan menyaksikan banyak pemuda bergerombolan, seperti satu pasukan serdadu. Pakaian mereka seragam warna cokelat. Pada lehernya ada kain segitiga dan dasi. Warnanya merah-putih.

Peluit berbunyi, tet, tet, tet, memberi tanda kepada pasukan harus berkumpul dan siap baris-berbaris.

Pasukan terbagi dua. Pertama yang dewasa usia 16-18 tahun ke atas. Mereka memakai peci cokelat. Kedua, yang muda memakai topi rotan, ditimpa sinar matahari tampak berkilat. Mereka semuanya disebut Pandu.

Setelah tamat GIS tahun 1932, tentu saja aku belum mengenal arti seluk-beluk ilmu pengetahuan sosial-politik. Waktu sekolah, guru-guru selalu mengingatkan kepada murid-muridnya agar jangan belajar politik atau memasuki perkumpulan-perkumpulan partai politik. Bisa ditangkap Belanda sebab dianggap melawan Pemerintah Hindia Belanda.

Seluruh murid waktu itu banyak takut politik, takut Belanda, takut serdadu Belanda, Opas Belanda, Kiai¹ Belanda, juga takut kepada Pembakal (Lurah) Belanda. Semua alat kekuasaan Belanda selalu mengawasi terhadap siapa saja yang mencoba melawan Belanda.

Di sekolah sama sekali tidak pernah mendengar kata Indonesia, tidak pernah mendengar kata merdeka. Betul-betul buta politik, buta sejarah Indonesia.

Akan tetapi sejarah dan peristiwa Perang Paderi, Perang Bugis, Perang Banjar, sedikit-sedikit disampaikan oleh bapak guru sebagai selingan tambahan pelajaran

1 Kiai merupakan nama gelar jabatan dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda di Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo.

(bukan sebagai ilmu sejarah). Biasanya ketika guru kelas 5 belum masuk (terlambat) atau ketika jam pelajaran akhir dekat pukul 13.00. Tetapi, pelajaran itu tentunya ditulis dan menurut selera pemerintah Hindia Belanda.

Guruku hanya sedikit menceritakan tentang tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Banyak para pejuang yang ditangkap, dihukum penjara, dan mati dalam masa pengasingannya. Kebinasaan itu antara lain disebabkan oleh penderitaan lahir batin dan penyakit-penyakit yang menyerang tanpa obat yang memadai. Contoh seperti Pangeran Muhammad Amir diasingkan ke Ceylon dan mati di tempat pengasingannya. Pangeran Hidayatullah diasingkan dan meninggal di Cianjur. Pangeran Perbatasari mati di Tondano, atau Pangeran Antasari pencetus Perang Banjar yang meninggal karena penyakit cacar di Puruk Cahu tahun 1862.

Buku Perang Paderi yang dicetak dengan huruf Melayu-Arab menceritakan tentang perjuangan “Kaum Paderi” melawan Pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya semua pemberontak itu dapat ditangkap, diasingkan, juga mati di antah-berantah.

Entah berapa banyak Kaum Digulis yang mati karena serangan nyamuk malaria di Tanah Merah atau guru kami mengatakan “Boven Digul”, dan Banda Neira.

Guru kami, Ahmad Jumri, juga tidak pernah menceritakan sedikit pun sejarah dan peristiwa Tanah Air. Beliau tamat *Kweekschool* (Sekolah Guru Atas), mendapat pelajaran bahasa Belanda di Makassar. Juga guru Ahmad Rumawi demikian pula. Selama duduk di bangku sekolah sejak kelas 4-5 sampai tamat, tidak ada pelajaran Ilmu Sejarah Tanah Air, apalagi ilmu-ilmu sosial, politik, dan kebangsaan.

Seperti sudah diceritakan di atas, guru kami tidak pernah menceritakan para pejuang dalam Perang Banjar, Perang Paderi, Perang Diponegoro. Akan tetapi, guru kami pernah mengajarkan secuil tentang ekspedisi Christoper Columbus yang menemukan benua Amerika.

Kami murid-murid *Gouvernement Inlandse School*, terutama di Hulu Sungai sebagai daerah pedalaman Kalimantan Selatan pada zamannya yang silam itu belum pernah membaca surat kabar yang dikarang, dicetak dan diedarkan oleh bangsa sendiri. Yang kami baca hanyalah majalah pemerintah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Pengajaran (*Departement Onderwijs en Eeredienst*). Satu-satunya majalah bulanan ialah Panji Pustaka (Pandji Poestaka).

Kami belum mengetahui apa sebenarnya yang disebut pers nasional dan partai politik. Buta mata dan hati tentang surat kabar dan lebih buta lagi makna partai politik. Tapi bukan dungu.

Kecuali majalah Panji Pustaka yang ada dalam Taman Pustaka, Pemerintah Hindia Belanda melalui Balai Pustaka Jakarta juga menerbitkan buku-buku bacaan untuk sekolah berbagai tingkatan dan juga untuk umum. Pada umumnya buku-buku bacaan untuk murid-murid sekolah dasar itu bersifat cerita rakyat, hikayat, dongeng, pantun, syair dan pengalaman-pengalaman orang-orang asing (Belanda, Inggris dan Amerika).

Buku bacaan yang mengandung roman pergaulan boleh dibaca oleh murid kelas 5, akan tetapi guru kami sangat berhati-hati sekali meminjamkannya. Murid kelas 5 yang boleh meminjam dan membaca roman pergaulan hanya kalau usianya sudah 15 tahun ke atas.

Dalam Taman Pustaka yang dijaga oleh guru itu memiliki ratusan buku-buku bacaan pilihan untuk tingkatan-tingkatan:

1. bacaan murid kelas 5
2. bacaan murid kelas 4
3. bacaan murid kelas 3

Selain itu, terdapat buku bacaan khusus untuk guru-guru bantu tamatan Sekolah Guru Bantu (SGB) 2 tahun antara lain: Siti Nurbaya, Karam Dalam Gelombang Percintaan, Perawan di Sarang Penyamun, Hikayat Panji Sumirang (Hikajat Pandji Semirang), Si Cebol Rindukan Bulan (Si Tjeboel Rindoekan Boelan), Hikayat Lang Lang Buana (Hikajat Lang Lang Boeana), Syair Puteri Hijau (Sjair Poeteri Hidjaoe), Hikayat Si Miskin (Hikajat Si Miskin), Si Dul Anak Betawi (Si Doel Anak Betawi), Tak Putus di Rundung Malang (Tak Poetoes Diroendoeng Malang), Habis Gelap Terbitlah Terang, Dian Nang Tak Kunjung Padam (Dian Nan Tak Koendjoeng Padam).

Aku dengar banyak juga bacaan di luar sekolah. Akan tetapi pada umumnya murid-murid *Gouvernement Inlandse School* dan *Gouvernement Hollands Inlandse School* tidak berani membacanya karena khawatir kalau diketahui oleh guru, kelak akan dihukum dalam kelas, berdiri selama waktu 2 jam, misalnya.

Di HIS (*Hollands Inlandse School*) terdapat banyak buku bacaan. Semuanya dalam bahasa Belanda. Sudah tentu yang sudah pandai berbahasa Belanda seperti murid-murid yang duduk di kelas 5 dan kelas 6 dapat membacanya. Buku bacaan itu antara lain: *Jengen en Vrouwen. Onze Vriend, Wij Leven der Nederlanden*.

Apa bacaan yang terdapat di luar sekolah? Di luar sekolah aku dengar, dan aku baca surat kabar dan majalah antara lain :

1. Suara Kalimantan (Soeara Kalimantan), Banjarmasin
2. Bintang Borneo, Banjarmasin
3. Suara Hulu Sungai (Soeara Hoeloesoengai)
4. Harian Umum (Harian Oemoem), Surabaya
5. Tempo, Surabaya
6. Bintang Timur (Bintang Timoer), Jakarta
7. Majalah Bulanan Taman Siswa, Yogyakarta
8. Suara Persatuan Guru Indonesia (Soeara Persatoean Goeroe Indonesia), Yogyakarta.

Dalam tahun 1933–1935, barulah aku mengerti dan memahami semua isi surat kabar, majalah, dan buku-buku. Ternyata sebagian isinya menyebarkan paham kerakyatan=Kebangsaan Indonesia. Mengajak Bangsa Indonesia dan masyarakat kaum tani agar bersatu dengan semboyan: “Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh”. Sungguh banyak bacaan yang bermanfaat.

Temanku Ahmad Kusasi bin Mirang. Nasibnya baik dan beruntung, karena ibu bapaknya mempunyai toko yang menjual barang pecah-belah di pasar Kandangan. Ahmad Kusasi mengajakku masuk Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang pada tahun 1933 berdiri di Kandangan di bawah pimpinan umum Sumartoyo dan wakilnya Bustami dan Muhammad Ramli.

Sumartoyo adalah seorang *Werkbaas Verkeer en Waterstaat Dienst* (V en W) Onderafdeling Kandangan. Dia juga disebut (dirahasiakan) sebagai anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk daerah Kalimantan Selatan.

Melalui KBI, para propagandis kebangsaan di Kandangan melakukan gemblengan kepada anak-anak muda agar mereka mengetahui dan memiliki hasrat sebagai manusia Indonesia yang bercita-cita mencapai Indonesia Mulia, Indonesia Raya, dan Indonesia Merdeka.

Para anggota KBI saat itu mulai menggunakan seragam, yakni baju warna cokelat. Pada lehernya ada kain segitiga dan dasi berwarna merah-putih dan memakai peci cokelat, atau memakai topi rotan.

Tujuan KBI adalah untuk melatih mental pemuda-pemuda serta untuk menanamkan rasa kebangsaan guna mencapai kemerdekaan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan latihan-latihan dan menyebarkan lagu-lagu perjuangan, seperti lagu Indonesia Raya serta membentuk cabang dan ranting-ranting KBI di berbagai daerah.

Saat menjadi anggota KBI itulah mulai terbuka sedikit tabir latar belakang perikemanusiaan tentang hasrat manusia Indonesia yang penuh cita-cita untuk mencapai Indonesia Mulia, Indonesia Raya, Indonesia Merdeka dan Indonesia Abadi. KBI berjuang, mencapai cita-cita, Indonesia Raya. Lagu Mars KBI benar-benar dapat menggerakkan jiwa anak-anak muda, apalagi dewasa.

Selama enam bulan aku turut latihan KBI. Harus patuh sumpah kepanduan seperti sumpah setia, sumpah bakti, setia janji, jujur, tunduk pada peraturan dan nasihat orang tua. Setia kepada tanah air, bangsa dan bahasa Indonesia. Belajar baris-berbaris, ilmu kepanduan, dan sejarah tanah air.

Riwayat hidup orang-orang besar Tanah Air dan bangsa-bangsa di dunia pun dipelajari, dicatat, dan dihapalkan. Pahlawan-pahlawan perang yang mati dalam pertempuran melawan kompeni Belanda, karena dihukum gantung, karena disiksa dalam masa pengasingan, atau akibat serangan penyakit, juga dilukiskan kejantannya.

Setelah tamat sekolah, aku tetap menjadi anggota KBI. Jumlah anggotanya lebih 50 orang. Anggota KBI dari kalangan perempuan atau pemuda belum ada waktu itu.

Suatu ketika Sumartoyo memerintahkan supaya semua anggota KBI pergi keluar kota meninggalkan kota Kandangan. Alasannya karena Pemerintah Hindia Belanda, orang-orang Belanda, dan kaum ambtenaar-nya merayakan Hari Kebangkitan Kerajaan Belanda. Dalam sejarah Perang Dunia I disebut : “*Het Tagtig Jaar Oorlog*” (Perang 80 Tahun). Maka, pagi-pagi sekali tanggal 31 Agustus 1933 pasukan KBI meninggalkan kota Kandangan menuju desa Padang Batung (Amandit Timur) untuk melakukan acara perkemahan KBI.

Pada saat berkemah mereka mengumandangkan lagu-lagu perjuangan, seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars KBI, Matahari Mulai Bercahaya, dan lain-lain. Lagu Mars KBI benar-benar dapat menggerakkan jiwa anak muda apalagi dewasa. Berikut bunyi lagu mars KBI.

KBI BERJUANG
KBI berjuang
Mencapai cita-cita
Tanah air yang mulia
Tumpah darah Indonesia Merdeka
Berjuang selalu
Indonesia bersatu
Hiduplah Indonesia,
Merdeka selama-lamanya.

Refr. 2 X)
Berjuang selalu
Indonesia bersatu
Indonesia merdeka

Untuk selama-lamanya

Bangkitlah KBI
Satukan barisannya,
Pemuda Indonesia
Kepanduan gagah perwira,
KBI bersatulah
Menuju cita-cita
Hidup merdeka
Kekal-Abadi-Bahagia.

Tengah malam mengadakan api unggun. Diberi nama Asap Nyala Api Kemerdekaan (ANAK). Tatkala matahari bersinar waktu pagi, kami pasukan KBI menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Inilah redaksi lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya, saat itu.

I. Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan tanah airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku
Hiduplah negeriku
Bangsaku, rakyatku semuanya
Bangunlah jiwanya
Bangunlah badannya
Untuk Indonesia Raya

II. Indonesia tanah yang suci

Tanah kita yang sakti
Di sanalah aku berdiri
Menjaga ibu sehati
Indonesia tanah berseri
Tanah yang aku sayangi
Marilah kita berjanji
Indonesia abadi
S'lamatlah rakyatnya
S'lamatlah putranya
Pulaunya, lautnya, semuanya
Majulah negrinya
Majulah pandunya
Untuk Indonesia Raya.

III. Indonesia tanah yang mulia

Tanah kita yang kaya
Disanalah aku berada
Untuk selama-lamanya
Indonesia tanah pusaka
Pusaka kita semuanya
Marilah kita mendo'a
Indonesa bahagia
Suburlah tanahnya
Suburlah jiwanya
Bangsanya, rakyatnya, semuanya
Sadarlah hatinya
Sadarlah budinya
Untuk Indonesia Raya.

Ulangan (refr) : = 2 x

Indonesia Raya, merdeka, merdeka
Tanahku, negeriku yang kucinta,

Indonesia raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya.

Sumartoyo menutup upacara ANAK perkemahan KBI,
“Semoga KBI dan segenap bangsa Indonesia menghirup
kemerdekaan Indonesia kekal abadi untuk selama-lamanya.
Hidup KBI”.

BAB II

PERGULATAN HIDUP DI ZAMAN HINDIA BELANDA

A. KONDISI KEHIDUPAN EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK

Ciri dari pemerintahan kolonial adalah adanya pemisahan antara penjajah dengan yang dijajah, antara penduduk pribumi dengan non pribumi. Beberapa kelompok etnik yang berbeda kebudayaannya, ditempatkan dalam suatu sistem kewarganegaraan yang pluralistik namun berbeda dalam status karena adanya politik diskriminasi atau pengklasifikasian status sosial.

Orang Belanda (Eropa) sebagai penguasa kolonial merupakan pemegang kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan status itu, pembangunan yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan-kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dan orang-orang Eropa.

Ketika pemerintahan Hindia Belanda secara sepihak menghapuskan Kerajaan Banjar 11 Juni 1860 yang kemudian disertai dengan keberhasilannya menumpas sisa-sisa perlawanan pemerintahan Pegustian² di tahun 1906, maka status bekas kerajaan ini turun sangat drastis. Kalau sebelumnya Kerajaan Banjar adalah sebuah negara dengan bangsa Banjar yang merdeka, maka setelah dikuasai Belanda keadaan mereka berubah menjadi bangsa kelas tiga atau kalangan paling bawah (Bumiputera).

Status sosial itu muncul karena adanya kebijakan Garis Warna (*Color Line*) yang memisahkan antara penguasa dengan yang dikuasai. Kebijakan itu lahir setelah

2 Nama pemerintahan kelanjutan Kesultanan Banjar di daerah hulu Sungai Barito dipimpin Sultan Muhammad Seman, putera Pangeran Antasari.

adanya *Nederlands Indische Onderdanschap* tahun 1911 yang membedakan masyarakat Hindia Belanda kepada tiga golongan, yakni: (1) Orang Eropa, termasuk Belanda dan orang Jepang yang disamakan dengan status orang Eropa; (2) Timur Asing, yakni yang bukan Eropa. Kelompok ini termasuk orang Cina, India, dan sebagainya yang bukan Bumiputera dan Eropa; (3) Bumiputera, masyarakat Banjar termasuk dalam kelompok ini.

Dengan demikian, selain adanya sistem status yang diberikan pemerintah kolonial, pada kenyataannya masyarakat Bumiputera juga terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang lahir dari adanya status sosial yang beragam.

Selain golongan tersebut, ada suatu golongan khusus yang disebut '*gelijkgesteld*' terutama di kalangan pribumi, yakni orang-orang yang disamakan statusnya dengan orang Eropa, sehingga hak dan kewajibannya juga sederajat dengan golongan orang Eropa.

Golongan ini oleh masyarakat Banjar diberi julukan "Belanda Tiga Suku". Julukan tersebut didasarkan kepada nilai kertas segel seharga 1,50 gulden (satu setengah gulden atau tiga suku)³ yang terdapat pada petikan surat keputusan atau besluit Gubernur Jenderal sebagai persetujuan atas *permohonan 'rekes'* (dari kata "request") dari pribumi bersangkutan.

Sebagai bentuk dari politik garis warna adalah eksklusivisme, dimana tiap golongan dibuat hidup terpisah sendiri-sendiri dan merasa golongannya lebih istimewa dibanding golongan lainnya, seperti golongan Eropa merasa

3 Satu suku ialah uang logam coin perak senilai setengah gulden atau lima puluh sen.

lebih unggul dari orang Timur Asing dan *Inlander*⁴ (Bumiputera) atau golongan Cina merasa lebih istimewa dibanding bumiputera.

Untuk kepentingan kolonial, politik garis warna itu senantiasa ditampilkan dalam bentuk diskriminasi perlakuan yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap orang Eropa, maupun Timur Asing berbeda jauh dengan perlakuan yang diberikan terhadap golongan bumiputera.

Pada umumnya orang asing, tinggal di kota-kota dan membentuk komunitas sendiri atas dasar rasnya, sebagaimana terlihat dari adanya perkampungan Arab, Pacinan atau kampung orang Cina. Kedua golongan ini mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, karena adanya beberapa prioritas yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap mereka.

Orang Eropa sebagai kelas tertinggi, memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Dengan status itu, tentunya dalam bidang-bidang pembangunan yang diutamakan adalah kepentingan-kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dan orang-orang Eropa, seperti pendidikan, tempat rekreasi, perumahan, bioskop, dan fasilitas penting lainnya yang hanya diperuntukkan untuk orang kulit putih. Bumiputera adakalanya dilarang masuk karena ada tanda-tanda tertentu bertulisan larangan, seperti: "*Verboden toegang voor Inlanders en Honden* (dilarang masuk untuk orang bumiputera dan anjing)".

Perlakuan diskriminasi sebenarnya tidak hanya dikenakan antara golongan pribumi dengan orang Eropa atau Timur Asing, melainkan juga antara golongan pribumi

4 *Inlander* yang artinya pribumi merupakan sebutan yang bernada penghinaan terhadap bangsa Indonesia, atau bahkan lebih hina lagi *inheemse*.

muslim dengan pribumi penganut agama Kristen. Pada tahun 1920-an, guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal dan kaum masjid dikenakan kewajiban oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan *Ordonnantie Heeren Dienst* yang menyangkut *erakan* atau kerja rodi, sedangkan guru-guru agama Kristen, Penyebar Injil, dan Kepala Jemaat, dan Guru-guru Sekolah Zending justru dibebaskan dari kewajiban itu.

Diskriminasi atau pengklasifikasian status sosial yang terjadi di dalam masyarakat mengundang pertentangan sosial dan ini menyebabkan seringnya terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Diskriminasi dan penindasan itulah yang kulihat dan seperti itulah yang kurasakan yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat bumiputera.

Terhadap pribumi mereka berbagai pungutan seperti Pajak Pencaharian, Pajak Tanah, Pajak Kepala, Pajak Erakan, Bea Masuk, Pajak Penjualan dan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi. Selain itu, setiap orang, kecuali golongan pangreh praja, yang berumur antara 18-45 tahun dapat dikenakan kerja rodi (kerja erakan) yang sangat memberatkan rakyat yang kesemuanya untuk kepentingan Pemerintah Hindia Belanda.

Kulihat saat itu banyak penduduk yang terperas harus bayar pajak dinas *erakan* (uang kepala), misalnya.

1. Tiap 1 orang petani yang punya 1 bidang sawah dan 1 bidang ladang dalam setahun harus bayar pajak sawah-ladang, walaupun hasilnya sangat kurang. Sawah dikenakan wajib pungut sebesar “tujuh puluh lima sen” (f 0,75), dan pajak ladang wajib bayar “lima puluh sen” (f. 0,50).

2. Tiap 1 orang berusia lanjut 50 s.d. 55 tahun harus bayar wajib pajak kepala per tahun “lima puluh sen” (f. 0,50). Tiap 1 orang dewasa (kawin/belum) umur 18 tahun ke atas harus bayar wajib pajak seperti tersebut di atas. Meski umur muda akan tetapi jika akan melaksanakan perkawinan, dia wajib kena pungut pajak kepala. Dalam sebuah rumah, satu keluarga sedarah-sedaging mereka wajib kena pajak yang sama, padahal seharusnya salah seorang antar keluarga itu dibebaskan.

Karena adanya penindasan, maka orang-orang takut terhadap serdadu atau marsose Belanda. Orang-orang tidak berani bicara tentang hak milik tanah air yang dirampas oleh bangsa Belanda. Mereka bicara: “Orang *Walanda* (Belanda) gampang membunuh bangsa Banjar. Senjatanya selalu berbunyi. Dan orang-orang yang berada di jalanan, di *pehumaan* (sawah) mudah terkena bayonet atau diseret ke tiang gantungan. Lalu mati *budas* (konyol), mayatnya dibiarkan seharian semalaman. Yang aku dengar tahun 1932 orang Belanda kejam. Entahlah.

Ada juga orang kulit putih yang baik hati. Sayang kepada suruhannya, jongos, koki dan babunya. Sayang juga kepada tukang kebunnya. Tetapi bangsa Belanda yang baik hati itu tidak lama tinggal di Banua Lima. Paling lama setahun atau seumur jagung. Nyonya-nyonya Belanda ada juga yang baik hati. Akan tetapi, banyak yang sombong makan nasi dengan *sambal acan* dan lombok rawit tambah asam kuwitnya. Lezat rasanya.

Tahun 1930-an, masih sedikit yang aku rasa. Bapakku bekerja mencari nafkah sekadar rejeki hidup. Hasil yang didapat tidak seimbang dengan lelah tenaga dan jumlah titik

keringat yang menetes, peluh yang keluar dari batang tubuhnya.

Sejak pagi keluar rumah menjual *gula-gali*. Keliling kampung di Kandangan. Terkadang sampai malam hari. Sampai di rumah waktu shalat maghrib telah usai. Sembahyang dikerjakan juga. Tertidur, kemudian terbangun. Hasil usaha dihitung. Berapa rupiah dan berapa sen kah yang didapat.

Perhitungannya modal 1 kilogram gula pasir, diolah jadi gula-gali. Duit yang didapat 25 sen. Pokok modal 1 kg gula pasir tujuh sen setengah. Kayu api dua sen setengah. Belanja minum pulang pergi pasar beli gula dan lain-lain keluar duit dua sen setengah. Rokok tembakau sehari dua sen setengah. Jumlah modal sehari lima belas sen. Dapat untung kalau jualan habis, laku semuanya dapat laba sepuluh sen. Jualan dengan modal 2 kg gula pasir atau untung dua kali 10 sen=20 sen. *Sangu* (belanja) anak sekolah mulai pukul 07.30-01.30 cukup dua setengah sen atau seenggol.

Berat perjuangan hidup bapakku, namun beliau seorang yang tabah. Aku teringat. Bapakku pernah bertengkar dengan tuan Kontelir. Saat itu bapak “tukang kebun”. Masih bujangan sekitar usia 17 tahun. Persoalannya terlambat menyiram kebun di halaman dan sekitar rumahnya. Dan anjing Belanda punya belanja daging, telur dan roti. Ongkosnya sehari 10 sen.

Bapakku membandingkan antara nasib manusia dan hewan binatang anjing serigala yang galak itu.

Suatu hari bapak kecewa, lalu bertanya: “*Gaji saya cuma 74 sen sebulan. Belanja anjing serigala sebulan (30 hari) 300 sen. Bagaimana perhitungan tuan?*”

Tuan Kontelir marah. Bapak minta berhenti.

“Kamu orang kampung yang dungu. Pergi saja. Kamu saya pecat. Besok tidak masuk lagi kerja di sini. Mengerti?” Tuang Kontelir marah, marah.

Bapak bercerita kepada Opas Kontelir. Opas Kontelir turut memarahi bapak. Bapak bikin kaduan kepada tuan Kiai. Tuan Kiai pun turut bentak, marah. Lebih marah dari ucapan Opas Kontelir.

Nah, kemana lagi harus lapor?

Bapak pulang kampung, kerja apa yang dapat di kerjakan....

B. ORGANISASI PERGERAKAN YANG PERTAMA DI KALIMANTAN SELATAN

Barangkali saja banyak orang yang suka mendengar desas-desus dan mencari tahu kebenaran berita tentang organisasi perhimpunan bernama Seri Budiman. Aneh kedengarannya, ada perkumpulan orang Banjar. Ada persekutuan penduduk putera Kalimantan dapat mendirikan organisasi Seri Budiman. Padahal Pemerintah Hindia Belanda cukup keras tindakannya, “tidak boleh orang bumiputera mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bersifat gerakan massa. Yang boleh hanyalah perhimpunan persepakbolaan atau perkumpulan serikat kematian, kesenian kebudayaan dan lain lagi yang serupa.

Aku, sama sekali belum tahu apa-apa tentang Seri Budiman. Aku belum lahir ke dunia ini. Aku lahir tanggal 20 Agustus 1920 di Kandangan. Jadi terlalu jauh jarak waktu dan riwayatnya. Aku baru mengetahui tatkala usia menjelang dewasa, saat mendengar percakapan orang-orang tua.

Nenek dan datu menceritakan kepadaku bahwa Seri Budiman benar adanya, ada pengurusnya, ada balainya, ada pula mimbar dan taman pustaka-bacaan. Jelasnya Seri Budiman hidup di Banjarmasin. Ia bangkit dan hadir di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia selagi suasana Perang Banjar masih terasa hangat. Ia didirikan tanggal 1 Januari 1901 (*Opgericht den 1 Januari 1901 te Bandjarmasin*).

Orang-orang pergerakan di kota-kota Hulu Sungai dan orang-orang pergerakan yang tinggal di Banjarmasin yang sedang berdagang di Pasar Kandangan juga menceritakan tentang Seri Budiman. Bahkan mereka membisik-bisikkan bahwa di Banjarmasin ada pemimpin pergerakan. Mereka Cuma bilang "*bubuhan orang Politik*".

Kuperhatikan, kudengar, aku yang semula belum banyak mengerti apa-apa, sedikit demi sedikit mulai mengetahui perkembangan.

Menurut mereka, sebelum Perang Rusia-Jepang (1918), pada tahun 1901 pernah muncul organisasi perhimpunan orang Banjar. Namanya Seri Budiman. Pucuk pimpinannya berkantor di Banjarmasin. Tujuannya membela kaum lemah, memberantas buta huruf dan beramal sedekah kepada orang banyak. Belajar menulis dan membaca huruf (aksara) Belanda-Latin dan huruf Melayu-Arab.

Seri Budiman berjuang semata-mata membela kaum lemah, memberikan pertolongan terhadap kaum tani yang memerlukan modal usaha-tani; bersawah-ladang dan berkebun.

Seri Budiman mempunyai anggota setiap suku bangsa; Banjar, Dayak, Melayu, Jawa, Sunda, Bugis, Minang dan lain-lain yang ada bertempat tinggal di tanah Banjar.

Seri Budiman hanya menerima uang tanda anggota: Kartu Tanda Anggota Setia “Seri Budiman” tunai Sepuluh Sen. Tidak ada tanggungan bayar iuran bulanan. Tiap malam Kamis diadakan pelajaran (kursus) ilmu pengetahuan, seperti ilmu baca tulis. Tempat Balai Seri Budiman di Sungai Mesa-Banjarmasin.

Sadar akan kewajiban anggota, berangsur maju Seri Budiman, jumlah anggota pun bertambah hingga mencapai lebih dari 100 orang. Taman Pustaka diadakan. Mata pelajaran kursus ditambah, ada ilmu sosial masyarakat, agama Islam, juga tentang pertanian.

Dalam tahun 1902 Seri Budiman bertambah pesat hingga dapat menyewa rumah sebagai Gedung Seri Budiman.

Menjelang tahun 1903 beberapa orang pemuka Seri Budiman ini karena dia pegawai negeri dipindahkan keluar Banjarmasin, misalnya ke Tanah Grogot-Pasir, ke Padang dan ke Manado. Dengan demikian batang tubuh Seri Budiman menderita semacam sakit lemah. Karena kian kurangnya tokoh-tokoh sebagai pemimpin organisasi, Seri Budiman dibubarkan.

Tahun 1903 muncul lagi organisasi sosial. Namanya Indra Buana. Tujuannya hampir sama saja dengan Seri Budiman. Indra Buana pun mengalami nasib seperti yang di derita oleh pemuka-pemuka Seri Budiman. Yang tidak mau dipindahkan harus diberhentikan dari jabatannya dan dicabut haknya sebagai pegawai negeri. Yang dipindahkan keluar Kalimantan harus berjanji “tidak akan mendirikan atau turut sesuatu organisasi di tempat pekerjaan barunya.”

Indra Buana lumpuh. Kekurangan pemimpin yang mampu dan sungguh-sungguh mengatur organisasi dan memegang asas tujuan perhimpunan. Meskipun demikian

masih ada yang bertahan, siap bangkit mengatur organisasi baru.

Tahun 1907 muncullah organisasi yang lebih tanggap dan berani menegaskan asas tujuannya. Organisasi baru ini mencanangkan tujuannya “Indonesia Sempurna, Indonesia Mulia”. Organisasi itu namanya Budi Sempurna. Tempat perhimpunannya di Sungai Mesa-Seberang Masjid, Belitung, Kelayan, Banua Anyar dan Kuin.

Organisasi sosial dan keagamaan yang namanya Budi Sempurna, banyak melibatkan unsur pemuda sebagai kader pemimpin masyarakat. Mata tajam kolonialisme-imperialisme dan pihak feodalisme memperhatikan susunan masyarakat yang dibina oleh kaum pergerakan. Budi Sempurna diimbangi oleh kekuatan kaki-tangan Pemerintah Hindia Belanda. Suatu ketika bubarlah Budi Sempurna. Tertinggal kesan bahwa orang Banjar masih mampu menjalankan organisasi dan meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-citanya.

Para pedagang itu juga juga membisikkan nama-nama “bubuhan politik” seperti Babu (Housman Babu), Bondan (Amir Hassan Bondan), Horman (Muhammad Horman alias Ajun Horman), juga Anang Acil (Jaksa Anang Acil Kesuma Wiranegara). Belakangan terkenal nama-nama Haji Matarip (Haji Muhammad Arip Bakumpai), M. Yusak (Muhammad Yusak), dan beberapa orang tokoh lainnya yang berasal dari Tanah Jawa.

Muhammad Arip dikenal sebagai salah seorang pendiri cabang Sarekat Islam di Banjarmasin tahun 1914 dan Pedoman Besar organisasi Bindo (Barisan Indonesia) yang berdiri pada tahun 1931. Housman Babu dikenal sebagai salah seorang pendiri organisasi Pakat Dayak yang belakangan dipimpin oleh Mahir Mahar dan kawan-kawannya. Muhammad Horman merupakan Hoofd Bestuur

Sarekat Islam tahun 1920. Dan M. Yusak adalah seorang guru Taman Siswa di Marabahan dan ia juga anggota PNI tersiar di Kalimantan Selatan bersama gerakan organisasi kepanduan yang namanya “Kepanduan Bangsa Indonesia” (KBI) dibantu oleh Muhammad Saberan, dan lain-lain.

Dunia pergerakan yang semula hanya berada di Banjarmasin, akhirnya juga memasuki kota Kandangan dengan berdirinya Perhimpunan “Persatuan Bangsa Indonesia” (PBI) di Kandangan tahun 1933. Tampak papan nama di muka rumah Jalan Masjid, dibaca: “Markas Persatuan Bangsa Indonesia (P.B.I) Cabang Kandangan”. Di bawahnya tampak papan nama: “Perguruan Rakyat Parindra Kandangan”.

Tuan Guru Haji Muhammad Hafip, seorang ulama fakih, telah menyerahkan sebuah rumah (pinjaman) untuk PBI dan untuk Perguruan Rakyat.

Anak, menantu, anak cucu berada dalam lingkungan PBI ini. Jadi tidak kepalang tanggung. Jadi anggota sekaligus pengurus, pembantu dan murid sekolah. Semua keluarga jajaran sejalur mendatar sedarah-sedaging hidup jadi anggota PBI. Di tempat ini seringkali terdengar: “Hidup PBI”. Alangkah hebat dan mulianya pengorbanan seorang ulama fakih seperti Haji Muhammad Hafip.

Tahun 1937 didirikan Perguruan Medan Antara. Tetapi PBI sudah dilebur jadi Parindra. Parindra Cabang Kandangan. *Pengawas Onderwijs Commissie* (POC) yang mengurus semua sekolah dan kursus-kursus menyewa sebuah rumah penduduk yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal kediaman Kiai Kepala Kandangan Kota. Perguruan Medan Antara ini dan rumah yang disewa di Jalan Anakmasweg.

Tahukah Anda, mengapa ada nama Jalan Anakmasweg di Kandangan? Orang bilang, yang mati

dikubur di sisi jalan itu adalah seorang ajudan tuan Kontelir yang setia. Mati ketika terjadi pertempuran di Hantarukung tahun 1886.

Tahun 1938 dimulai membangun gedung Parindra dan sekaligus jadi sekolah Perguruan Rakyat dan Perguruan Medan Antara. Ukurannya lumayan, 5 lokal. Terbagi 3 lokal untuk Perguruan Rakyat dan 2 lokal untuk Perguruan Medan Antara. Gedung ini juga dipergunakan untuk keperluan kursus-kursus dan rapat-rapat partai dan lain-lain, kiranya bermanfaat bagi masyarakat.

Di dalam kursus-kursus partai itulah diketahui sumber ilmu pengetahuan serba ringkas tapi penting. Di dalam waktu 2 kali dalam seminggu mengikuti kursus politik partai diketahui bahwa Budi Utomo lahir tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Sejak itulah, aku tahu bahwa kiranya setelah berdiri Seri Budiman barulah lahir Budi Utomo.

Catatan ini penting. Catatan ini bukan khayal, tetapi merupakan historis-politik dalam sejarah bangsa Indonesia.

Budi Utomo, PBI, Serikat Ambon, Jong Sumatera, dan lain-lain organisasi melebur dan menggabung dirinya menjelma menjadi satu kesatuan partai: Partai Indonesia Raya di singkat Parindra.

Bendera partai warna: Hijau-Merah-Putih. Lagu utamanya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars PBI, Mars Parindra, dan lain-lain yang semuanya bersifat kebangsaan-nasionalisme Indonesia.

Ada Parindra Puteri (Rukun Keputerian Parindra), dipimpin langsung oleh ibu-ibu Parindra. Mereka tidak termasuk kelas intelek. Tetapi mereka pandai memimpin organisasi politik. Bahkan ada diantaranya yang tidak mempunyai ijazah Sekolah Rakyat. Tetapi ketika dipersilakan naik mimbar (podium), orang akan heran dan terbelalak matanya. Dialah ibu Hajjah Saniah yang turut

hadir dalam Kongres Parindra di Bandung. Turut bicara, turut berdebat.

C. MEMASUKI DUNIA PERGERAKAN

Saat Parindra berdiri di Kandangan, mulailah aku memasuki Sekolah Perguruan Medan Antara Parindra, hingga sampai kelas II (1937-1939).

Di Kandangan usaha Parindra dan Rukun Keputerian Parindra selalu aktif mengadakan rapat-rapat umum, baik di dalam kota maupun di kampung-kampung hingga ke pedesaan yang agak terpencil. Rumah-rumah disewa oleh *Pengawas Onderwijs Commissie* (POC). Ada penduduk secara suka rela meminjamkannya untuk Sekolah Rakyat dan Kursus Buta Huruf (buta aksara) Latin dan Arab. Di sana juga didirikan warung-warung rakyat menjual makanan dan minuman sistem koperasi. Koperasi-koperasi desa didirikan. Dengan adanya kegiatan usaha itu praktis Parindra-POC kekurangan Guru (pria dan wanita).

Dengan penuh risiko dan kebijaksanaan diangkat tenaga-tenaga terlatih, selanjutnya diberikan pengarahan tentang ilmu dasar “mendidik dan mengajar”, sistem jangka pendek dan jangka panjang.

Mereka yang diangkat ialah para pemuda anggota Parindra dan Surya Wirawan. Diantaranya ditunjuk supaya mampu jadi guru, termasuk aku yang diangkat jadi guru sambil sekolah di Perguruan Medan Antara. Pagi tengah hari sekolah. Sore mengajar dan sesekali mengajar Kursus Buta Huruf. Juga sebagai Ketua Organisasi Persatuan Pelajar Medan Antara (PEMANTARA), Ketua Koperasi PEMANTARA, Ketua Dewan Redaksi Brosur PEMANTARA. Selain itu, aku memasuki organisasi pemuda anggota: Gerakan Pemuda Anshar (GPA), dan Nasrul Umum.

Perjuangan meminta tenaga. Kulakukan tiga jabatan rangkap dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam organisasi Pemuda Surya Wirawan sebagai Ketua Regu (Group) Surya Wirawan (*Werkthrop*). Semua beban tugas kewajiban ditanggung secara sukarela.

Bagaimana pun juga terjadilah batasan kerja. Sekolah tak dapat lagi dilanjutkan. Hanya sampai tingkat kelas 3, tiga bulan lamanya. Mula-mula mengajar di Sekolah Rakyat Kandangan Kota. Kemudian dipindahkan ke Karang Jawa (4 km jauhnya dari kota). Dipindahkan lagi ke Gambah. Desa Gambah dengan rumah kami lebih kurang 5 km jauhnya. Tak mungkin lagi jalan kaki. Ibu yang hampir tak berdaya terpaksa menggadaikan suatu benda berharga untuk membelikan sebuah sepeda. Harganya “Tujuh rupiah lima puluh sen”. Bagi kami jumlah duit yang demikian jumlahnya memang berat mengeluarkan. Namun, ibu-bapakku memberikan pengorbanannya.

Sebagai guru bantu yang menerima bantuan (gaji sementara) sebesar f. 7,50 (Tujuh rupiah lima puluh sen). Kami berjanji akan mengembalikan uang ibunda berangsur-angsur. Namun kenyataannya sejumlah murid Sekolah Rakyat Parindra yang kurang mampu diantaranya dibebaskan dari pembayaran walau cuma sepuluh sen sebulan.

Uang gaji sementara itu sebenarnya dipungut dari hasil jumlah pembayaran. Jika terdapat lebih dari jumlah gaji dua orang Guru (Guru Kepala) dan pembelian alat-alat pendidikan, selebihnya harus dibayarkan kepada Ketua atau Bendahara POC di Kandangan.

Guru Kepala acapkali sakit. Maklum serba kekurangan bahan hidup. Sesekali kurang beras. Sarapan pagi diganti dengan ubi singkong (*gumbili*) yang direbus dan dimakan dengan gula merah.

Apabila Guru Kepala tak dapat masuk, maka praktis sebagai Guru Bantu harus mampu mengajar untuk tiga ruangan (kelas I, II, dan III). Bayangkan, bagaimana melaksanakannya supaya pendidikan-pengajaran berjalan baik dan lancar.

Berkaitan dengan Parindra, pada tahun 1940-1945 aku turut menghadiri kongres Parindra. Pada Kongres Parindra ke-3 di Banjarmasin 10-12 Mei 1940 yakni ketika sedang menaikan bendera Surya Wirawan seiring lagu kebangsaan Indonesia Raya, aku ditangkap resersi PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) Belanda, diperiksa namun kemudian dibebaskan.

Sesuai agenda, Kongres Parindra ke-3 akan dilaksanakan pada tanggal tanggal 10-12 Mei 1940 bertempat di di Gedung Bioskop Eldorado, Pasar Lama Banjarmasin. Kongres ini dihadiri cabang-cabang Parindra di Kalimantan Selatan seperti dari Kandangan, Barabai, Amuntai, Kelua, Tanjung, Kuala Kapuas, Kotabaru, dan lain-lain. Sebelum puncak acara (kongres) dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan rapat umum yang dilaksanakan pada malam hari di gedung bioskop Eldorado. Selain dihadiri anggota Parindra, Surya Wirawan, rapat umum itu juga dihadiri oleh polisi PID, Wedana, dan Komisaris Polisi untuk Kalimantan, di samping banyaknya pengunjung sehingga penuh sesak sampai meluap ke luar gedung.

Pada saat rapat umum berlangsung terjadilah kericuhan, karena utusan Parindra cabang Amuntai dengan beraninya mengibarkan bendera merah putih meski berdampingan dengan bendera Belanda pada saat arak-arakan.

Begitupula A. Zakaria, salah seorang tokoh Parindra Banjarmasin, dengan bersemangat berbicara mengobarkan semangat kemerdekaan itu. Dalam pidato A. Zakaria yang

menjadi persoalan adalah ketika ia mengucapkan kalimat berbunyi: “.....*bagaimana pun juga air yang dibendung suatu ketika bendungan itu akan hancur lebur.....*”. *Stop, stop, stop!*....tiba-tiba Komisaris Polisi van Burer berteriak sambil mengangkat tangannya untuk menghentikan pidato itu. Atas perintah Asisten Residen dan Kontelir, akhirnya PID bertindak tegas dengan membubarkan rapat tersebut. Dalam peristiwa pembubaran kongres waktu itu, terjadi kericuhan kontra Belanda, tetapi diamankan oleh aparat Belanda dan *Veldpolitie* (Kepolisian).

Setelah kejadian itulah, maka Zakaria dan seluruh pengurus Parindra yang ada dalam kepanitiaan kongres ditahan polisi PID (ditanyai tentang apa maksud pembicara tersebut). Pihak Belanda menyatakan bahwa pembicaraan Ketua Panitia Kongres Parindra saat berpidato di podium dianggap telah melanggar peraturan *Wetboek van Strafrecht Nederlandsche Indie*. Oleh Pemerintah Hindia Belanda A. Zakaria dipersonanongratkan di Kalimantan Selatan dan akhirnya dipindahkan ke Malang.

Peristiwa itu terjadi tanggal 10 Mei 1940. Gedung Eldorado Pasar Lama kembali sepi (sekarang bangunan toko-toko dan bioskop merdeka, milik Husin Razak, mantan sekretaris Parindra cabang Banjarmasin).

Selain PBI dan Parindra, berdiri pula Partai Ekonomi Kalimantan. Lebih masyhur namanya: PEK. Pelopornya adalah Anang Acil yang dalam tulisan dikenal A.A. Kesuma Wiranegara. Anang Acil adalah ayah kandung A.A. Hamidhan dan A.A. Rivai, yang juga wartawan Soeara Kalimantan, Kalimantan Raya, dan Borneo Simboen. PEK ini mempunyai cabang di Hulu Sungai. Kedudukan Pengurus Cabang di Kandangan.

Organisasi ini bertujuan membela rakyat kecil dari kesukaran-kesukaran ekonomi, yang dalam praktiknya

hanya dapat mengumumkan peraturan *erakan* dan memberikan pertolongan kepada mereka yang sudah semestinya dibebaskan. Mereka melakukan pembelaan berdasarkan Undang-Undang Hindia-Belanda sendiri.

Sudah barang tentu pihak kaki tangan Belanda “harus curiga”, sebab PEK dengan tujuannya itu dapat mengorganisir beberapa puluh bahkan ratusan penduduk di Hulu Sungai.

PEK dapat mengusahakan pendaftaran orang bebas pajak baik terhadap penduduk yang usianya lebih 50 tahun maupun terhadap anak dewasa yang usianya kurang 18 tahun atau lebih, terutama karena belum kawin (tidak berkeluarga). Pajak-pajak yang patut dibebaskan seperti: pajak kepala, pajak sawah (tanah yang kurang subur), ladang gunung (tidak terpelihara baik).

Dalam tahun 1936-1937, aku dengan anggota PEK lainnya beberapa kali melakukan pembelaan berdasarkan undang-Undang Hindia Belanda sendiri.

Hasilnya puluhan bapak-bapak kaum tani terhindar dari penderitan pajaknya dan sejumlah persawahan-perladangan juga dapat dibebaskan pungutan wajib pajak yang telah lama menjadi beban bagi para petani itu pada zamannya.

Nama PEK dan pemimpin-pemimpinnya populer di kalangan penduduk Hulu Sungai, karena pembelaannya secara jujur, tanpa dipungut bayaran. Namun kaum tani secara jujur pula berbuat atas nama hati nuraninya datang menemui pembelanya dan memberikan sekadar jasa, baik berupa duit maupun berupa benda, padi atau dengan berasnya.

Untuk menyuarakan perjuangan organisasinya, PEK menerbitkan Soera Rakyat Kalimantan (SORAK) langsung dipelopori oleh Anang Acil Kesuma Wiranegara. Pada

perkembangannya, SORAK dihentikan penerbitannya, dan sebagai gantinya terbit Soeara Kalimantan dipimpin oleh A.A. Hamidhan.

Apa yang kami kerjakan untuk membela para petani itu, tidak dilakukan para Kiai (*Onderdistrict-Hoofd*) atau Kontelir. Malahan pihak Pembakal (Lurah) dan Pangerak (Pembantunya) seolah-olah lebih berkuasa dibanding Kontelir, sehingga tindakannya juga seringkali memberatkan rakyat kecil.

D. PROPAGANDIS GERAKAN SWADESI DAN KOPERASI

Sesudah Kongres Parindra II di Bandung tahun 1938 tiba saatnya “gerakan swadesi dan koperasi di Kalimantan Selatan”.

Pers en Adviesbeureuw-Agentschap Pustaka Raya di Kandangan tambah maju usahanya. Membeli dan mendatangkan beragam pakaian ala tenun Yogya dan Solo. Disebut “kain pakaian swadesi”, misalnya: peci Indonesia, dasi batik, ikat pinggang tenun (pria, wanita) untuk pakaian wanita tua dan muda. Jualan kain swadesi ini sungguh-sungguh menarik perhatian masyarakat Hulu Sungai. Dagangan yang lain seperti: lemon temulawak, beras kencur, potret atau gambar pemimpin Indonesia.

Pada kain pakaian dan botol-botol diberi tanda cap Pustaka Raya Parindra. Ada lagi yang khusus yaitu potret dr. Sutomo sebagai lencana yang ditaruh pada bagian baju dada sebelah kiri. Potret-potret pemimpin yang dijual antara lain: dr. R. Sutomo, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dr. A. K. Gani, Haji Agus Salim dan Haji Oemar Said Cokroaminoto. Ukuran potret sama 9 x 12 cm.

Aku jadi propagandis. Mula-mula dijual di Pasar Kandangan tiap hari pasar yakni Selasa dan Jum'at. Di toko Pustaka Raya dijual tiap hari.

Di rumah pegawai Pustaka Raya, masing-masing juga menjualnya dengan harga tetap. Di antara pakaian yang paling laris peci Indonesia dan dasi batik. Kain lurik banyak terjual habis.

Minuman yang segar dan yang paling laris lemon temulawak. Potret yang paling laris dr. Sutomo, Ir. Soekarno (tangannya ke dagu), Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara. Menyusul dr. A. K. Gani (potretnya cantik, dia pemain film "Di antara Bumi dan Langit"). Semua gambar terjual tanpa ada tawar menawar harga.

Waktu berjualan di Pasar Barabai. Di Barabai ada Cabang Parindra, Surya Wirawan, Persatuan Putera Borneo, *Bond Indonesische Chauffeur* (BIC), organisasi Musyawaratutthalibin dan Nahdlatul Ulama. Di Birayang ada Cabang Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO). Cabang Parindra dan Surya Wirawan sudah lama berdiri.

Kalau hari pasar Barabai penduduk membawa barang dagangannya yang bermacam-macam. Dari Birayang juga sama berdatangan. Yang menjual kelapa, kopra, minyak kelapa, sayur-mayur dan sebagainya. Ramai juga Pasar Barabai kala itu.

Setumpuk kain lurik, potret dan lainnya di hampar di atas tikar dan tempatnya di sisi jalan pusat pasar. Semuanya di atur rapi. Di bagi tiga kelompok: 1 potret, 2 kain, 3 minuman.

Kalau hari terlalu panas "lemon temulawak" membusa. Lantas meletup keras. Penutup terlepas melambung tinggi. Air lemon temulawak menyembur.

Lemon temulawak panas. Menembak, ujar pembeli yang terkena semburannya. Tentu saja diantaranya ada yang basah dan tertawa.

Waktu pekan ketiga bulan Oktober 1936 hari terlalu panas. Musim kemarau. Jualan mengering kena terik matahari. Tiba-tiba orang terkejut. Pembeli berkerumun memilih barang-barang. Yang membeli dan yang menjual hanya bertanya-tanya.

Tiba-tiba datang dua orang Opas Kontelir Barabai. Tentunya pakaian seragam coklat. Ada pedang lengkung di pinggangnya. Ada gada kayu besi dan karet di tangan masing-masing. Lalu tegak berdiri di muka jualan. Pegang gambar Soekarno, A. K. Gani dan S. K. Trimurti. Kemudian pegang peci Indonesia (merah dan hijau). Pegang lagi dasi batik, corak bunga padi dan keris Mataram.

Dia bertanya: *“Berapa harga gambar ini, peci, dasi ini?”*.

Disahut murah saja. Soekarno dua belas setengah sen. Peci tiga puluh lima sen dan dasi dua puluh lima sen.

“Bagus”, sahutnya. Sekarang cepat ambil semua barang-barang ini. Bawa ke kantor tuan Kontelir. Begitu desak dua orang Opas Kontelir.

Orang-orang yang berkerumun di situ jadi terkejut. Mereka saling bertanya-tanya. *“Ada apa?”*.

“Biarkan saja di sini. Aku bawa gambar Soekarno, A. K. Gani dan S. K. Trimurti, peci dan dasi. Biarkan dagangan di sini. Takkan hilang,” jawabku memandang Opas-Opas.

Aku digiring Opas Kontelir dengan cepat. Orang-orang mengira, diriku maling atau barangkali penjual kain curian. Bukan, bukan. Diriku propagandis barang-barang swadesi, kain nasional. Aku diantar ke kamar kerja tuan Jaksa. Jaksa memeriksa diriku, katanya: *“Jangan jualan lagi di Pasar*

Barabai. Tuan Kontelir tidak memberikan izin. Itu dilarang. Itu dagang politik. Lekas pulang ke Kandangan”.

Sekali kudengar kaki kirinya membentak. Ia membuka pecinya karena keringat meleleh. Tampaknya marah.

Aku senyum melihatnya. Dia tambah marah. Karena perintahnya, aku siap pulang.

Segera kembali ke tempat jualan. Orang-orang masih banyak yang berkerumun dan bertanya-tanya kepada diriku. “Oo, tuan Kontelir melarang berjualan di sini. Tidak ada izin berjualan,” jawabku. Mereka diam saja. Di antaranya ada yang cepat-cepat membeli peci, lemon temulawak, gambar Soekarno dan A. K. Gani, Ki Hajar dan SK Trimurti.

“Terima kasih, kawan-kawan telah membantu membelinya”.

Tutup dagang. Angkut, angkat. Segera pulang. Pulang.

Tentang gerakan swadesi dan koperasi. Swadesi sudah diceritakan sedikit tapi diketahui oleh masyarakat Tanah Banjar. Tentang gerakan koperasi. Koperasi masih suatu pengetahuan dan usaha yang agak asing bagi penduduk Kalimantan Selatan bahkan umumnya bagi orang-orang yang bertempat tinggal di pulau Kalimantan ini.

Di Kandangan sudah banyak koperasi seperti Bank Koperasi Murni, *Verbruik* Koperasi Murni, Koperasi Rukun Tani, dan sebagainya.

Berita tentang koperasi berdiri di Kandangan menggembirakan, terutama bagi anggota Parindra yang turut aktif menggerakkannya. Di Barabai, Birayang dan di Amuntai dan Tanjung-Murung Pudak, juga berdiri koperasi walaupun berjalan apa adanya. Yang belum ada koperasinya seperti: Bank Koperasi Murni dan *Verbruik* Koperasi Murni. Akan tetapi menggembirakan lagi karena ada Koperasi Serikat Minyak Bumi di Tanjung. Koperasi Ikan Kering di Amuntai.

Tanjung-Murung Pudak memang daerah penghasil minyak bumi atau minyak tanah. Amuntai daerah penghasil ikan sungai.

Masyarakat sudah mengerti dan memahami bahwa koperasi itu bermanfaat sekali bagi pertumbuhan dunia usaha, apalagi, suatu desa atau kampung yang letaknya jauh dari pasar.

Koperasi didirikan untuk mambantu kaum lemah, petani dan ibu-ibu rumah tangga yang penghasilannya agak rendah. Barang-barang milik koperasi yang diperjualbelikan harganya “tidak boleh lebih mahal” dari bandingan harga pasar atau di toko-toko. Sedapat mungkin lebih murah dan sekurang-kurangnya “harga sama tinggi-sama rendah”.

Nah, koperasi mulai hidup bersama penduduk dan masyarakat. Bila di suatu desa apalagi kota telah berdiri koperasi, tandanya lingkungan masyarakat itu sedang berada pada tingkat kesadaran berkeluarga, bersekutu, berbangsa dan bernegara. Sebab dalam batang tubuh koperasi di tanam pengertian persatuan, seia-sekata untuk mencapai cita-cita kebahagiaan hidup. Harus sesama anggota masyarakat saling menunjang, bantu-membantu, tolong-menolong.

Dalam kesatuan rumah tangga koperasi, dididik agar setiap orang dan setiap anggota harus berbuat jujur, setia dan mempunyai tata hidup seperti koperasi. Dengan demikian terjelmalah apa yang dikatakan masyarakat demokratis, masyarakat nasionalis dan masyarakat agama.

Koperasi hidup di mana-mana, koperasi hidup sendiri dan kehidupannya secara gotong-royong.

E. MASUK PENJARA

Ada lima orang temanku yang menjadi guru di sekolah Rakyat Parindra, mereka adalah Muhammad Hamdi, Hasan

Ahmad, Baseri Ucut (Hasnan Basuki) dan Syahrijad. Guru Syahrijad khusus untuk kaum puteri sambil belajar mengerjakan pekerjaan kerajinan tangan.

Kujalani hidup sebagai guru bantu lebih kurang 11 bulan lamanya.

Waktu itu bulan April, aku dua kali ditanya oleh orang Resersi PID. Apakah cukup syarat ilmu mendidik dan mengajar sebagai Guru. Jangan membuat bodoh rakyat. Jangan mencari duit yang tidak halal. Sudahkah bayar pajak kepala, pajak jalanan. Uang wajib pajak satu tahun 1939, dan banyak pertanyaan lainnya.

Betapa hidup dan merasa terjepit, kemudian diancam hukuman badan dan denda. Kawan-kawan seperjuangan begitu juga. Aku sudah dilaporkan akan ditangkap. Kawan-kawan menyuruh lari saja supaya tidak ditangkap Belanda.

Ancaman buruk itu sampai ke telinga ibunda. Ibuku menangis.

“Sudah berhenti saja”, ucap ibu. Aku termangu.

Aku bicara dengan kawan-kawan ketika jadi Guru di Sekolah Rakyat Parindra dimana Ranting Parindra berdiri.

Akhirnya aku terpaksa juga harus lari. Harus lari ke daerah pehuluan.

Seorang calon Kiai sekelas wedana bilang kepadaku: *“Tum lari saja. Kemana saja. Akan ditangkap.”*

Baik hati dia itu. Namanya “R”.

Besok harinya, aku terpaksa lari.

Mula-mula ke Amuntai, kemudian ke Tanjung, ke Murung Pudak. Sewaktu di Amuntai seorang kawan menyampaikan surat telegram tuan Kontelir Kandangan (bahasa Belanda), terjemahannya lebih kurang: *“Cari dan tangkap orang yang bernama Artum bin Bakar, di mana saja berada. Serahkan kepada Voorzitter Magistraad Kandangan. Dia buronan politik dari Guru Parindra*

Kandangan. Laksanakan segera-segera-segera". Kontelir-Voorzitter Magistraad Kandangan.

Demikian bunyi telegram.

Aku sudah merasa aman. Seorang Kepala Kantor Pajak di Tanjung tempat tinggalku sementara beberapa hari, tiba-tiba menyuruh aku pulang. Katanya, dia tak berani tanggung jawab karena surat panggilan Jaksa Kandangan. Aku lari, tetapi kakiku tak sengaja, mengapa arah ke Kandangan, naik sepeda sejak pagi sampai senja atau 13 jam lamanya. Peristiwa itu terjadi bulan puasa. Aku dalam keadaan menjalankan ibadah puasa.

Ketika berada di Kandangan hari Jum'at yang juga hari pasar, aku ditangkap oleh Jaksa Manhuri dibantu oleh dua Opas Kontelir. Hampir saja tangan diborgol. Tetapi Jaksa Manhuri memberikan isyarat matanya. Opas dan Polisi tak jadi melakukannya.

Pukul 10.00 pagi aku berada di ruang jaga Opas Penjara Kandangan (*Huis van Bewaaring en Gevangenes te Kandangan*). Semua pakaian dilucuti. Diganti dengan pakaian orang hukuman Penjara. Seperti orang jahat saja. Padahal hukuman politik. Tetapi bagi daerah yang agak terpencil seperti di Kandangan, aparat Pemerintah Hindia Belanda hampir tidak membedakan, mana orang jahat pencuri ayam, mana orang jahat pembunuh dan perampok, dan mana orang yang di namakannya orang politik.

Di Penjara Kandangan (1939-1942) hampir tak bedanya. Satu-satunya orang pergerakan dalam penjara waktu itu hanya diriku.

Di penjara selama tujuh hari selalu dihina oleh Opas Penjara. Yang dianggap lebih tidak bermoral lagi, karena seorang kawan bekas satu sekolah bahkan sekelas (Ahmad Gafuri Ujal) turut pula menghina. "*Kita kawan baik, tapi*

sekarang kawan jadi lawan baik. Makanya dahulu 1932, aku tak mau masuk KBI", ujarnya membengis.

Kupandang wajahnya kawan seiring seperhitungan di kelas lima, raut wajahnya memang wajah saling bermusuhan. Dipalingkannya mukanya. Kutundukkan mukaku dan aku digiringnya masuk ruang penjara yang sempit, ruang yang gelap baunya seperti dalam kandang kambing. Penjara waktu itu tak perlu lagi diceritakan karena banyak jeleknya.

Minggu pagi Opas Penjara memanggil. "*Lekas keluar nama Artum bin Bakar. Jahanam*", gerutunya. "*Nah, itu Jaksa memanggil. Cepat maju*". Sedikit pantat disepakinya dengan sepatu berduri paku. Tidak sakit, tapi malu.

Pikir, Oo, itu Jaksa Manhuri lagi.

Hari ini tuan Magistraad dan tuan Kontelir memerintahkan kepada kami Jaksa, Artum dibebaskan sementara. Dengan syarat jangan melakukan kegiatan politik Parindra. Ada dua gadis menebusnya dengan uang tunai f. 7, 50 (Tujuh rupiah lima puluh sen). Hukum badan penjara selama tiga bulan 15 Mei sampai dengan 15 Agustus 1939 dibebaskan. Tapi di kenakan *Onderwijs Verbed*.

Dasarnya karena melanggar *Wilde Schoolen Ordonnantie* 1932 yang diperbaharui tahun 1937.

Bulan Juli 1939, ketika aku mengorganisasi persatuan bulutangkis di Kandangan namanya PBT Swastika (dalam kamus artinya kemerdekaan), aku dipanggil lagi oleh Jaksa Manhuri atas nama tuan Kontelir. Dianjurkannya supaya nama persatuan itu diganti namanya dengan BC Satrya.

F. BERKENALAN DENGAN JURNALISTIK

Di Kalimantan sudah terbit surat kabar harian, mingguan dan bulanan, juga berbagai organisasi pergerakan baik organisasi lokal maupun cabang dari induknya di Pulau

Jawa. Sungguh rakyat Indonesia di Kalimantan tidak ketinggalan zaman dalam hal pembaharuan hidup, asas dan tujuan manusia untuk mencapai cita-cita kemuliaan bangsa dan kebahagiaan tanah air Indonesia.

Pada umumnya pemimpin-pemimpin surat kabar, mingguan dan majalah saling punya pengertian bahwa mereka harus maju dan yakin dalam membela bangsa dan tanah airnya yang dicintai. Mereka siap maju ke depan medan perjuangan dengan caranya masing-masing.

Mereka dikenal sebagai pers perjuangan yakni pers yang menyuarakan kemerdekaan, tetapi pendirinya dan penanggungjawabnya, barangkali belum pernah menerima bantuan, kecuali bantuan moral belaka. Pengorbanannya berupa tenaga, pikiran dan harta benda.

Beberapa surat kabar dan majalah ada hubungannya bahkan akrab dengan suatu partai politik yang bergerak di Indonesia. Tidak saja dengan partai politik nasional juga dengan organisasi Islam yang cenderung menganut paham politik disebut partai politik Islam, organisasi Islam. Misalnya surat kabar Harian Umum (Dagblad Harian Oemoem) di Surabaya dan surat kabar TEMPO (Dagblad Tempo) juga terbit di Surabaya, keduanya menyuarakan organisasi Parindra. Akan tetapi, Parindra dan Surya Wirawan juga mempunyai media cetak sendiri yaitu Suara Parindra dan Sinar Surya Wirawan.

Suara Taman Siswa isinya banyak ditulis oleh gembong-gembong PNI. Sedangkan Suara PGI (Persatuan Guru Indonesia) juga demikian.

Di Kalimantan terbit antara lain: Bendahara Borneo, Perasaan Rakyat, Suara Rakyat Kalimantan (SORAK). Ketiga surat kabar ini terbit di Samarinda.

Suara Kalimantan, Kesadaran Kalimantan, Suara Hulu Sungai, Perintis, Utusan Kalimantan, dan Bingkisan. Terbit di Banjarmasin dan di Barabai.

Di Kandangan terbit majalah Purnama Raya, Suara M. Th. (Musyawaratutthalibin), dan Pembangun Semangat.

Ada majalah Islam yang namanya “Islam Bergerak”. Majalah ini bukan organ partai Islam akan tetapi wadah suara Kaum Pejuang Islam dengan asasnya menuju kemerdekaan bangsa Indonesia dan tanah air, diharapkan menjadi kemuliaan umat. Tokoh-tokoh Islam lazim menyuarakannya dengan “*Baldlatun Thaiyibah Warabbun Ghafuur*”.

Di Banjarmasin surat kabar Suara Kalimantan dan Suara BIC (*Bond Indonesische Chauffeur*) yang kemudian ganti nama PERINTIS. Keduanya diasuh oleh anggota GAPI dan anggota Parindra.

Tahun 1939 majalah Pembangun Semangat kena *persdelict*. Pembangun Semangat diasuh oleh dan dibantu orang-orang Parindra. Korespondennya yang berada di luar Kalimantan pun juga orang-orang Parindra.

Sesudah Pembangun Semangat kena *persdelict* dan di berangus, maka penanggungjawabnya dituntut di meja Pengadilan Negeri (*Landraad Kantoer*) di Kandangan. kepadanya dijatuhkan hukuman penjara dan pengasingan selama 4 tahun. Dia yang mendapat hukuman penjara itu Ahmad Barmawi Thaiyib.

Tinggal dua buah majalah Islam. Suara M.Th (Musyawaratutthalibin) dan Berita N.Oe (Nahdlatul Ulama) masing-masing di Kandangan dan Barabai. Kedua majalah ini diasuh oleh anggota Parindra/M.Th dan yang lain diasuh oleh anggota Parindra/NU. Pemimpin Redaksi (*Hoofdredacteur*) masing-masing M. Arsyad dan H. Hamdi

Redwansyah. Dia juga Ketua Cabang Surya Wirawan Barabai.

Para pemimpin partai gerakan partai politik (Parindra, PNI dan Gerindo) di Kalimantan Selatan, berjuang memenuhi asas-tujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Mereka senantiasa diawasi oleh Pemerintah Hindia Belanda yang menggunakan PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) sebagai alat kekuasaannya untuk menggerebek.

Biasanya kalau seseorang Ketua Cabang (Pengurus Partai) yang bicara dengan isi sebuah pidato penerangan, juga menjadi tajuk rencana surat kabar, majalah atau sebagai tulisan ilmu pengetahuan (artikel-artikel).

Sementara itu ruang Taman Budaya selalu memuat prosa, puisi, (sajak, pantun, syair) yang mengandung falsafah, sosial-politik dan propaganda agama. Oleh karena itu, si penulis Taman Budaya dan ruang lainnya, mereka memakai nama samaran (*vuilnaam*). Cara demikian untuk menghindari incaran mata-mata PID Belanda.

Tajuk Rencana (*hoofdarticul*) ditulis oleh Pemimpin Redaksi. Akan tetapi ada juga tajuk rencana itu ditulis oleh pihak lain dan sudah tentu mereka itu satu asas, satu tujuan, satu partai. Jika seorang pegawai negeri (*ambtenaar*) menulis artikel, pakai nama samaran, berarti dia seorang anggota partai, sekurang-kurangnya simpatisan pendukung partai yang aktif.

Pada tahun 1936 mulai didirikan organisasi yang namanya: *Persemen Adviesbeureuw-Pustaka Raya* dan *Agentschaap Onderlinge Leven van Zekering Maatschappij Boemipoetera*.

Organisasi ini dipimpin oleh H.A.A Madjid dengan penasihat Mr. Rusbandi dan Mr. Tadjuddin Noor.

Aku bekerja dengan tunjangan “Tujuh puluh lima sen” sebulan. Calon sebagai Staf Redaksi *Persbeureuw* dan sebagai Penagih Langganan (Rekening Lapor).

Pekerjaan itu cukup menggembirakan, sebab banyak hubungan dengan pegawai kantor-kantor yang ada dalam daerah Amandit–Kandangan. Hubungan dengan Kantor Asisten Residen, Kontelir, Pajak, P.U. juga dengan toko-toko, seperti Toko Abdul Muti, Toko H. M. Sjukeri, Toko N. Abe dan sebagainya.

Sejak itu mulai pula mengenal apa arti surat kabar nasional dan surat kabar kolonial. Misalnya Suara Kalimantan (Nasional), Suara Umum Surabaya dan Tempo (Nasional), Suara PGI (Nasional), Taman Siswa (Nasional). Pergaulan tambah luas. Pengetahuan demikian pula.

Pada hari Selasa dan Jum’at banyak tamu yang datang menyewa buku bacaan pada Pustaka Raya. Mereka pegawai negeri dan kaum cendekiawan, anggota-anggota partai atau organisasi, dan juga terdapat kaum tani yang sudah mulai cerdas dengan bacaannya.

Dalam tahun 1937 *Persbeureuw Pustaka Raya* ini mulai diawasi oleh sejumlah kaki tangan Belanda (*Hoofd van Plaatselijke Bestuur*) disebut secara populer HPB Kandangan.

Suatu ketika aku dipanggil tuan Kontelir karena sebuah berita yang dimuat dan disiarkan oleh sebuah Harian Umum Surabaya, berita singkat sebagai berita daerah, berjudul: “Kaum Tani dan Pajak Rakyat”.

Itulah peringatan pertama dan pelajaran serta pengalaman pertama dalam dunia pers dan jurnalistik.

**G. PEMERINTAH HINDIA BELANDA
MENGEKANG PEGAWAI NEGERI**

Pemerintah Hindia Belanda berupaya mungkin agar pegawai negeri (*Binnenlands Bestuur*) loyal kepada pemerintah. Seandainya seorang pegawai negeri merangkap sebagai jurnalis atau memuat tulisan yang isinya menyudutkan pemerintah, kemudian diketahui oleh tuan Kontelir, Kiai, hingga tuan Asisten Residen, maka pastilah dia ditegur keras. Bentakan tuan Kontelir atau Asisten Residen pasti terjadi: “Pilih: Partai, Jurnalis atau Ambtenaar”.

Pegawai yang kena tegur itu akan berpikir 1001 macam. Bagi seorang yang sudah matang berpartai, setia janji partai, paham kebangsaan sudah pasti dia menunjukkan semangat “nasionalisme”. Dia menyatakan dengan hormat: “Saya minta diberhentikan dari pekerjaan”.

Meskipun demikian seandainya terjadi seorang bangsa Belanda, dia seorang Kontelir yang sadar terhadap bangsanya sendiri, juga dia harus berpikir 2x5 dalam 2x24 jam. Sebabnya antara lain pegawai kantor akan kehilangan tenaga intelek yang cakap.

Kemungkinan lain pun akan terjadi seperti teguran dan pemecatan terhadap pegawai dapat diterima oleh pihak atasannya atau dia sendiri yang ditegur dan dipindahkan ke lain daerah dengan jabatan yang lain pula. Hal-hal yang demikian itu bukan saja terjadi di Kalimantan Selatan tetapi juga di daerah-daerah lain.

Seorang bangsa Belanda yang mengerti dan mendalami ilmu bangsa-bangsa, peradaban-kebudayaan, ilmu sejarah kebudayaan dan falsafah hidup manusia, cukup memperhatikan pegawai bawahannya, sementara perbuatan bawahannya itu tidak melanggar disiplin kerja pemerintahan. Jika seseorang pegawai negeri (klerek, jurutulis, guru) turut menjalankan tugas partai di luar waktu jam kerja, cara ini dapat dibiarkan.

Tetapi bagi pegawai yang mengganggu kewajiban kerja kantor atau dia berbicara urusan sosial-politik-pemerintahan di dalam kantor, dia segera ditindak. Pegawai negeri yang ikut asas partai dalam waktu secepatnya pasti mengalami gencetan atau dilepas dari pekerjaannya, tanpa diperbolehkan membela diri.

Ada lagi cara lain. Bangsa Belanda yang jabatannya Kontelir, Asisten Residen, karena tak sampai hati menegur pegawai bawahannya yang menjadi pendukung partai-organisasi politik, dia diminta mengajukan surat cuti ke Negeri Belanda. Permohonannya disampaikan kepada *Hoofd Ambtenaar*, misalnya seorang Kontelir *Binnenlands Bestuur* kepada tuan Residen.

Akan tetapi tidak banyak kasus yang terjadi terhadap pegawai bangsa Belanda. Yang sering terjadi adalah terhadap pegawai bangsa bumiputera. Perbandingannya dalam skala angka 1000:1 dan ini pun barangkali bandingan angka yang masih besar.

Di Jawa, misalnya cuma seorang nama Douwes Dekker (Multatuli). Di Kalimantan Selatan, sepengetahuanku cuma sekali terjadi, yakni terhadap seorang yang disebut Meneer Arhem de Vloetten Asisten Residen (*Assistent Resident van Hulu Sungai*) di Kandangan (1939).

Ketika dia berangkat meninggalkan tempat kediaman resmi di Jalan *Pes-Passerweg*, hampir seluruh pegawai negeri termasuk Kepala-Kepala Kampung (para Pembakal) turut menghormatinya, melepaskan kepergiannya. Tidak terkecuali beberapa orang pimpinan dan anggota partai politik, para Penghulu dan tuan Qadi-Mufti memberikan kehormatan atas segala kerja sama yang baik dan jasanya. Dan orang-orang Parindra yang hadir di situ mengucapkan "Selamat jalan, hidup tuan Vloet".

Nah, di Sumatera dan di Sulawesi “tidak terdengar”, aku tidak mendengarnya yang demikian.

Sebaliknya ada bangsa Indonesia yang ambtenaar BB lebih keras membesi tindakannya, apalagi dia Inspektur Polisi, Resersi Klas I/II atau dia punya pangkat/jabatan Komis Kepala (*Hoofd Commies*), betapa congkaknya, sungguh berani mengejek bangsanya sendiri yang berjuang tanpa pamrih untuk mencapai cita-cita “Indonesia Mulia, Indonesia Merdeka”.

Aku pernah mengalami dan merasakan cubit-ceraan berkaitan dengan pergerakan yang kujalani. Di tahun 1932, cercaan itu justru berasal dari guru kami sendiri yang ia tujukan kepadaku dan kawan-kawan anggota Kepanduan Bangsa Indonesia: “*He, Tum. Kalau mau merdeka, bikin dulu benang katon. Pandai jahit dengan jarum. Pandaikah membuat jarum sebilah dalam setahun?*”. “*Nah, ayo, coba-coba merdeka*”.

Ada lagi cercaan yang kuterima dari Kiai Kepala (*Districthoofd*) Kandangan Kota kepadaku: “*Heh, Tum. Kau serdadunya Parindra. Kapan Parindra merdeka, pabila (kapan, pen.) ada pabrik jarum dan kain kaki drill. Sampai kiamat Belanda tidak menyuruh merdeka. Pikirkan! Lekas pulang! Laporkan kepada Guru-Guru politik*”.

Dia memang pejabat pemerintahan sipil Belanda, berpangkat Kiai Kepala. Namanya Merah Nadalsyah. Namanya dan kedudukannya sangat populer di Kalimantan Selatan waktu itu. Tetapi jangan heran bahwa ia bertolak belakang dengan haluan politik anaknya sendiri. Putera utamanya, yakni Merah Johansyah adalah Komisaris Daerah Parindra Kalimantan Selatan atau seorang Perintis Kemerdekaan.

Aku anggota Parindra, juga anggota Surya Wirawan dan aku juga Guru Bantu Perguruan Rakyat Parindra Cabang Kandangan.

Macam-macam cara Pemerintah Hindia Belanda mengelabui dan mengekang pegawai negeri agar politik pemerintahan dan cita-cita kemerdekaan berbangsa, kemerdekaan bernegara, kemerdekaan berbahasa Indonesia, jangan tercapai.

H. KAUM TANI TURUT DALAM PERGERAKAN KEBANGSAAN

Aku kurang mengetahui bagaimana menjalankan rencana kerja perjuangan Parindra Cabang Banjarmasin, Martapura, Pelaihari dan Kotabaru, juga di Pagatan dan Tanah Grogot. Sebab selama tahun-tahun perjuangan 1932-1942, hanya tiga kali pernah menginjak Banjarmasin. Pertama tahun 1934, ketika Pamanku menjalankan *ototaksi* Banjarmasin-Hulu Sungai. Waktunya pun sangatlah terbatas. Antar penumpang ke tempatnya, cari ambil penumpang yang hendak ke Kandangan-Hulu Sungai. Beli buah-buahan seperti rambutan, kasturi dan mangga Jawa. Buah seperti itu sukar didapat di Kandangan. Biar pun rambutan ada tapi tidak seenak rambutan Astambul.

Yang aku lihat para penjual buah-buahan itu kaum tani kecil sebagai pedagang musiman.

Perahu-perahu kecil tahun 1934 masih dapat melintasi anak-anak sungai Teluk Dalam, Telawang, dan Sungai Mesa. Perahu-perahu bawang Madura pun dapat memasukinya dengan muatan yang sarat.

Tahun 1935 turut Paman lagi ke Banjarmasin. Membeli ban luar-dalam *ototaksi*. Di kota Banjarmasin penduduknya lebih padat dibanding kota-kota di Hulu Sungai. Kendaraan juga banyak. Taksi pulang pergi antar

angkutan tumpangannya dan barang dagangan. Taksi kecil Ameo, Bemo dan Fiat untuk membawa tumpangan dalam kota saja.

Barang dagangan diangkut dari pelabuhan ke toko-toko memakai gerobak tarik (tenaga buruh kasar) dan mereka pengambil upah borongan. Upahnya murah, tetapi cukup sekadar ukuran hidup rakyat kecil. Kalau sampai dua kali pulang pergi angkut barang dari pelabuhan ke toko-toko (pasar), keringat mencucur. Lalu mereka buka baju. Betapa tidak, tampak urat-urat kencang dan selapis daging, baju kering sekadar menutup tulang-tulang yang kepayahan hidup. Kurus tampaknya dan selalu haus dan dahaga. Tidakkah kasihan?

Di Sungai Parit Pasar Lama aku dengar ada gedung Parindra Cabang Banjarmasin dan sebuah Sekolah Rakyat Parindra.

Kesempatan mengenal tokoh-tokoh politik waktu itu belum ada. Terutama karena aku masih muda.

Tahun 1940 aku ke Banjarmasin lagi. Waktu itu turut ikut dalam satu rombongan besar utusan pemuda Surya Wirawan Cabang Kandangan. Dari Kandangan ke Banjarmasin kami menumpang perahu. Sehari semalam lamanya dalam perjalanan barulah sampai di Pasar Lama Banjarmasin.

Tahukah Anda yang duduk, berdiri, tidur, makan, minum dalam tiga buah perahu itu semuanya kaum tani kecil, kecuali ada seorang pedagang kecil dan seorang Pembakal (Kepala Kampung) Padang Batung. Namanya Haji Abdul Kadir. Beliau yang tertua dalam rombongan, tapi juga pakai seragam Surya Wirawan.

Kami menghadiri Kongres Parindra III di Banjarmasin mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Mei 1940. Tempat Kongres di Bioskop Eldorado Pasar Lama.

Pada tanggal 10 pagi pukul 08.00 aku ditugaskan pegang komando menaikkan bendera Parindra dan Surya Wirawan diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan lagu Mars Surya Wirawan. Acara pembukaan Kongres Parindra III dipimpin oleh Ketua Panitia Kongres Ahmad Zakaria.

Kami tidak mengetahui acara-acara kongres dalam Eldorado. Kami hanya berjaga-jaga dan melaksanakan tugas masing-masing menurut petunjuk panitia.

Dua buah bendera partai dan Surya Wirawan siap untuk dinaikkan. Ketika jam menunjukkan pukul 09.00, acara Kongres dibuka. Bendera harus sudah siap berkibar di puncak tiang bendera.

Pengerek untuk dua bendera partai siap satu grup Wirawan dan Wirawani. Suasana tenang saja. Banyak orang hilir mudik membawa barang dagangannya sambil memperhatikan bendera lagi terayun-ayun pada tali tiang bendera naik ke angkasa.

Tiba-tiba datang dua orang polisi PID dan seorang Reserse. “Bendera tidak boleh dinaikkan. Ini perintah paduka tuan Asisten Residen Banjarmasin”, katanya sambil marah-marah.

Kami terkejut. Kongres dibatalkan. Ada apa. Apa sebabnya bagi kami kurang jelas. Tapi kami curiga barangkali ada kesalahan tata cara dalam memimpin sidang kongres awal pembukaannya. Biasanya kalau seorang ketua partai/rapat mau berbicara di podium, dia harus menyerahkan terlebih dahulu kepada wakilnya. Jika hal itu terlanggar, maka sidang/rapat boleh saja dibubarkan oleh alat kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Itulah aturan permainan partai yang diatur oleh pemerintah.

Semua kaum tani sebagai peserta kongres, termasuk ratusan anggota peninjau saling bertanya. Kami baru

mengetahui sesudah pukul 12.00 (tengah hari). “Itu Negeri Belanda telah dicaplok oleh Jerman Raya-Diktator Hitler.”

Sengketa di Negeri Belanda dibakar apinya di Indonesia, hal wajar bagi kaum kolonial-imperialistis.

BAB III

DI MASA PENJAJAHAN JEPANG

A. PERANG ASIA TIMUR RAYA

Tahun 1942, aku masih tinggal di Kandangan Kota atau tidak jauh dari rumah kediaman resmi tuan Asisten Residen Afdeling Hulu Sungai dulu. Sekarang tempat tinggal itu merupakan kediaman resmi Bupati Hulu Sungai Selatan.

Sejak bulan Juni 1940 Hindia Belanda (*Nederlands Indie*) dinyatakan sebagai negeri dalam kekuasaan militer dan darurat perang (*Staat van Oorlog en van Beleg*). Pada tanggal 10 Mei 1940 negeri induknya yakni Negeri Belanda diserang dan dikuasai oleh Jerman dibawah komando Hitler. Kerajaan Belanda waktu itu menyatakan perang terhadap Jerman dan sekutunya. Belanda masuk blok Amerika, Inggris, dan Australia. Singkatan organisasi sekutu itu disebut ABDA, dibentuk tanggal 15 Januari 1940 dan tahun 1942 diorganisir dengan perubahan Amerika, British, Deutsch, China (ABCD Front). Dengan demikian, 5 negara bersekutu melawan musuhnya yaitu Jerman dan sekutunya serta Jepang.

Pimpinan tertingginya pada tahun 1942 adalah Jenderal Wavell. Admiral Einde van Hart sebagai komandan Angkatan Laut dan Jenderal Heim Ter Poorten (dari Belanda) sebagai komandan Angkatan Darat.

Ketika di Eropa Nazi Jerman berhasil menguasai Negeri Belanda, maka di Timur tentara Dai Nippon mengobarkan Perang Asia Timur Raya dan bermaksud menguasai wilayah Asia Pasifik termasuk Hindia Belanda.

Untuk kepentingan persiapan ekspansinya, jauh hari sebelumnya Jepang telah mengirimkan banyak mata-mata

ke Hindia Belanda. Untuk menghindari kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda, maka mata-mata atau spion itu merangkap profesi lainnya seperti pengusaha, dokter gigi, juru potret, dan lain-lain. Di Banjarmasin dikenal adanya dokter gigi Shogenji atau juru potret Hashimoto.

Dalam bidang ekonomi, Jepang mengincar sumber minyak bumi di Hindia Belanda untuk kepentingan industrialisasinya. Pada tahun 1942 Delegasi Dagang-Industri Jepang datang lagi ke Jakarta (Batavia). Mereka mengadakan perundingan dengan Pemerintah Hindia Belanda yang langsung dipimpin oleh Gubernur Jenderal Belanda di Buitenzorg, Istana Bogor.

Seperti pertemuan yang terjadi pada tahun 1939, begitu juga tahun 1942 Jepang mendesak agar dalam penjualan minyak bumi, Jepang diikutsertakan. Tetapi pihak Belanda konsekuen, tidak akan melakukan penjualan minyak ke pihak Jepang. Kontrak dengan Amerika Serikat dan Inggris sudah ditandatangani sebagai pembeli dwitunggal. Pihak Belanda tidak mau kerjasama ekonomi-keuangan antara Den Haag-Batavia dan Tokyo-Yokohama-Jepang.

Delegasi Jepang marah-marah. Ketua Delegasi tidak lagi pamit. Pulang tanpa diketahui. Delegasi pulang ke Tokyo bersama Konsulat Jepang. Surat kabar Tokyo Simboen dan Asahi Simboen juga turut memprotes penolakan Belanda itu.

Di Eropa gejolak munculnya Perang Dunia II semakin menjadi-jadi. Setelah Negeri Belanda dicaplok oleh Hitler, Jerman, maka pusat Pemerintahan Kerajaan Belanda dipindahkan ke London Inggris. "*Vaarwel*,....", ucap orang-orang Belanda.

Di Asia Timur, kemudian disebut Asia Raya, selanjutnya Asia Timur Raya suasana tambah hangat.

Jepang mulai mengadakan aksinya. Dia menggunakan segala ilmu pengetahuan dan kekuatan angkatan perang armada Negeri Matahari Terbit: *Dai Nippon-Taikuko-Banzai*. Anehkah tindakan Jepang dengan semangat bushido itu?

Tanggal 8 Desember 1940 pecahlah Perang Dunia II yang menjalar ke Asia dengan nama Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya.

Meski pecah Perang Dunia, antara tahun 1940-1942 suasana Kalimantan masih biasa-biasa saja, karena belum ada serangan terhadap Indonesia. Belum ada larangan keluar malam, meskipun Hindia Belanda sudah dinyatakan SOB. Partai politik dan berbagai organisasi yang ada masih diberi hak berkumpul dan bersidang. Boleh mengadakan pertemuan tetapi harus terlebih dahulu memajukan permohonan izin.

Sampai tahun 1940-an partai politik terbesar dan berpengaruh di Kalimantan Selatan masih Parindra dan Gerindo. Selain itu, berpengaruh pula organisasi keislaman seperti Musyawaratutthalibin, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.

Pada pertengahan tahun 1941, mulai sesekali terdengar raungan mesin pesawat melintas yang oleh penduduk tidak dikenal identitasnya. Akan tetapi setelah beberapa hari pihak pejabat tertinggi di Kalimantan Selatan memberitahukan bahwa suara di udara itu adalah pesawat Bomber B-29 milik Amerika. Namun orang berbisik-bisik tidak percaya sebab pada pesawat yang terbang rendah itu, terlihat ada tanda bundar dan di tengah-tengahnya berwarna merah. Penduduk tahu bahwa yang memakai tanda bundar itu jelas bukan pesawat Amerika. Meskipun demikian orang-orang tutup mulut, khawatir kalau nantinya didakwa sebagai spion Jepang. Dugaan penduduk memang

benar. Angkatan Udara, Laut, dan Darat Jepang sudah dekat di ambang pintu Kalimantan Selatan, karena pulau penghasil minyak, Tarakan, sudah dibombardir oleh balatentara Jepang.

Keadaan aman, kata pihak *Algemene Vernielings Corps* (AVC). Di Kandangan, Kepala AVC ini namanya Hendrick Mpuntang (orang Menado), ia pegawai *Verkeer en Waterstaat Dienst* (V en W), sekarang semacam Dinas Pekerjaan Umum.

Pada bulan Februari 1942 tuan Asisten Residen Afdeling Hulu Sungai sudah tidak ada di Kandangan. Ia ke Jakarta kemudian pulang ke negeri Belanda. Pejabat Asisten Residen dipegang oleh tuan Kontelir (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*) Onderafdeling Amandit (Kandangan).

Masih segar dalam ingatanku, waktu itu berkeliaran apa yang digelar oleh Belanda '*Rechercheur*' (resersi) atau spion Belanda. Mereka mencari orang-orang pergerakan kebangsaan, barangkali ada yang jadi mata-mata. Namun ternyata tidak ada.

Kemudian pada tahun 1942 penduduk Kalimantan Selatan dilarang keluar malam mulai pukul 20.00 sampai dengan pukul 05.00 subuh. Umat Islam gelisah karena kebiasaannya untuk beribadah sedikit terganggu.

B. PASUKAN JEPANG MEMASUKI KANDANGAN

Pagi hari masih kabut oleh embun malam terus menetes di halaman rumah, di jalanan. Pagi-pagi sekali terdengar suara-suara keras: subuh, subuh, subuh berkumandang dari surau yang dekat dengan rumahku. Keluargaku terbangun semua untuk untuk melaksanakan sholat subuh.

Kira-kira pukul 6 pagi aku mendengar bunyi suara-suara manusia, hiruk pikuk suara gemuruh seperti banyak

orang berkelahi. Suara itu bukan suara penduduk. Bahasanya tidak di mengerti. Satu-satunya yang dapat diingat: “*Taikuke-Banzai*”. Apa itu?

Aku turun ke tanah, berdiri di halaman. Berselubung sarung, celana pendek. Dari jauh terlihat pasukan apakah yang lewat. Kiranya balatentara Jepang. Mereka berseragam baju belacu kekuning-kuningan, diantaranya ada yang robek-robek, dan memanggul senjata senapan semuanya. Tampak kelakuannya seperti tidak punya adat. Tampak pada wajah-wajah mereka dan lakunya dalam keadaan lapar, dahaga, dan garang. Mereka jelas serdadu perang, haus perang.

Orang bilang, itulah pasukan Jepun. Orang bilang itulah pasukan Nippon. Orang bilang juga, itulah pasukan Jepang. Ya, pasukan Angkatan Darat (*Rikugun*) Jepang yang datang dari Tarakan, Balikpapan, Murung Pudak, Tanjung. Dengan gagah perkasa melintasi demarkasi pertahanan Belanda akhirnya sampai di Kandangan. Kalau tidak khilaf peristiwa bersejarah itu terjadi pada hari Minggu pagi tanggal 8 Nigatsu 2602 atau tanggal 8 Februari 1942.

Bedil diacung-acungkannya, kemudian beberapa batang pisang ditebangnya. Buahnya diambil. Dikupas lantas dimakan dengan lahapnya. Ayam lewat ditembaknya. Sambil terus berjalan, bulu dan kulit ayam itu dikoyak-koyaknya. Tinggal daging yang mulus. Dengan bayonet, daging itu dibagi-bagi dan dimakan bersama. Beberapa hari kemudian barulah aku tahu bahwa parang panjang yang dipakai serdadu Jepang itu namanya “samurai”, senjata Jepang yang ampuh sekali.

Kota Kandangan dan sekitarnya tetap aman. Orang-orang sudah berani pulang pergi ke pasar membawa barang dagangan. Meskipun demikian penduduk tetap memasang kupingnya. Ternyata serdadu Jepang sudah masuk kota

pagi-pagi tanggal 8 Februari 1942. Barangkali semua serdadu Jepang itu lapar dan dahaga karea perjalanan jauh dari utara ke selatan. Hari Minggu menurut ingatanku adalah adalah hari awal Jepang mulai berkuasa di Kandangan dan sekitarnya.

Ada berita bahwa yang jadi penunjuk jalan (*guide/pioneer*) Jepang dari Tarakan sampai Banjarmasin (tanggal 10 Februari 1942) adalah tuan Muhammad Yus'a. Beliau Kepala Klerek pada Kantor Kontelir di Tarakan.

Waktu itu di Tarakan banyak bangsa Jepang yang bekerja sebagai swasta, sebagai juru potret, juru rias, dan pedagang. Keadaannya sederhana. Kiranya spion-spion Jepang itu sudah mengenal tokoh Muhamad Yus'a ini. Ia pun diangkat sebagai *pioneer*.

Aku mengetahui hal itu ketika Muhammad Yus'a bekerja sebagai Sekretaris Gubernur Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru tahun 1960-1963 (zaman Gubernur H. Maksid). Sesudah Jepang menguasai Kalimantan Selatan, Yus'a turut pasukan Jepang.

Apakah Jepang memberi tanda jasa kepada Yus'a, tidak ada beritanya. Yang diketahui dari keluarganya adalah bahwa ia mendapat hak pensiun sebagai pegawai negeri RI, dan tinggal di Malang, sampai wafatnya.

Menurut Yus'a, orang-orang Jepang di Tarakan rata-rata jadi spion. Memang Tarakan dekat Filipina, batu loncatan Jepang ke Selatan, dan Tarakan sebagai penghasil minyak menjadi daerah penting untuk dikuasai serdadu Jepang.

C. POTONG LEHER

Orang-orang tua sebayaku di Kandangan tentu masih ingat, tiga bangsa Belanda yang siap menerima tentara Jepang tiba-tiba dijejer di tepi Sungai Amandit. Pagi itu,

tanggal 8 Februari 1942 sekitar pukul 09.00, tiga orang bangsa Belanda mati terbunuh dengan cara dipancung lehernya oleh tentara Jepang. Ketiganya: tuan Kontelir (*Controleur Hoofd van Plaatselijk Bestuur Onderafdeling Amandit*), Kepala Kantor Pajak (*Landrente Kantoor van Departement van Financien*), Inspektur Pertanian Hulu Sungai (*Landbouw Consulents van Afdeling Hulu Sungai*). Yang disebut terakhir, mempunyai gelar Insinyur Ahli Pertanian. Baru saja datang dari Negeri Belanda. Nama ketiganya tak tercatat.

Semula tuan Kontelir bermaksud menyambut kedatangan pasukan Jepang dan menyatakan kedatangan mereka secara damai dan terhormat. Tak diduga kalau tentara Jepang itu secara tak beradab, menangkap dan menahan di tempat penyambutannya. Dan, satu persatu leher pejabat-pejabat pemerintahan itu dipancung dengan pedang samurai. Terpisahlah tiga buah kepala dengan tiga batang tubuhnya. Darahnya muncrat. Ngeri. Orang-orang yang kebetulan berada di sekitarnya disuruh menguburkan ketiga mayat itu dekat kaki jembatan Antaluddin Kandangan.

Keesokan harinya barulah aku mengetahui bahwa pasukan balatentara Jepang itu berasal dari kelompok Rikugun (Angkatan Darat) Dai Nippon.⁵

Sejak itu bendera Jepang Hinomaro berkibar di tiang-tiang bendera yang dahulunya tempat bendera Belanda. Pasukan Rikugun Jepang ini konon telah memasuki daerah Tapin Rantau berpencar dan meneruskan perjalanan

5 Tentara Jepang yang memasuki Kalimantan Selatan terdiri dari dua kelompok, yakni Rikugun (Angkatan Darat) datang dari Balikpapan- Muara Uya-Tanjung,-Amuntai-Barabai terus ke Banjarmasin, dan Kaigun (Angkatan Laut) mendarat di Jorong-Pelaihari terus ke Banjarmasin. Perkembangan selanjutnya pemerintahan militer Jepang di Kalimantan Selatan dipimpin oleh tentara Kaigun.

militernya ke Banjarmasin. Per kompi tinggal di Kandangan, Rantau, Martapura dan selebihnya di Banjarmasin.

Penguasaan kota-kota di utara Banjarmasin oleh Jepang tanpa adanya perlawanan yang berarti membuat hati pejabat pemerintahan Hindia Belanda di Banjarmasin menjadi kecut. Walikota Banjarmasin Van der Meulen dan Kepala Javasche Bank Konig berencana menyerahkan kota Banjarmasin kepada Jepang, sebaliknya AVC (*Algemene Vernielings Corps*) atau Korp Untuk Penghancuran berencana melakukan pembumihangusan terhadap kota agar tidak dimanfaatkan oleh Jepang.

Sasaran atau objek vital yang akan dihancurleburkan adalah segala jalan yang kemungkinan dilalui tentara Jepang menuju ke Banjarmasin, seperti lapangan terbang, jembatan-jembatan, jalanan yang dikelilingi rawa.

Di Banjarmasin, mereka berencana menghancurkan jembatan Coen, pelabuhan kapal-kapal KPM, gudang-gudang dan lain-lain. Untuk tugas ini diberikan dua buah truk dan sebuah mobil penumpang. Agar dapat merusak lapangan terbang, dibuatlah bom-bom yang berupa silinder seng sepanjang 1 meter dan garis tengah 20 cm serta diisi dinamit sebesar 100 kg.

Pada malam Minggu tanggal 9 dan 10 Februari 1942 kota Banjarmasin menjadi lautan api. Seluruh kendaraan militer rusak dan dijejer di Jalan Simpang Sungai Bilu. Jembatan Coen satu-satunya penghubung Jalan Ulin (kini Jalan A. Yani) ke pusat kota Banjarmasin, didinamit yang menyebabkan bunyi ledakan dahsyat yang menggetarkan dan terdengar di seluruh kota.

Pembumihangusan itu, ternyata juga diwarnai oleh penjarahan penduduk terhadap toko-toko Cina, rumah-rumah Belanda, dan kantor atau perusahaan yang ditinggalkan pemiliknya karena mengungsi.

Serdadu Jepang sangat marah dengan tindakan pembumihangusan yang dilakukan Belanda itu, beberapa pejabat Belanda yang melakukan penyambutan yakni Burgemeester Van der Meulen, Smits (*Head Editor Borneo Post*) dan seorang Cina, dipancung di atas sisa-sisa reruntuhan Jembatan Coen ketika kedatangan tentara Rikugun Jepang (Angkatan Darat) dari Hulu Sungai pada tanggal 13 Februari 1942.

Dokter Gigi Shogenji sangat menyesal dan meratapi tewasnya Smits, karena ia tidak sempat mencegahnya. Meski orang Belanda, di mata Shogenji, tuan Smits dipandang sangat berjasa karena anak-anak Shogenji diasuh dan dibimbing beberapa tahun olehnya sebelum ia dipanggil pulang ke Tokyo. Smits juga dikenal sebagai seorang anggota *Nederlands Sosial Democratische Arbeiders Partij* (NSDAP) yang juga sahabat karib Shogenji dan berperan sebagai mata-mata tak resmi Jepang.

Sebagai wartawan Borneo Post, Smits tentunya mengetahui banyak tentang kedudukan bangsa Belanda yang berkuasa di Kalimantan Selatan saat itu. Kemarahan dokter gigi Shogenji atas tewasnya Smits itu sedikit terobati ketika serdadu Jepang pemancung leher Smits ikut pula dipotong lehernya.

D. MEREKA MEMANGGILNYA MINA-SAN.

Pada tahun 1943 atau 2603 (tahun Jepang) mulailah Jepang mendatangkan beberapa perempuan-perempuan muda, dan perawan umumnya dari Jawa. Sebagian mereka dipekerjakan di Rumah Sakit Umum (RSU Ulin). Mereka biasa dipanggil *mina-san*, *mina-san*.

Perempuan-perempuan Jepang itu diasramakan di asrama Jalan Telawang dan kampung Kristen (*Militaireweg*). Di asrama yang disebut *ian jo* itulah mereka

disekap sebagai budak seks atau *jugun ianfu*. Konon kabarnya, perempuan-perempuan berusia belasan tahun itu ditempatkan dalam bilik-bilik terpisah. Masing-masing berukuran 3x2,5 meter.

Para jugun iafu itu harus siap melayani hasrat seks para tamu. Orang bisik-bisik bahwa perempuan itu sengaja didatangkan untuk melayani pejabat tertinggi Jepang di Banjarmasin, misalnya untuk Borneo Meisinbu, Kepala Kempeitai, Kepala Bank Tokyo, untuk Direktur-direktur perusahaan besar seperti Mitsubishi Kabushiki Kaisha, Toyo Menka Kabushiki Kaisha, Borneo Simboen, dan sebagainya.

Selain Jugun Ianfu, serdadu Jepang juga berkeliaran mencari perempuan-perempuan lacur atau memaksa perempuan-perempuan yang bersuami untuk melepaskan nafsu birahinya dengan ancaman bayonet. Kalau hal ini diketahui Kempeitai, serdadu-serdadu Jepang itu pasti dihukum berat karena dilarang mengganggu penduduk bangsa Indonesia.

E. NIPPONISASI

Kekejaman tentara Jepang menimbulkan kegelisahan pada diri para aktivis pergerakan. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, pengurus partai politik dan organisasi-organisasi pergerakan baik nasional maupun Islam, segera menghapus daftar pengurus dan semua cap stempel. Khawatir kalau ditemukan oleh tentara Jepang.

Tiga bulan kemudian terbit pengumuman pemerintah Jepang di Kandangan antara lain.

1. Dilarang menggerakkan atau pun menghidupkan partai.
2. Dilarang ikut menggerakkan atau menghidupkan kembali partai atau organisasi Islam.

3. Semua gedung-gedung milik Pemerintah Hindia Belanda, menjadi milik Pemerintah Jepang (*Kaigun Dai Nippon*);
4. Semua gedung-gedung tersebut berada di bawah kekuasaan Kepala Pemerintahan *Bunken Kanrikan*, berkedudukan di Kandangan.

Demikian maklumat Pemerintah Jepang (*Kaigun Dai Nippon*) supaya semua rakyat atau penduduk mematuhi.

Hampir di setiap persimpangan jalan dalam kota terdapat pos militer Jepang. Setiap orang lewat gardu jaga militer, harus menundukkan kepalanya. Atau kalau mengetahui bahasa Jepang harus mengucapkan: *Ohayu Guzeimasta, Anata* (selamat pagi, tuan), *Ohayu kun Banwa, Anata* (selamat petang, tuan). Kalau malam hari: *Ohayu, Koni-chiwa, Anata* (selamat malam, tuan).

Lama kelamaan orang Kandangan pandai juga mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jepang, seperti *Arri gato*. Seperti zaman Belanda dahulu orang-orang pegawai sipil Belanda, fasih sekali mengucapkan bahasa Belanda: *Dank Uwwel, Meneer; Goede Morgan, Mener; Goede Avond, Meneer; Goede Middag, Meneer*.

Di zaman Jepang, bahasa Belanda sama sekali tidak terdengar. Nama-nama jalan berganti dengan nama-nama berbahasa Jepang, seperti *Ichiba Dori* (Jalan Pasar), *Go-Rukshi Dori* (Jalan Simpang Lima), dan sebagainya.

Nama-nama sekolah juga digantikan dengan nama bahasa Jepang. Misalnya Sekolah Rakyat 3 tahun (*Hutsu Kugakko*), Sekolah Rakyat 6 tahun (*Hutsu Djikyu Kogakko*), Sekolah Menengah Pertama (*Hutsu Tju-Gakko*), Sekolah Guru setingkat SGB (*Sihan Gakko*).

Begitupula dengan pertanggalan diubah dengan pertanggalan Jepang. Misalnya tahun 1942 (2602), 1932 (2603), 1944 (2604), 1945 (2605). Hari Selasa (Kajobi),

Rabu (Soeijobi), Kamis (Mokoejobi). Tanggal 14 Agustus 1945 ditulis 14 Hatji-Gatsoe 2605.

Di zaman Jepang tidak ada partai-partai politik organisasi Islam meski dalam bentuk apa juapun. Tetapi rumah-rumah ibadah seperti langgar (surau), masjid senantiasa padat oleh pengunjungnya (muslimin dan muslimat). Apalagi kalau hari Jum'at. Masjid besar di Kandangan (belum punya nama), padat sekali, sehingga perlu diperluas. Entah berapa meter panjang dan lebarnya. Maka masjid itu diberi nama Masjid Taqwa.

Tahun 1943 Jepang mendirikan organisasi kepemudaan seperti Seinendan, Konan Hokoku Dan, Boei Teisin Tai dan Heiho.

Semua diberikan pelajaran baris berbaris yang menggunakan bahasa Jepang. Mereka juga mengajarkan huruf dan bahasa Jepang, seperti huruf-huruf Katakana, Hiragana, dan Kanji.

Di Kandangan berdiri maskapai-maskapai Jepang. Antara lain: *Toyo Menka Kaisha*, *Mitsubishi Kabushiki Kaisha*, *Kida Gomei*, *Kasen Unkokai*. Jepang menerbitkan surat kabar Borneo Simboen yang diterbitkan oleh Borneo Simboensja dengan alamat Jalan Pasar – Ichiba Dori.

F. BEKERJA DI PERUSAHAAN JEPANG

Sejak Kandangan di bawah kekuasaan fasisme Jepang mulai tanggal 8 Februari 1942 keadaanku serba kekurangan hingga perdamaian dunia terwujud, aku mengalami berbagai kejadian baik yang menyedihkan, menggembirakan, mengecewakan, maupun yang memerdekakan.

Selama Jepang berkuasa di Kalimantan Selatan, aku bekerja di berbagai macam perusahaan baik swasta maupun

semi pemerintahan Jepang. Pada tahun 1943 aku memasuki sekolah pertukangan *Banjarmasin-shi* selama 6 bulan. Kemudian, aku menerima ijazah yang ditandatangani oleh Banjarmasin-shi co (Walikota Banjarmasin dr. Shogenji). Setelah itu, aku bekerja di perusahaan Jepang *Kidagomi Kabushiki Kaisha* Pelaihari beberapa bulan sebagai pelajar magang yang berkedudukan sebagai wakil kepala pelajar pertukangan. Karena pekerjaan agak berat, suatu hari aku melarikan diri ke Kandangan. Beberapa hari kemudian pergi lagi ke Banjarmasin.

Di Banjarmasin, beberapa bulan lamanya sampai tahun 1944, aku bekerja pada perusahaan Jepang, *Sinko Gomei Kabushiki Kaisha* Jalan Bank Rakyat dengan gaji sebulan Rp 15.00,- (Lima belas rupiah). Direktornya bernama E.Katto. Setelah berhenti, aku kembali bekerja pada *Makassar Kenkyu Kabushi Kaisha* (Urusan Pembuatan Obat-obatan) dengan gaji sebulan Rp. 25.00,- (Dua puluh lima rupiah). Tempat latihannya di Jalan Kalimantan (sekarang: Jalan S. Parman). Para ahlinya adalah dokter-dokter Jepang yang masih muda sekitar 25-30 tahun. Kalau aku pulang kerja, maka tuan dokter Jepang itu selalu berucap kepadaku: *Nippon-na, Indonesia-sama-sama*. Aku bilang: *banzai!*.

Masih tahun 1944 berkaitan tahun 1943, di Banjarmasin aku tinggal di rumah kawan lama yang sukarela menampung. Pernah tinggal di Jalan Jawa (sekarang Jalan D.I. Panjaitan berkumpul dengan pemeluk agama Kristen dan Kaharingan).

Suasana kota terasa mulai berubah. Sesekali terdengar suara sirene. Ada gejala serangan Sekutu-*Australia British-China-Dutch Indies Front* (ABCD).

Karena cinta pada kampung halaman, aku berhenti, sehingga tidak lama di sini hanya 6 bulan. Aku kembali ke

Kandangan. Di Kandangan aku bekerja pada perusahaan surat kabar Jepang: *Borneo Simboensja*, yang menerbitkan surat kabar harian Borneo Simboen cabang Kandangan. Pusat Borneo Simboensja berada di kantor surat kabar Borneo Simboen Banjarmasin yakni di Jalan Pasar Baru 11. Kemudian pindah ke tempat baru di persimpangan Jalan Pasar Baru dan Lambung Mangkurat (sekarang).

Sebelum terbit surat kabar Borneo Simboen, telah terbit surat kabar harian Kalimantan Raya dengan pimpinan redaksi A.A.Hamindhan. Tahun 1942 datang rombongan karyawan Harian Asahi Simboen Tokyo Jepang. Dalam suatu pertemuannya dengan pihak Kalimantan Raya, maka surat kabar Kalimantan Raya dilebur menjadi Borneo Simboen.

Sewaktu di Banjarmasin tahun 1944 aku sempat menulis dua buah sajak yang dimuat dalam Borneo Simboen. Salah satunya berjudul: *siap-sedia*. Honorarium yang kuterima: tujuh sen setengah Rp 0.075 (duit Dai Nippon).

Kujalani bekerja di Borneo Simboensja selama dua bulan. Setelah itu pindah kerja ke maskapai Jepang di Kandangan yakni *Kasen Unkokai Kabushiki Kaisha*. Direktornya bernama Shumano (Letnan Kolonel Angkatan Laut Jepang). Gaji sebulan Rp. 25.00 ditambah tunjangan bermacam-macam barang termasuk rokok kretek dan sigaret gunung Fuji. Cukup menggembirakan. Pekerjaanku mengurus perlengkapan dan pengiriman-penerimaan barang-barang. Tak perlu diceritakan bagaimana risiko dan derita. Namun harus bekerja untuk perut.

Pembantuku di kantor bernama Rohani. Cukup cerah wajahnya. Rajin bekerja dan selalu lincah gembira. Aku pun senang.

G. KUKENANG TUAN SHUMANO YANG MEMBERITAHUKAN PROKLAMASI

Aku terkejut. Kamis tanggal 15 Agustus 1945 (2605) pukul 20.00 aku dipanggil oleh tuan Shumano. Aku berhadapan dengannya. Sedikit gembira tapi gemetar.

“Saudara saya panggil. Tapi jangan takut. Bangsa Indonesia sebentar lagi akan merdeka. Paduka Tuan Yang Mulia Kaisar Hirohito akan memberi kemerdekaan. Di Bangkok ada perundingan pemimpin Indonesia Soekarno-Hatta. Saudara orang pergerakan Parindra dan Surya Wirawan, Guru Sekolah Rakyat Parindra. Nanti merdeka. Nah, ini rahasia. Tidak boleh omong pada orang-orang. Ini saya beritahukan, karena Tum orang pergerakan. Yang lain ada juga pergerakan. Tapi rahasia ini, hanya kau yang tahu. Awas: Tutup mulut. Nah, cukup. Boleh pulang.”

Tuan Shumano mengantarkan sampai ke tangga. Aku pulang naik sepeda tua. Bunyinya: kletek, kletuk, tek-tek-tek. Ciat. Itu sepeda.

Sepanjang jalan tubuh terasa dingin. Apalagi cuaca malam muram. Betul-betul aku tak bisa bicara. Seperti kata: bisu seribu bahasa.

Pagina aku dipanggil lagi. Shumano bilang: *“Bendera Nippon jangan dipasang lagi di dinding kantor. Jangan dinaikkan di tiang bendera halaman kantor. Kei Rei ke Tokyo tidak ada. Beritahukan kepada semua pegawai. Semua pegawai tenang. Gitu saja.”*

Lagi-lagi aku heran. Penuh rahasia dan latar belakang rahasia. Kawan-kawan bertanya ada apa. Kukatakan, tuan

Shumano tidak mengatakan apa-apa. Tetapi bendera Dai Nippon jangan dikibarkan lagi. Karena ada perintah dari Tokyo. Kerjalah yang baik dan benar.

Kawan-kawan tidak tanya lagi.

Sabtu malam semua pegawai dipanggil, kecuali Rohani. Asmail selaku Kepala Pegawai Kantor Kasen Unkokai Kabusiki Kaisha merangkap Bendaharawan melaporkan semua pegawai hadir; pegawai wanita (Rohani) memang tidak dipanggil oleh tuan.

Pertemuan malam itu sepi dan dingin di rumah tuan Shumano di Kandangan Hulu (rumah sewa milik Guru Ahmad Jumri).

Shumano berbicara dan suaranya agak terputus-putus. Ia mengatakan kita akan berpisah. Dan nanti di beritahukan lagi. Gaji sudah dibayar semua. Malam ini pertemuan kita yang baik. Saya akan memberikan sedikit hadiah untuk kenangan. Kita makan bersama. Nah, sama-sama, nah. Kita sama-sama bernyanyi gembira. Lagu Sakura Hana dan lagu Bengawan Solo. Sebagai penutup diperdengarkan lagu yang terdapat dalam cerita “Amat Heiho” karangan Lamberi Bustani yang cukup populer kala itu.

Kami berdiri semua. Tuan Shumano bilang, duduk-duduk saja. Semua duduk. Semua gembira. Pukul 10 malam selesai pertemuan. Pegawai pulang semua. Ketika aku melangkahakan kaki sambil menggapit bungkusan hadiah, aku dengar tuan Shumano memanggil. “*Tinggal sebentar saja.*”

Aku kaget. Batang tubuh terasa dingin. Tidak apa-apa?

Aku dibawa masuk kamar kerjanya. Saling berhadapan. Lampu dikecilkan. Lalu dipasang lilin dua buah di atas meja tulis. Tadinya lampu *stroomking*.

Di kamar ini aku dan tuan Shumano bicara empat mata. Perasaan macam-macam. Kuatir sekali aku akan binasa dan Shumano harakiri. Orang Jepang biasanya nekad kalau menghadapi suatu masalah yang gawat dan dapat berbuat begitu. Malam itu tidak terjadi walau aku merasa ngeri.

Shumano, sungguh-sungguh memandangi diriku. Aku perhatikan wajahnya terlihat agak lain dari hari-hari sepanjang waktu kerja. Dia menyulut rokok. Aku diberinya rokok Semangat. Lebih dua kali dia menyalakan korek api. Padam, padam. Tangannya agak gemetar.

“Saudara. Malam ini saya sebut dan saya panggil nama tuan. Tidak seperti biasa lagi. Malam ini malam Indonesia Merdeka. Soekarno-Hatta proklamasikan kemerdekaan Indonesia, Jum’at pagi di Pegangsaan Timur tanggal 17 Hatji-Gatsoe 2605 (17 Agustus 1945). Tuan bangsa Indonesia yang terhormat seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Soekarno Presiden Republik Indonesia. Tuan Mohammad Hatta Wakil Presiden Republik Indonesia.”

Tuan Shumano diam. Katanya lagi: *“Sama sekali tidak boleh bicara. Tuan jangan bicara sama orang-orang. Tuan terancam potong leher kalau didengar Kempeitai Jepang. Nah, hati-hati. Bawa rokok Semangat ini satu pak. Aturlah pekerjaan di kantor bersama tuan Asmail. Nah, Arrigato Guzaimasta.”*

Aku terima nasihat dan hadiahnya. Sehelai surat kecil ku terima pula. Isi surat itu sebagai tanda boleh bebas jalan pulang malam hari.

Aku pulang. Aku tidak boleh bicara tentang kemerdekaan Indonesia. Potong leher.

Semenjak malam Ahad 18 ke 19 Agustus 1945, aku tahu bahwa tanah air dan bangsa Indonesia telah merdeka. Sumber lain diketahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu (ABCD-Front) di Saigon tanggal 14 Agustus 1945. Saat bersamaan Soekarno-Hatta Pemimpin Indonesia berunding di Dalat, 200 km dari Saigon sejak tanggal 9 Agustus 1945 dengan Pemerintah Jepang atas izin Kerajaan Jepang di Tokyo.

Selain berita pasti yang didapat dari mulut tuan Shumano itu, konon ada penduduk yang sempat merekam suara Domei Jakarta tanggal 23 Agustus 1945. Dia Ahmad Kusasi (mantan Klerek Kantor Asisten Residen Hulu Sungai di Kandangan). Berita itulah yang tersebar di kota Kandangan dan sekitarnya.

Perang Dunia II memang mempercepat proses kemerdekaan Indonesia.

H. PERPISAHAN DENGAN TUAN SHUMANO

Pertemuan dan perpisahan diadakan oleh tuan Shumano, Direktur *Kasen Unkokai Kabushiki Kaisha* Shumano di Karang Jawa-Kandangan tanggal 18 ke 19 Agustus 1945, pukul 19.00 – 20.00 waktu Tokyo. Tuan Shumano memberikan bingkisan sebagai tanda mata kepada semua karyawan. Tampak wajah masing-masing karyawan antara suka dan duka, sebab ciri berakhirnya masa jabatan pegawai maskapai Jepang itu. Kepadaku diberitahukan, supaya tinggal sebentar “*ada yang akan dibicarakan*”, ujar tuan Shumano, tatkala aku sudah berada di tangga rumahnya. Waktu itu semua karyawan sudah

pulang dalam suasana sinar rembulan, diiringi gerimis hujan yang mulai turun.

Sepeda tua kusandarkan di tangga. Aku kembali masuk rumah dengan perasaan ragu dan hati, jantung berdenyut, terasa takut. Bingkisan digantungkan di setang sepeda. Aku berada dalam kamar tuan Shumano. Luasnya lebih kurang 3 x 4 meter. Mulanya terang benderang karena cahaya lampu *stroomking*. Cepat dipadamkan oleh Shumano. Lampu lilin dinyalakan. Kedap kedip.

Hatiku tambah gemetar. Rasa terancam oleh senjata samurai, senjata Jepang yang ditakuti oleh setiap orang termasuk ditakuti oleh bangsa Jepang sendiri.

“Tuan Artum, ucapnya mula-mula. Sekarang saya panggil tuan Artum, karena Indonesia Merdeka. Tuan Soekarno–Hatta bikin “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berita Domei dari Jakarta bahwa di Jakarta amat riuh tapi amat menakutkan. Sebab bangsa Indonesia bersiap menghadapi segala kemungkinan kekeruhan suasana politik pemerintahan antara Indonesia dan Jepang. Tuan Artum tidak boleh omong kepada orang-orang, siapa saja, kalau bocor rahasia ini, Kempeitai akan potong lehernya. Maka Tuan Artum, pulanglah dengan sabar. Saya kasih surat agar dalam perjalanan selamat. Saya hanya ucapkan selamat pisah dan terima kasih, gozaimasu Artum sang....”

Aku pulang dengan sepeda tua yang bunyinya, tik tuk, tik tuk. Sepeda itu pinjaman, milik paman Sarman.

Pikirku, barangkali ada juga orang-orang yang mendapat berita Domei atau barangkali ada radio gelap yang menangkap berita Proklamasi Soekarno-Hatta. Aku tak berani bicara kepada siapa pun.

Kuperhatikan pesan-pesan Shumano, ketika kami berdua sama-sama berdiri di tangga:

“Besok kantor buka saja. Tapi bendera Dai Nippon yang ada di dinding harus buka. Bendera tidak lagi dinaikkan seperti biasa. Keirei ke Tokyo, juga tidak. Hari Senin esok tanggal 19 Agustus kasih bingkisan kepada semua pegawai. Masing-masing satu potong kain. Untuk pegawai perempuan, kasih dia dua potong. Kain laki dan kain perempuan. Sisa rokok yang ada dalam gudang, diatur saja. Saya tetap dalam rumah ini. Selamat malam – Kun banwa”.

Demikianlah kesan akhir dengan tuan Shumano yang baik. Beberapa hari kemudian, barulah orang-orang dan kami semua pegawai mengetahui, bahwa Dai Nippon – bangsa Jepang telah kalah perang, jatuh tersungkur di hadapan pasukan ABCD-Front.

Perundingan akhir antara Soekarno dan Jepang di Dalat Vietnam yang mau memberikan kemerdekaan sudah diketahui oleh Sutan Syahrir, yang dia berjuang “di bawah tanah”, sementara Soekarno – Hatta membuat aksi revolusi kemerdekaan di Jakarta dan sekitarnya. Lewat sudah waktu tanggal 16 Agustus 1945 (2605), tiba fajar kemerdekaan bulan puasa Ramadan di Jakarta, kala itulah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh dwitunggal Soekarno-Hatta pukul 10.00 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat.

BAB IV

IKUT MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

A. PANITIA PASAR MALAM KEMERDEKAAN

Tanggal 11 November 1945, kami berempat yakni Ahmad Basuni (Adni Wina), Haspan Adrian Nadi (Haspan Hadna), Asyikin Zuhry (Asynoor ZA) dan Artum (Murya Artha), mendengar ada pertempuran melawan Belanda di Banjarmasin dan di Surabaya. Tanggal 9 November di Pasar Lama Banjarmasin dan tanggal 10 November pertempuran di Surabaya.

Hampir setiap malam kami mendengarkan siaran pidato dan teriakan seruan radio BPRI Arek-Arek Surabaya Bung Tomo. Tiap kali awal pidato perjuangan kemerdekaan itu selalu diucapkan: “Allahu Akbar”. Kami juga mengatakan: Allahu Akbar. Kami pikir-pikir: Merdeka atau Mati. Kami mendengar siaran itu dari sebuah radio milik orang Cina Kandangan bernama Goey Sian Boen (orangnya tidak ada lagi, barangkali sudah hilang dibunuh Jepang). Kasihan, dia orang Cina yang baik.

Kami kadang bersatu, kadang pula berpisah-pisah, menghindarkan diri dari sergapan orang-orang anti Republik Indonesia, terutama orang-orang Belanda yang sudah menyusup dan kaki tangannya yang berkeliaran. Kami puluhan atau 25 orang banyaknya. Pelopor kami waktu itu Zafry Zamzam. Sesekali kami dengar nasihatnya, ayat-ayat suci Al Qur'an dan Al Hadits. Sesekali hati kami garang, sesekali damai. Kami berjuang membela tanah air yang merdeka-berdaulat. Tempat gerombolan kami di Simpang Lima Kandangan. Suatu jalan persimpangan lima yang paling strategis, jalan lalu-lintas Hulu Sungai-Banjarmasin.

Dalam rangka menyambut Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Ketua Parindra cabang Kandangan, Haji Muhammad Syukeri dan penulis Abdul Jabar, disurati oleh sejumlah anggota Parindra dan Parindra Puteri, untuk mengadakan Pasar Malam.

Oleh pengurus Parindra cabang Kandangan diadakanlah rapat kilat di rumah Haji Muhammad Syukeri di Jalan Pos. Rapat berhasil membentuk Panitia Peringatan Pasar Malam Kemerdekaan. Rencana dilaksanakan selama tujuh malam berturut-turut.

Ketua menyuruhku supaya mencari seseorang yang mampu menyampaikan teks Proklamasi atau Mukaddimah UUD 1945. Aku bergegas mencari Ahmad Basuni (Wartawan Borneo Simboen Kandangan) dan bertemu. Dia segera kusuruh mencari teks Mukaddimah UUD 1945, sekaligus harus cepat ke balai dan membacakan mukaddimah itu. Segala sesuatu tentang Pasar Malam Kemerdekaan ini dirahasiakan. Ketua mengucapkan terima kasih dan kata-kata seperlunya.

Pasar Malam Kemerdekaan diadakan waktu malam mulai tanggal 12 September 1945. Panitia, terdiri dari Ketua H.M. Syukeri (Haji Sono), Penulis Abdul Jabar. Pembaca isi Mukaddimah UUD 1945, pemuda Ahmad Basuni (wartawan Borneo Simboen) Kandangan, didampingi oleh aku (Artum Artha) sebagai Pengantar Acara.

Selesai pembacaan Mukaddimah, suasana Pasar Malam kembali sepi. Orang-orang Belanda (eks tawanan perang Jepang) dibantu oleh militer Australia memaksa dengan ancaman senjata untuk membubarkan Pasar Malam Kemerdekaan di lapangan Amandit Kandangan.

Pasar Malam Kemerdekaan tidak dapat diteruskan karena diancam, harus bubar. Sebagai akibat dibubarkannya Pasar Malam Kemerdekaan itu, terpaksa Haji Syukeri

berdiam diri tinggal di rumah. Suasana Kandangan sepi. Letusan senjata api dimana-mana merupakan ancaman terhadap penduduk. Berangsur-angsur orang-orang Belanda dipersenjatai oleh serdadu Australia.

Suasana terlalu guram. Kandangan sunyi. Di sana-sini orang-orang Belanda membuat kacau dan mengancam penduduk, meskipun hari gelap malam, mereka berkeliaran mengamankan situasi daerah Hulu Sungai.

Pada malam tersebut hampir semua anggota-anggota partai politik tidak dapat tidur, begitu pula pihak Musyawaratutthalibin, Muhammadiyah, dan alim ulama yang bersimpati terhadap Indonesia Merdeka. Para pemuda Hizbul Wathon (Kepanduan Muhammadiyah), Ansor (Kepanduan Nahdlatul Ulama) Nasrul Umum (Kepanduan Musyawaratutthalibin), dan Surya Wirawan (Kepanduan Parindra), mereka bergerombol. Masing-masing membentuk organisasi gerakan bawah tanah (*undergroundactie*). .

Pada malam tanggal 12 September itulah kami membentuk organisasi Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GEPERINDO). Anggota-anggotanya: Artum Artha, Abdul Muhni, Abdul Gafar, Abdul Mu'thy, Abdul Ganie, Ahmad Roosli, Abidin Zainal (Zainal Abidin), Abdul Mursyid, Aryaty Bariah (Bariah Aryaty). Pertemuan pertama dekat rumah Abdul Gaffar di bawah rumpun pohon pisang.

Markasnya di Jalan Parindra menempati rumah A. Zainal di Jalan Koeboerweg (sekarang Jalan Parindra). Markas tersebut tahun 1938–1939 adalah Sekolah Perguruan Medan Antara Parindra. Tugas utama membuat dan memperbanyak selebaran (pamflet). Isinya tentang pemberitahuan “Indonesia Merdeka”. Mengutuk NICA-Belanda.

B. DITANGKAP BELANDA

Alat kekuasaan NICA-Belanda bertebaran di mana-mana. Terkadang sembunyi di tempat-tempat gelap sebagai pengintai musuh. Musuhnya kaum republiken atau pejuang-pejuang kemerdekaan.

Suara Pasar Malam Kemerdekaan sudah diketahui oleh penduduk sekitar Kandangan, sehingga sampai di kampung-kampung. Mereka yang sadar bersiap-siap menyatukan diri dalam suatu wadah organisasi gerakan rahasia bawah tanah. Berbagai nama gerakan rahasia itu. Tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya, karena terjalin dalam rahasia. Waktu itu sulit membedakan antara kawan dan lawan. Sebab terjadi kawan jadi lawan atau sebaliknya. Oleh karena itu, berita pasar malam dan berita Indonesia Merdeka, berjangkit-jangkit satu kepada dua, dua kepada tiga, dan seterusnya.

Dalam bulan Oktober 1945, aksi Belanda makin keras. Kami berlima ditangkap oleh Belanda. Kebetulan sekali kelimanya adalah yang dianggap Belanda sebagai wartawan: Zafry Zamzam, Ahmad Basuni, Haspan Hadna, Merah Daniel Bangsawan, Artum Artha. Dalam bulan Oktober itu pula terjadi penangkapan besar-besaran di seluruh Hulu Sungai.

Empat dari lima wartawan yang ditangkap dibawa waktu malam ke Banjarmasin dan ditempatkan di kamp-kamp rahasia Belanda. Tidak boleh ditemui oleh siapa saja. Sedangkan aku, dimasukkan dalam kamar kamp militer tangsi militer Kandangan. Dijaga selama 2 x 24 jam. Namun tidak habis waktunya, dipulangkan dan bebas.

Penjara penuh sesak dengan tawanan Belanda. Rumah penjara Kandangan sesak. Mereka yang mengalami mengatakan hanya berdiri, dan sukar bebas bernapas. Tokoh-tokoh pergerakan yang ditangkap Belanda, terutama

di Kandangan, Amuntai, Barabai, antara lain: Guru Ibas, Guru Dahri, Baseri (Hasnan Basuki), Syamsi Rais, Muhammad Rafa'ie, Lukman. Di Amuntai antara lain: A. Hamidhan, H. Morgan. Di Barabai-Birayang: Hadisaputera, Nawawi, Darmansyah dan H. Harun.

Di antara mereka ada yang terkurung hanya beberapa hari, tapi ada juga yang bulanan, barulah dibebaskan oleh Belanda. Ada juga diantaranya yang disiksa oleh Polisi Kilat Belanda. Sampai bulan Desember 1945, penangkapan serupa masih dilakukan oleh Belanda.

Dalam tahun 1946 pemuda Ahmad Basuni dan Asyikin Zuhri melarikan diri ke Jawa memasuki Yogyakarta. Keduanya bergabung dengan Ikatan Pemuda Kalimantan (kemudian ganti nama dengan Ikatan Perjuangan Kalimantan) singkatannya tetap IPK. Pimpinan umum Haji Gusti Abdul Muis.

Masuk tahun 1946, aku tidak lepas intaian Belanda. Ketika aku sebagai pimpinan rumah yatim piatu Hulu Sungai di Kandangan, ditangkap lagi. Tapi hanya terbatas sebagai hukum *huisarrist* (tahanan rumah), tidak boleh keluar.

Baik juga dicatat di sini bahwa sewaktu di rumah yatim piatu, kami mengadakan aksi untuk menyambut kedatangan A.M. Sangadji yang diberitakan datang dari Samarinda. Beliau termasuk salah seorang pemimpin kebangsaan yang tujuan dan azasnya mencapai Indonesia Merdeka. Kawan-kawannya ialah: Rumabi, Muhammad Arsyad, Khalidi dan lainnya (semua 7 orang). A.M. Sangadji memang tiba di Kalimantan Selatan, namun sampai di daerah Marabahan, ia ditangkap Belanda dan dijebloskan ke penjara Banjarmasin.

Panitia pemeliharaan anak yatim piatu Hulu Sungai ganti pengurus, aku berhenti. Cari pekerjaan di

Banjarmasin. Di Banjarmasin luntang lantung, sodor kerja ke sana kemari numpang tidur dan makan. Sese kali ada kalanya tidak makan apa-apa.

C. WARTAWAN REPUBLIKEN

Tahun 1946 adalah tahun tersulit bagi para pejuang kemerdekaan karena kuatnya tekanan Belanda. Kondisi ekonomi juga sulit bagi orang-orang kota dan desa kecuali bagi kaum buruh, pegawai negeri dan kaum pedagang. Mereka terhindar dari sengsara hidup, namun kondisi itu membutuhkan politik, sosial ekonomi, dan tidak peduli terhadap nasib Indonesia merdeka. Mereka bernaung di bawah bendera Belanda si Tiga Warna. Merah-Putih-Biru, yang pernah menjajahnya hampir “tiga setengah abad”.

Tahun 1947 aku kembali bekerja sebagai jurnalis, yakni sebagai pegawai surat kabar Kalimantan Berdjuang (Ka-Be) bergaji Rp 5.00. Pekerjaan itu kuperoleh berkat bantuan teman yang dahulunya sama-sama di Kandangan, yakni Zainal. Aku diberinya selebar baju yang mulai kekuningan warnanya. Senanglah hati, aku dapat makan dan minum sekadarnya.

Dalam suasana revolusi fisik di Kalimantan Selatan, selain surat kabar Kalimantan Berdjuang, terbit pula majalah dan surat kabar, antara lain: Majalah Republik, Samarata, Piala, Pedoman Puteri, Jantung Indonesia. Di Rantau majalah Pawana. Di Barabai Perjuangan Rakyat. Di Amuntai Terompet Masyarakat Baru, dan Pasifik.

Di Banjarmasin terbit: Fajar Timur, Berita Merdeka, Islam Berdjuang, majalah Tekad dan Nyata, serta majalah Remaja, dan Kenangan.

Pemerintah NICA-Belanda melalui *Regering Voorlichtingen Dienst* (RVD) daerah Kalimantan Selatan dan Timur, menerbitkan Borneo Post. Sahabatnya

berbahasa Indonesia, Suara Kalimantan terbit tanggal 5 Oktober 1945. Pengurus Besar Serikat Rakyat Islam (SRI), yang pada awal berdirinya disponsori oleh seorang orientalis yang sangat fasih berbahasa Arab yakni Van der Plas juga menerbitkan Sinar Islam (SI). Di Kandangan terbit Sinar Hulu Sungai. Keempat surat kabar itu, adalah corong atau menyuarakan Pemerintah NICA sehingga seakan-akan perang menghantam koran-koran republiken.

Kalimantan Berjuang satu-satunya lawan Suara Kalimantan sesudah Ka-Be ini terbit di Banjarmasin. Hampir setiap kali terbit Suara Kalimantan dan Kalimantan Berjuang (Ka-Be) terjadi perang pena. Tajuk rencana dan pojok.

Ka-Be memuat falsafah Pancasila setiap hari pada pojok kanan atas. Diselang seling kalimat Republik Indonesia milik kita bersama. Republik Proklamasi, gayanya Abang Sikat. Sedangkan Suara Kalimantan pada setiap terbit memuat di kanan pojok atas Negara Indonesia Serikat (NIS) pasti berdiri. Kemakmuran rakyat pasti terjamin.

Hampir semua wartawan, terutama redaktur surat kabar nasional mengalami rasa ditangkap, masuk rumah penjara dan sekurang-kurangnya masuk ruang tahanan Pemerintah NICA di Banjarmasin.

A.A. Hamidhan adalah salah seorang tokoh wartawan dan pers nasional sejak terbitnya 1930 di Banjarmasin telah merasakan pahit getirnya 3 kali masuk penjara. Pertama 3 bulan di Penjara Cipinang Jakarta. Kedua 3 bulan penjara di Banjarmasin. Dan 3 bulan lagi mendekam di penjara terkumpul dengan bubuhan “maling-maling”, ujar Hamidhan.

Sudah pula kuketahui bahwa Zafry Zamzam ditangkap lagi tahun 1946. Majalahnya yang terbit tanggal 17 Agustus 1946 terpaksa terhenti sementara, kemudian dilanjutkan

sesudah Zafry Zamzam bebas. Tahun 1948 dia ditangkap lagi. Tahun 1946 kami berdua dengan Amin Itut sempat meneruskan penerbitan Majalah Republik. Tapi kekurangan kertas dan tinta cetak stensilan. Itulah sebabnya aku harus meninggalkan Kandangan dan bermukim di Banjarmasin sambil mengikuti gerakan rahasia bawah tanah.

Di surat kabar Kalimantan Berdjung kerjaku dianggap baik. Begitu juga mengurus pemasangan iklan (*advertensi*) bahkan sekaligus membuat berita-berita, puisi, cerita pendek, sejarah dan kebudayaan. Kesempatan itu rupanya, pimpinan perusahaan telah menempatkan tenagaku sebagai staf Redaksi dan Administrasi.

Aku pencari berita, juga pencari iklan, demikian pemasukan keuangan perusahaan untuk mencukupi keperluan belanja surat kabar dan gaji beberapa orang wartawan dan penyusun huruf cetakan (*letterzitter*). Gaji sudah naik sampai Rp 17.50 (Tujuh belas rupiah lima puluh sen). Kerjaku merangkap jadi Koresponden Harian Umum Surabaya yang terbit di Surabaya. Rata-rata penghasilan mencapai Rp 50.00 (Lima puluh rupiah). Hidup pun lumayan dan gembira. Pakaian dapat berganti, mempunyai jam tangan, pulpen Parker (mahal waktu itu). Banyak sahabat dan kenalan, di perusahaan dan instansi pemerintah. Demikianlah. Kian tahun kian marak hidupku.

D. STAF RAHASIA ALRI DIVISI IV

Organisasi Rahasia Gerakan Bawah Tanah (*undergroundactie*) sejak tahun pertama Republik Indonesia (Agustus 1945) sudah berdiri di Kalimantan Selatan. Tanggal 12 September 1945 berdiri Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GEPERINDO). Menyusul pula Gerakan Rakyat Merdeka Republik Indonesia (GERMERI) pimpinan Basri (Hasnan Basuki) dan Salman (Surya). Tahun

1946 GEPERINDO bergabung dengan GERMERI, sehingga namanya pun diganti dengan satu gerakan bersama, yaitu: Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia atau nama singkatannya GERMERI. Pimpinan Hasnan Basuki dan kawan-kawan.

Sesudah itu muncul gerakan rahasia lainnya, tetapi merupakan gerakan kelaskaran Indonesia. Laskar Syaifullah, Banteng Indonesia, Badan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan, Gerakan Rakyat Pembela Indonesia Merdeka (GERPINDOM). Ada pula Mandau Telabang Kalimantan Indonesia (MTKI) yang pusatnya berada Yogyakarta di bawah komando Gubernur Provinsi Kalimantan Ir. Pangeran Muhammad Noor, sehingga terkenal dengan nama MN-1001/MTKI. Masih ada lagi gerakan rahasia lainnya di pedalaman Kalimantan khususnya di Kalimantan Selatan.

Kongres Pemuda Indonesia Kalimantan di Kandangan dalam tanggal 17 Maret 1947 selama dua hari berturut-turut melahirkan dan mencetuskan keputusan utama, yakni membentuk organisasi gabungan pemuda se-Kalimantan dengan nama Gabungan Pemuda Indonesia Kalimantan disingkat GAPIKA. Kedudukan pengurus pusat di Kandangan. Ketua Umum, Haji Muhammad Roosli, Sekretaris Umum, Fakhruddin Mohani, sedangkan di Banjarmasin lahir gabungan Putera-Puteri Indonesia, disingkat GAPPIKA. Ketua Umum, Fakhruddin Mohani. Sekretaris Umum, Mardanes. Kedudukan pimpinan pusat di Banjarmasin.

Di Balikpapan dan Samarinda lahir Front Nasional Indonesia, disingkat FONI. Ketua Umum Ajimuddin dan Mas Sarman. Di Pontianak lahir organisasi Gabungan Pemuda Indonesia Kalimantan, Pimpinan Umum dr. Sudarso.

Di hampir seluruh kota di Kalimantan berdiri organisasi perjuangan. Yang di kota dan yang bersembunyi di pedalaman. Organisasi-organisasi itulah yang kemudian menyatukan badannya ke dalam gerakan kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Markas Pusat Pertahanan (MPK) di Kandangan (tempat terahasia). Aku juga ikut ambil bagian dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan sebagai anggota staf rahasia Departemen Penerangan/Kuangan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Surat keanggotaanku ditandatangani oleh Pimpinan Umum ALRI Divisi IV Hassan Basry dan Asli Zuhry.

Seluruh gerakan organisasi kelaskaran dalam perjuangannya melakukan aksi-aksi pertempuran dengan cara gerilya: maju, mundur, sanggul, serang. Tindakan-tindakannya pada umumnya di waktu malam.

Mereka membuat senjata sendiri. Tempat pembuatannya antara lain di Negara, Kandangan, dan Balimau (Tanjung Balai). Ada senjata api yang terkenal dan dipegang oleh gerilyawan, yaitu senjata meriam dumdum.

Senjata api seperti pistol (*revolver*), senapan (*sanapang*), granat, *sten gun*, dan lain-lain, sebagiannya didapat dari hasil penyanggulan. Lainnya lagi bantuan gelap yang diberikan oleh Kompi X, diselundupkan dari Yogyakarta, atau oleh beberapa serdadu yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

Jabatan pimpinan perjuangan ALRI Divisi IV disebut Pimpinan Umum (PU) adalah Hassan Basry. Nama samaran Hassan Basry sejak dia sebagai penyair/pengarang: Hiba Budi. Nama ayahnya Asmail. Ibu tirinya Inur (kemudian, Hajjah Inur). Ia pernah bekerja sebagai Guru bantu pada sekolah *Gouvernement Meisjes Vervolg School*, Kandangan.

E. PROKLAMASI 17 MEI Th. V REP

Memasuki tahun 1948 perjuangan gerilya mulai menampakkan hasilnya. Hassan Basry selaku pimpinan umum semakin berhasil melakukan konsolidasi kekuatan, sehingga daya tempur ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan semakin menguat dan berhasil menyerang kedudukan NICA.

Tahun 1949, kekuasaan teritorial ALRI Divisi IV bertambah luas. Keberhasilan tersebut seiring dengan keberhasilan usaha-usaha konsolidasi dan kemenangan di berbagai pertempuran.

Akibat adanya tekanan dari pihak gerilyawan, maka NICA mulai menarik pos-pos militernya yang terpencil dan memusatkan kekuatan di kota-kota dengan tujuan mempermudah komunikasi dan memperpendek jarak pengangkutan kebutuhan peralatan.

Adanya keberhasilan pada gerilyawan dalam menekan NICA, telah menjadi pendorong munculnya Proklamasi Pembentukan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI pada tanggal 17 Mei 1949. Pembentukan itu juga sebagai jawaban terhadap Persetujuan Linggajati, dan untuk mengisi vakumnya pemerintahan sipil di daerah-daerah yang ditinggalkan NICA. Hal yang lebih penting lagi adalah agar keberadaan, kekuatan, dan kemampuan ALRI Divisi IV diakui, serta Kalimantan Selatan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia.

Berkaitan dengan Proklamasi 17 Mei 1949, A.H. Buddigawis dan Abdurrahman Karim (A.R. Haka), dua orang yang termasuk dalam pimpinan departemen dalam Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI, dalam memoarnya mengemukakan, bahwa dasar pemikiran dicetuskannya Proklamasi Pembentukan Pemerintahan Gubernur Tentara

ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949, adalah sebagai berikut: (1) Untuk menyatakan kepada masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia serta Dunia, bahwa gerilya kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang berada di belakang tirai besi Belanda benar-benar ada dan mempunyai kekuatan dan kemampuan yang cukup tangguh untuk membela dan mempertahankan Pemerintahan Republik Indonesia; (2) Menyatukan semua organisasi dan pimpinannya ke dalam satu pimpinan yang berbentuk Pemerintahan Gubernur Tentara; (3) Mempersiapkan Daerah Kalimantan untuk dijadikan kedudukan Pemerintahan Pusat Republik Indonesia jika Pemerintahan Pelarian yang direncanakan di New Delhi India gagal, sebagai kelanjutan perjuangan mempertahankan kemerdekaan; (4) Mempersatukan seluruh tenaga pejuang dan rakyat Kalimantan ini untuk merubah struktur perekonomian kolonial dengan membangun perekonomian nasional; (5) Kenyataan vakumnya pemerintahan karena ditariknya aparatur Pemerintahan Belanda di tiap-tiap onderdistrik, sehingga rakyat benar-benar tidak mempunyai pemerintahan

Begitulah dasar pemikiran para pimpinan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang lahir sebagai hasil dari pergulatan pemikiran untuk kemajuan perjuangan.

Naskah proklamasi dihasilkan setelah melalui serangkaian rapat atau musyawarah di antaranya di Durian Rabung; Padang Batung, Ambutun, dan terakhir di Telaga Langsat (Ambarawa) tanggal 15-16 Mei 1949 dihadiri oleh H. Aberanie Sulaiman, Gusti Aman, Budhigawis, P.Arya Maxim Le Miaty (P. Arya-Munir), Hasnan Basuki dan Romansi, dan dijaga ketat oleh pasukan Setia Budi dan Ibnu Hadjar. Gusti Aman mengusulkan perlunya pembentukan

pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV melalui sebuah Proklamasi yang kemudian disetujui bersama.

Teks proklamasi, menurut yang tersiar di Pasar Kandangan, berbunyi sebagai berikut:

PROKLAMASI

Merdeka!

Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinja Pemerintah Gubernur Tentara dari "A.L.R.I" melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan mendjadi bagian dari Republik Indonesia, memenuhi Proklamasi 17 Agustus 1945 jang ditandatangani oleh Pres. Soekarno dan Wakil Pres. M. Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperdjuangkan sampai tetesan darah jang penghabisan.

*Tetap Merdeka
Kandangan, 17 Mei Th. IV Rep.
Atas nama Rakyat Indonesia
Di Kalimantan Selatan
Gubernur Tentara,*

Hassan Basry

Dua hari sesudah beredar proklamasi Gubernur Tentara, yang tersiar pada harian nasional Kalimantan

Berdjuang di Banjarmasin, ada lagi proklamasi yang beredar di Kalimantan dan tersebar sampai daerah lainnya.

Dilihat dari isinya, teks proklamasi yang dikeluarkan dua hari sesudah tanggal 17 Mei 1949, sama dengan yang dikeluarkan dua hari sebelumnya. Tetapi isinya tertulis “melingkungi Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia.”⁶ Pada bagian bawah di tulis: Kandangan, 17 Mei 1949. Atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Pertahanan Kalimantan. Gubernur tentara Hassan Basry.

Naskah proklamasi diperbanyak, dan menurut P. Arya sebagian diserahkan kepada Tarzan. Proklamasi itu kemudian ditempatkan di pasar Kandangan.

Proklamasi 17 Mei Th.IV Rep. itu ditempel di tiang telepon pasar Kandangan. Kemudian sebagai wartawan Kalimantan Berdjung, maka teks proklamasi itu kuambil, kubawa ke Banjarmasin, dan kuserahkan kepada Yusni Antemas untuk diterbitkan di surat kabar Kalimantan Berdjung. Dua hari kemudian terbitlah naskah proklamasi 17 Mei Th. IV REP.

Aku didakwa karena telah memasukkan Proklamasi 17 Mei Th. IV Rep. Dakwaan itu kubantah demi keselamatan Kalimantan Berdjung dan kawan-kawan di pedalaman. Aku dibebaskan, tapi dengan peringatan keras (*aanmerking*).

6 Selain kesaksian Artum Artha, adanya informasi tentang proklamasi yang berisi kalimat, “melingkungi Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia” juga pernah dinyatakan oleh Anang Abdul Muin (Aam Niu) dalam tulisannya “Riwayat Singkat Proklamasi 17 Mei 1949” di Gawi Manuntung, Jumat 18 Mei 1979 yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 1949 P. Arya mengadakan perubahan teks pada bagian bawah yang semula “Atas Nama Rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan” menjadi “Atas Nama Rakyat Indonesia di Kalimantan”. Meski demikian, jika pernyataan Artum Artha dan Aam Niu itu benar, maka naskah proklamasi itu dapat dipandang sebagai “proklamasi susulan” bukan proklamasi yang dicetuskan pada tanggal 17 Mei 1949.

Menurut Aidan Sinaga ketua SKI Banjarmasin, ketika perundingan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda, lembar proklamasi Kalimantan Berdjuang itu dijadikan dokumen politik yang tajam dan berbentuk hukum sebagai ciri: “de Jure dan de Facto” dari ALRI Kalimantan.

F. MASALAH MUSIM HAJI TAHUN 1949

Pada zaman pers perjuangan atau pers kemerdekaan masih terdapat “kaum spion walanda” (ucap orang Kandangan), maka dalam musim Haji tahun 1949, saat berdiri Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hassan Basry, juga terdapat spion alias mata-mata Belanda. Kalau dalam istilah aktivis organisasi Parindra dahulu, disebut *cacunguk* (sekali-kali disebut *timpakul*).

Atas instruksi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahan Kalimantan, P.Arya (Sutan Abdul Munir) selaku Komandan Markas Daerah Selatan yang mengepalai daerah Banjarmasin mengeluarkan pengumuman yang diketik di atas kertas tua warna sedikit kelabu, ukuran separo kertas HVS, yang bunyinya sebagai berikut:

“Diumumkan kepada semua umat Islam di seluruh daerah Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Pertahanan Kalimantan, agar supaya dalam “MUSIM HAJI TAHUN 1949 INI”, tidak menjalankan ibadah haji sebagaimana biasa. Tanah air kita dalam keadaan darurat. Hendaknya para alim-ulama umat Islam di Kalimantan, memaklumi adanya. Sekian pengumuman ini, agar dipatuhi !

Banjarmasin, 1949

Kepala Daerah Banjarmasin,

P. Arya

Untuk mengetahui kebenaran pengumuman yang ditempelkan pada sebuah tiang telepon di Jalan Kertak Baru Banjarmasin, aku selaku wartawan Kalimantan Berdjuang mencoba menemui P. Arya berada. Ketika tanya jawab, dikatakannya: *“Kita mencoba dan untuk mengetahui sampai dimana dan bagaimana kesetiaan bangsa Indonesia khususnya umat Islam terhadap pemerintahan RI”*. Ternyata berhasil, di Banjarmasin, hanya ada satu orang yang berani berangkat haji, yakni orang Sungai Mesa, pegawai kantor Bea dan Cukai.

Menurut P. Arya di Hulu Sungai juga ada yang pergi haji ke Tanah suci, keduanya tidak berarti bagi kita RI. Begitu juga tentang perintah ALRI agar melakukan pemogokan kaum pegawai negeri dan kaum buruh, di kantor Residen hanya 1 orang yang turun kerja, di Kandungan (pegawai kantor kontelir), juga 1 orang.

Aksi pemogokan di Hulu Sungai terutama di Kandungan atas prakarsa Kiai Abdul Wahab Syahrane. Waktu itu dia sudah berada di pedalaman jadi pembantu Hassan Basry untuk urusan khusus teknik administrasi tata praja pemerintahan.

Kaum pegawai negeri sipil dan kepolisian mengalami kesulitan. Mereka harus memilih, antara pro Republik atau kontra Belanda. Mereka masih mengandalkan nasibnya pada ukuran penghasilan gaji tiap bulan. Apalagi Belanda pernah memberikan tunjangan berlaku surut selama pendudukan Jepang. Mereka waktu itu bagaikan orang kaya baru, sebab uang yang diterima cukup untuk belanja setahun

atau dua tahun. Bahagia perasaannya, tetapi kesandung tekanan orang pedalaman (gerilyawan). Salah-salah *pandir* dan akan bernasib malang. Balasannya, culik.

Pada pertengahan tahun 1949, pemerintahan Gubernur Tentara ALRI benar-benar lebih berkuasa dibanding pemerintah NICA. Pihak Belanda terpaksa meminta bantuan pihak Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Yogyakarta dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCI) untuk dapat berunding dengan Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI.

Sebagai titik puncak perjuangan gerilya, pada tanggal 2 September 1949 dilaksanakanlah perundingan/pertemuan di Munggu Raya, Kandangan. Di tempat inilah dikeluarkan perintah Jenderal Mayor Suhardjo selaku wakil pihak Republik Indonesia untuk penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata, antara pihak ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dan NICA-Belanda. Saksi gencatan itu ialah KTN – UNCI.

Dengan tercapainya persetujuan gencatan senjata kedua belah pihak, semua pasukan gerilya yang ada di pedalaman Kalimantan keluar dan bangkit memasuki kota-kota. Pada bulan November mereka berkumpul di Kandangan untuk menerima pengesahan ALRI Divisi IV menjadi Divisi Lambung Mangkurat. Hassan Basry dalam laporannya menyatakan bahwa anggota ALRI yang terdaftar 33.000 orang se-Kalimantan.

G. MENYAMPAIKAN MOSI KE YOGYAKARTA

Sesudah selesainya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda, wilayah-wilayah yang diduduki Belanda jadi wilayah pemerintahan federal. Kecuali daerah-daerah seperti Yogyakarta dan lainnya, tetap wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (RI sesuai dengan keputusan KMB tanggal 27 Desember 1949.

Dalam konferensi tersebut, daerah Banjar diwakili dua orang utusan yaitu Aidan Sinaga dan Anang Abdul Rivai. Mereka anggota pengurus besar Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Banjarmasin. Dari Kalimantan Tengah Muhammad Mokhran. Utusan tersebut dimasukkan dalam kelompok BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang dipimpin Anak Agung Gde Agung dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

Pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno, menyatakan sebagai berikut:

“Hari ini hari keramat bangsa Indonesia, memperingati hari nasionalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hari ini yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia, kita peringati dengan jiwa besar dan dengan semangat kebangsaan Indonesia. Maka oleh sebab itu, saya Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS), menyatakan dengan resmi, sejak tanggal 17 Agustus 1950 seluruh kepulauan wilayah nusantara Indonesia, kita kembali ke dalam Negara Kesatuan republik Indonesia. Agar supaya segala sesuatu harus diselesaikan dengan cara seksama dan dengan sebaik-baiknya”.

Menyusul pidato presiden, maka dengan serentak di seluruh pelosok tanah air Indonesia sang merah putih berkibar-kibar.

Sesuai KMB, Kalimantan termasuk wilayah daerah pemerintahan federal RIS. Untuk memasukkan Kalimantan ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta, maka partai-partai politik dan semua organisasi, baik nasional maupun aliran Islam dan Kristen serta agama lainnya, saling mengadakan rapat dan mengeluarkan mosi agar Kalimantan secepatnya masuk wilayah RI Yogya (istilah waktu itu).

Di Banjarmasin dikeluarkan pengumuman pada tanggal 13 Maret 1950 dan ditandatangani oleh (1) Fd. Residen Kalimantan Selatan Muhammad Hanafiah; (2) Wakil daerah Banjar Aidan Sinaga; (3) Ketua Dewan Dayak Besar Mahir Mahar; (4) Anggota Pengurus Harian Kalimantan Tenggara M. Syahdan, dan lain-lainnya.

Ada lagi mosi, dikeluarkan di Martapura tanggal 27 Januari 1950. Atas nama pengurus Pedoman cabang SKI Martapura, Basyuni.

Mosi rakyat Puruk Cahu, tanggal 1 Maret 1950. Bertindak atas nama penduduk Distrik Hulu Wakil Rakyat Usman Temenggung Silam.

Resolusi Rakyat Kuala Kapuas. Isinya antara lain: (1) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Menuntut dengan segera Irian masuk Republik Indonesia. Resolusi ini disampaikan kepada: Dewan Dayak Besar, Wakil Residen Kalimantan Selatan, Presiden RIS, Acting Presiden RI, Kementerian dalam Negeri RI, Kementerian Penerangan RI dan Pers.

Pada tanggal 28 April 1950 rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mengadakan rapat raksasa di lapangan Merdeka Banjarmasin. Panitia terdiri dari kalangan pemuda.

Ketua Masdari, aku (M.Ch. Artum) sebagai sekretarisnya, Keuangan Muhammad Hasan dan beberapa anggota lainnya. Rapat raksasa itu memutuskan bahwa: Kalimantan Selatan (termasuk daerah Dayak Besar) harus sesegeranya masuk wilayah Republik Indonesia-Yogya.

Bertindak atas nama rakyat, ketua Masdari, penulis M.Ch. Artum, kami mengeluarkan butir-butir mosi, sebagai berikut:

Memutuskan :

Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat, memenuhi tuntutan rakyat dengan melaksanakan penggabungan Kalimantan ke dalam Republik Indonesia, dan tidak usah membuang-buang perongkosan yang sangat diperlukan buat pembangunan.

Menuntut agar pemerintah Republik Indonesia dan RIS memenuhi secepat-cepatnya hasrat rakyat serta mengakuinya sebagai pernyataan tetap buat penggabungan, hasrat mana telah dibuktikan baik

luar maupun di dalam badan-badan resmi, untuk mana bisa dipakai Undang-Undang Darurat Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 22 ayat 1;

Menuntut pembubaran Dewan-dewan Daerah sekarang juga, karena Dewan-dewan tersebut tidak dapat diterima oleh rakyat.

*Banjarmasin, 19 Maret 1950
Atas nama Rakyat tersebut,*

*Ketua,
Masdari*

*Penulis,
M. Ch. Artum*

Resolusi rakyat Kalimantan tersebut di atas oleh tiga orang utusan Kalimantan, Hadhariyah M. (Ketua), M. Ch. Artum (Penulis) dan Uguk (anggota) dibawa ke Yogyakarta.

Di Yogyakarta, waktu bulan Maret terlalu sibuk oleh suasana politik dan riuh gembiranya penduduk. Namun ketika itu kota Yogyakarta masih dipenuhi oleh kotoran dan aneka bau, terutama sisa-sisa bau andung yang ditarik kuda. Jalan Malioboro, merupakan jalan besar dan panjang, yang sungguh padat oleh manusia dan kendaraan umum. Bendera merah-putih berkibar di segenap penjuru.

Karena guru Uguk harus menghadiri Kongres Parindra ke II di gedung Merdeka, kami tinggal berdua. Untuk menyampaikan resolusi kepada Pemangku Presiden RI dan Presiden RIS sudah tidak mungkin. Satu-satu cara yang praktis harus disampaikan kepada Menteri Sosial RI Mr. Tambunan. Dia menunggu kami.

Kami ikut sertakan Ahmad Basuni, sebagai anggota Delegasi rakyat Kalimantan, karena bagaimanapun dia memang orang Banjar. Dia, yang pada tanggal 12 September 1945 bersama diriku, membacakan Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, di acara Pasar Malam Kemerdekaan di alun-alun kota Kandangan.

Dalam tempo yang pendek sekali resolusi disampaikan setangan melalui Mr. Tambunan, untuk disampaikan kepada Presiden RI dan Presiden RIS (Yogyakarta dan Jakarta). Begitulah sekitar berita penyampaian resolusi.

Berdasar Undang-undang Darurat 1950 Pasal 7 ayat 3 dan Pasal 22 ayat 1, maka seluruh wilayah RI yang terpecah-pecah dan bagian-bagiannya yang sebelumnya menjadi wilayah RIS, praktis kembali ke wilayah kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian UUD 1945 berlaku kembali sebagaimana biasa sebagaimana maksud Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kembalinya Kalimantan ke dalam pangkuan NKRI, tidak hanya diperankan oleh para gerilyawan melalui perjuangan bersenjata, melainkan juga oleh kaum partai politik atau para politisi dengan mempertaruhkan jiwa raga dan harta bendanya.

Sejak tanggal hari bulan 17 Agustus 1950 tegak kembali pemerintah Republik Indonesia.

Sekali Merdeka! Tetap merdeka!

BAB V

DI ALAM KEMERDEKAAN

A. BERTEMU JODOH

Selesai kami menyampaikan mosi di Yogyakarta, aku masih bertahan di kota itu. Beberapa hari aku tinggal di Asrama Jenderal Sudirman, sesekali aku tidur di rumah Ahmad Basuni di Tegal Panggang. Aku ingin bekerja di surat kabar Kedaulatan Rakyat, tapi terhalang.

Suatu hari datang telegram dari Banjarmasin, menyatakan bapakku Abubakar sakit. Segeralah pulang, begitulah isinya. Ternyata beliau tetap sehat segar bugar. Di balik layar telegram tersebut ternyata induk semangku Aluh Nolam bermaksud untuk mengawinkanku. Aku punya harapan kepada tiga orang pelajar SMIP. Namun ketiganya ditolak. Jadi belum gilirannya barangkali untuk hidupku.

Pada malam Senin bulan Rajab, langit dan bulan samar terang dikelilingi oleh bintang-bintang, semuanya memberi cahaya, seolah-olah cahaya indah itu turun perlahan dari langit.

Induk semangku mengundang beberapa orang wanita: yang perawan, yang janda, dan yang bersuami. Tiga dari yang perawan itu semuanya pelajar Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) dan seorang lagi, entah dia keluarga induk semangku. Tapi dia pun pelajar SMIP. Pertemuan dalam rangka “Pertemuan Malam Tadarus Quran”

Di bulan Rajab, adalah bulan Isra dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Malam Senin hidup 14 Rajab itu, benar-benar terang bulan, penuh cahaya, karunia, hikmah dan nikmat.

Betulkah “jodoh di tangan Tuhan?” Aku bertanya.

Jawab hatiku sendiri. “benar”.

Seorang gadis perawan yang kupilih di antara yang empat, sesuai tunjukan Aluh Nilam, kuterima dengan senang hati. Ia bernama Saniah, kelahiran Negara, 9 April 1932. Lamaran pun diterima oleh kedua ibu bapaknya. Tinggal mengantar jujuran, berarti bertunangan. Uang yang dikumpulkan adalah Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah). Namun, nasib masih berada di bawah. Tiba-tiba saja datang Gunting Syafruddin (Menteri Keuangan RI). Uang kertas Rp 5,00 harus potong dua (tersisa seringgit atau dua rupiah lima puluh sen). Duit yang Rp 75,00 hanya tersisa separo. Sepertinya, tak jadi kawin, duit *kada* cukup. Tapi dinyatakan “harus segera antar jujuran dan sekaligus nikah malam Senin”. Penghulunya Haji Ahmad Abdul Hamid, yang mengantar kawan-kawan wartawan: Abdul Jabar, Haspan Hadna, Zainal dan lainnya. Jujuran Rp 75,00 tunai. Aku sudah dinikahkan. Alhamdulillah. Tibalah masa hari kawin, menjelang bulan puasa Ramadhan. Waktu itu bulan Juni 1950.

B. BERTUGAS DI BALIKPAPAN

Tiga bulan sesudah menikah aku harus berangkat ke Balikpapan untuk menerbitkan surat kabar TUGAS. Aku membawa surat-surat perintah dari Gubernur Kalimantan dr. Murdjani dan surat perintah Kepala Staf Territorium VI–Tanjung Pura. Tugas perintah: pertama, menyelidiki gerakan APRA. Tugas kedua menyelidiki/gerakan pasukan eks KNIL di Balikpapan. Berat sekali tugas yang diemban tahun 1950.

Suratkabar TUGAS terbit di Balikpapan. Hubunganku dengan instansi-instansi di kota Balikpapan berjalan baik termasuk hubungan dengan maskapai minyak BPM. Tinggal

di Jalan Riku 12. Kantor di Jalan Kelandasan. Rumah, kantor, telepon, lampu listrik dan air minum, bebas bayaran (gratis). Hidup terasa enak di Balikpapan. Ketika itu aku sempat melakukan ibadah, yaitu meng-Islam-kan tiga orang gadis perawan asal Manado. Alhamdulillah.

Karena aku berjanji dengan mertua: Muhammad Idham Saleh Masdut, aku harus kembali ke Banjarmasin dan menjemput isteri. Maka kembalilah aku ke Banjarmasin menjemput isteri. Naik pesawat pertama kali bersama isteri.

Tinggal di Balikpapan, memang sibuk pekerjaanku sebab mengemban tugas berat, menyelidiki APRA dan eks KNIL. Di antara eks KNIL yang dinasionalisasi menjadi TNI AD itu masih ada saja yang berjiwa serdadu KNIL. Ia kebanyakan pongah.

Hampir tiap sore aku ke asrama di sebuah bukit. Tapi aku main badminton untuk menghilangkan jejak langkahku sebagai petugas pemerintah RI–Kalimantan (Gubernur dan Kepala Staf Territorium VI Tanjung Pura). Hampir magrib, biasanya barulah tiba di rumah. Isteri gelisah, takut di rumah. Tidak jarang kesibukanku harus menghadiri malam-malam resepsi, timbang terima serah jabatan di sana sini. Tiga bulan setelah harian TUGAS terbit, aku ditawarkan pekerjaan yang baik: Employe Klas II untuk BPM Balikpapan. Tawaran itu kutolak dengan hormat.

Sampai waktunya yang tidak disangka, isteri minta segera pulang ke Banjarmasin. Balikpapan dilepaskan dengan bagian rejeki yang masih ada.

Tahun 1952 bekerja pada surat kabar “Indonesia Merdeka”. Rumah menyewa sepuluh rupiah. Gaji dua belas rupiah lima puluh sen sebulan ditambah tunjangan dari Radio Republik Indonesia (RRI) sebulan (sebagai penyiar Ruang Sastra dan Budaya) sebesar Rp 20,00 Ada lagi hasil

lain tunjangan sebagai koresponden Harian Umum Surabaya, rata-rata per bulan Rp 25,00. Lumayan.

C. ORGANISASI PERINTIS KEMERDEKAAN

Sejak tahun 1950-an Departemen Sosial melakukan pendataan para mantan pejuang pergerakan untuk mendapat pengakuan sebagai perintis kemerdekaan dari pemerintah Pusat.

Kepada mantan aktivis pergerakan kebangsaan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Kalimantan Selatan, diminta untuk menuliskan riwayat hidupnya dengan saksi-saksi dan pengajuan usul itu disampaikan melalui perkumpulan.

Untuk mewadahi mantan pejuang pergerakan dan untuk kepentingan pengusulan ke Jakarta, maka di Kalimantan Selatan pada tahun 1960 dibentuk organisasi Persatuan Perintis Kemerdekaan, dengan Ketua Asnawi Rais dan aku (Artum Artha) sebagai Sekretaris.

Kemudian pada tahun 1961 didirikan pula organisasi Angkatan 45 Kalimantan Selatan (DHD Angkatan 45) dengan Ketua Umum H. Aberanie Sulaiman, dan Sekretaris Artum Artha.

Setelah kedua organisasi dibentuk, maka banyak usulan perintis kemerdekaan yang dapat disampaikan ke Jakarta sehingga beberapa nama diakui Pemerintah Pusat sebagai pejuang perintis kemerdekaan. Mereka yang telah mendapatkan pengakuan sebagai perintis itu sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, yakni H. Abdul Murad bin H. Anang, H. Iskandar bin H. Achmad, H. A. Barmawi bin Thalib, Machlan Sahari, H. Djahrani bin H. Husin, Indut H. Karim, H. Mursidi bin H. Asnawi, Saberi bin Marthina, Sutera Ali Dulah, Abdullah bin Djaga, Bahtiar bin Usman, H. Busra bin H. Andin Ahmad, Kari bin H. Husin, Maslan

Karim, Asad bin Abang, Idit bin Adil, H. Maserah bin H. Sahir, Hamzah bin Tuganal, Mukeri Didit, Akis M, G. Obus, H. Mohamad Zaini, H. Achmad Darmawie, Gusti Djateran bin Gusti Rusmansyah, H. Moh. Tarjali, Darman bin Berahim, Darman bin Tambal, Ideham bin H. Nafiah, Kaseri bin Dulasan, H. Irham bin H. Mathalib, Masrawan bin Moh. Syafii, Ny. Fatimah, M. Nawawie Arif. Sedangkan Hadharyah M, mendapat pengakuan sebagai perintis melalui Provinsi Kalimantan Barat.

Meski diriku adalah salah seorang yang membidani terbentuknya organisasi Persatuan Perintis Kemerdekaan, dan aktif dalam pergerakan kemerdekaan, namun ternyata nasib baik tidak berpihak pada diriku untuk mendapat pengakuan sebagai pejuang perintis kemerdekaan.

Mengenai hal itu, aku telah berulang kali mengajukan surat usulan pengakuan Perintis Kemerdekaan, bahkan dengan rekomendasi Ketua PPK Kalimantan Selatan (Ketua: Hadharyah M, dan Sekretaris H. Ahmad Darmawi) disertai Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Namun, tetap saja tidak mendapat persetujuan dari Depsos RI. Sementara itu, ada pengakuan terhadap seseorang, meskipun dia pernah bekerjasama dengan NICA-Belanda tahun 1948-1950, dan ada pula pengakuan terhadap seseorang meskipun usianya masih muda. Tahun 1939 masih duduk di Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar) di Barabai. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi, padahal salah satu prinsip seorang pejuang perintis kemerdekaan adalah tidak pernah bekerjasama dengan pemerintah pendudukan (NICA-Belanda).

Di Kalimantan Selatan memang terdapat banyak pejuang perintis kemerdekaan dengan intensitas peranan yang besar maupun kecil, namun banyak pula yang bernasib sama dengan diriku, yakni ditolak Departemen Sosial RI

sebagai Perintis Kemerdekaan. Di antara mereka, misalnya H. Amir, H. Morhan, dan Abdulhamidhan, ketiganya tokoh Parindra cabang Amuntai yang dijatuhi hukuman penjara dan kerja paksa di Penjara Ampah dan Sukamiskin, Jawa Barat, serta H. Ali Baderun ketua Parindra cabang Barabai yang dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, disertai pencabutan jabatan dan pemberhentian dirinya sebagai pegawai negeri sipil.

D. KETUA DPRD, KETUA PWI, DAN PIMPINAN MUSEUM

Tahun demi tahun sang waktu bergulir terus tak kenal rintangan apa jua pun. Tahun 1954 aku melibatkan diri dalam organisasi keagamaan yakni terpilih sebagai Sekretaris Partai Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Pemilihan suara aklamasi waktu itu menandakan satu kepercayaan luar biasa. Sebab tidak dilakukan kampanye “pilihlah aku”. Tidak ada.

Pertengahan tahun 1954, aku memasuki dunia politik praktis, karena saat itu aku dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Banjarmasin. Selanjutnya tahun 1957 terpilih lagi menggantikan para anggota DPRD (lama) sebagai hasil Pemilihan Umum 1955. Aku menjadi Ketua DPRD Kotapraja Banjarmasin yang pertama hasil Pemilu yang diemban sampai tahun 1961. Gaji terakhir Rp 1.750 (Seribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Lumayan.

Banyak kegiatan yang kulakukan selaku Ketua DPRD, menyuarakan aspirasi, memimpin sidang, menghadiri pertemuan atau undangan dari pihak Pemerintah Daerah.

Aku ikut mendorong pembangunan Jembatan 9 November (dahulu jembatan Empat Zaman) yang menghubungkan Pasar Lama dengan kampung Seberang

Masjid. Untuk pertama kali biaya pembangunannya disediakan oleh Ir. Pangeran Mohammad Noor yang saat itu menjabat sebagai Menteri PUTL. Untuk mengurus biaya tersebut, maka pada tanggal 9 November 1959 aku selaku ketua DPRD Kotapraja Banjarmasin bersama Burhan Afghanie menemui Menteri PUTL (Ir. Pangeran Mohammad Noor) di rumahnya di Kebayoran Baru. Anggaran biaya pembangunan jembatan itu di tahun 1958 sebesar Rp 7.500.000.

Selepas jabatan Ketua DPRD, beberapa waktu kemudian aku dipercaya sebagai Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) cabang Kalimantan Selatan. Jabatan sebagai Ketua PWI ini kulakoni sejak 1961 dan berakhir tahun 1963 di saat mana keadaan sosial, ekonomi dan politik di tingkat pusat maupun daerah tidak stabil karena dirongrong oleh PKI.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Ketua PWI, maka Gubernur Haji Aberanie Sulaiman memintaku supaya bekerja di Kantor Gubernur KDH Tk.I Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas pengalaman kerja dihitung mulai anggota Staf Penerangan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, Wartawan dan Ketua DPRD. Gaji/tunjangan perbulan (yang terakhir) Rp 22.750.

Setelah berhenti sebagai pegawai negeri/daerah, aku diberi jabatan sebagai Kepala Seksi Sejarah dan Kebudayaan di Kantor Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan merangkap Kepala Humas Pemda (1963-1966), dan kemudian pimpinan Museum Banjar Lambung Mangkurat sejak 1967 s.d. 1972. Tunjangan yang kuterima selaku pimpinan museum adalah Rp 22.500.

Mungkin ada yang bertanya-tanya, kapan, di mana dan bagaimana proses pendirian Museum Banjar? Sebelum kukisahkan bagaimana Museum Banjar didirikan, perlu pula

disampaikan bahwa cita-cita untuk mendirikan sudah lama dicetuskan.

Pada saat Kongres Kebudayaan bulan Juni 1957 antara lain memutuskan supaya: (1) Dilakukan penggalian sejarah dan pembinaannya; (2) Mencari dan menetapkan seorang Pahlawan Nasional yang berasal dari (putera) Kalimantan; (3) Mendirikan museum di Banjarmasin.

Kemudian Musyarawah Rukun Kampung Seberang Masjid Kotamadya Banjarmasin tahun 1967 juga telah memutuskan antara lain agar mendirikan Museum Banjar di Seberang Masjid Banjarmasin.

Dari catatan lama yang berkepal “Rencana Lima tahun Pembangunan Kota Banjarmasin” tahun 1939 yaitu usul anggota Dewan Haminte Banjarmasin (Amir Hasan Bondan) yang terdiri dari 29 pokok, antara lain juga disebutkan perlunya mendirikan sebuah museum di Banjarmasin.

Untuk merealisasikan berdirinya museum, maka pada tahun 1959 telah diajukan usul pendiriannya kepada instansi Jawatan Kebudayaan Provinsi Kalimantan (di bawah pimpinan R.R. Martakesumah dan R. Darjono), namun sampai keduanya berhenti memangku jabatan, upaya mendirikan museum belum juga terealisasi.

Dalam sejarah kehidupan museum di Banjarmasin tercatat bahwa sekitar tahun 1920 pernah berdiri sebuah museum yang letaknya di Pulau Tatas, kemudian dipindahkan ke Jalan Jawa (sekarang Jalan D.I. Panjaitan) sekitar tahun 1930. Bentuk bangunan rumah Banjar dengan nama “Borneo Museum”.

Tatkala Jepang berkuasa di Banjarmasin tahun 1942-1945, maka museum itu hancur bersama bangunannya. Koleksi museum, di antaranya diambil tentara Jepang,

penduduk, dan yang lainnya berada di Museum Nasional Jakarta.

Hingga tahun 1960-an keinginan mendirikan sebuah museum kembali diupayakan. Melalui Sekretaris Panitia Daerah Pengusul Pahlawan Antasari sebagai Pahlawan Nasional, disisipkanlah suatu badan yang bernama Badan Pelaksana Proyek Candi Agung Kalimantan Selatan (BAPELPRODA) dengan Ketua Umum H. Aberanie Sulaiman (Gubernur KDH Tk.I Provinsi Kalimantan Selatan) dan Ketua Pelaksana H. Abd. Rasjid Nazar, Sekretaris Artum Artha.

Melalui kedua badan itu, segala usaha dilakukan untuk menggali sejarah, mengusulkan Pangeran Antasari sebagai Pahlawan Nasional, dan penyimpanan dokumentasi Pangeran Antasari dan benda-benda purbakala lainnya.

Setelah kami pulang dari Jakarta dan memberikan laporan kepada Gubernur H. Aberanie Sulaiman dan anggota B.P.H. Pemerintahan, H. Abd. Rasjid Nazar, akhirnya disimpulkan bahwa kegiatan memperjuangkan Pangeran Antasari sebagai Pahlawan Nasional, kiranya sama giatnya dengan kegiatan hendak mendirikan museum.

Dalam perumusan rencana pendirian museum, maka pada saat kami di Jakarta, telah dimintakan pula bantuan tenaga sarjana yakni Drs. M. Idwar Saleh untuk turut serta membicarakan rencana itu dengan Direktur Museum Pusat Jakarta (Drs. M. Amir Sutaarga).

Hari Minggu sore tanggal 23 April 1967 rencana pendirian museum diterima baik oleh Amir Sutaarga, dengan catatan bahwa museum yang akan didirikan adalah museum lokal atau dengan kata lain seratus persen akan dibiayai oleh Pemerintah Daerah TK.I Provinsi Kalimantan Selatan.

Hari Senin, 24 April 1967 kami dengan didampingi oleh H. Ibus Nasri (anggota Parlemen), kembali menemui Drs. M. Amir Sutaarga untuk mematangkan pembicaraan dan menerima petunjuk-petunjuk yang diperlukan.

Oleh M. Amir Sutaarga kembali ditegaskan persetujuan Direktur Museum kepada kami untuk mendirikan museum lokal di Kalimantan Selatan.

Sekembalinya dari Jakarta, laporan tentang pengusulan Pangeran Antasari sebagai Pahlawan Nasional maupun rencana pendirian museum kami sampaikan kepada Gubernur secara tertulis maupun penjelasan lisan.

Beberapa kali rapat dilakukan untuk membicarakan pendirian museum. Dan untuk mewujudkannya maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Provinsi Kalimantan Selatan No. 19/I-2-301-573 tanggal 8 Mei 1967. Dalam surat keputusan itu ditetapkan bahwa terhitung mulai tanggal 3 Mei 1967 dibentuk sebuah Panitia yang selanjutnya disebut Panitia Persiapan Museum Lambung Mangkurat (Museum Lokal) dan berkedudukan di Banjarmasin.

Susunan organisasi Pengurus Harian pada panitia persiapan itu terdiri dari: Ketua Sajid Hasjim, BA (Anggota BPH Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Wakil Ketua I Drs. Suwedi Montana (Kepala Inspeksi Daerah Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan), Wakil Ketua II Kapten Sjamsuri (Pgs. Ka. Sendam X/Lambung Mangkurat), Sekretaris Artum Artha, Wakil Sekretaris Achdar Achmad (Pegawai Kantor Inspeksi Daerah Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan), Bendahara Nj. Aneta Hanafiah, Pembantu H. Muslaini Gobet (Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur itulah Panitia bekerja. Persiapan Museum Banjar di Banjarmasin yang

pertama dilakukan adalah dengan cara menyewa rumah Abd. Gafar Hanafiah di Jalan Haryono MT No. 1 Banjarmasin sebesar Rp 48.000 setahun oleh Pemda Tk. I Kalimantan Selatan. Sejak itulah museum didirikan, terhitung tanggal 3 Mei 1967 sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan.

Beberapa waktu kemudian, Museum Banjar dipindah ke Balai Wartawan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1. Tempat ini dipakai sebagai bantuan pinjaman Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banjarmasin (M. Hanafiah).

Untuk mengembangkan Museum Banjar, berbagai kegiatan pengumpulan koleksi dan penelitian dilakukan termasuk ikut melakukan kegiatan ekskavasi situs Candi Agung di Amuntai bersama para Tim Kepurbakalaan Pusat yang dipimpin oleh Drs. Uka Tjandrasasmita.

Demikianlah sekedar gambaran tentang proses pendirian Museum Banjar. Berbagai upaya dilakukan agar museum itu dapat diwujudkan, sehingga di museum itu dapat kita temui berbagai koleksi peninggalan masa lalu yang sangat berharga yang mencerminkan perjalanan daerah kita sebagai bagian dari perjalanan hidup bangsa Indonesia. Satu hal yang sangat menggembirakan kami adalah bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Gubernur sangat menghargai usaha ini dengan menjadikan Museum Banjar sebagai salah satu yang akan dibangun dan dibiayai melalui anggaran Pelita (Pembangunan Lima Tahun) daerah Kalimantan Selatan.

Selain berhasil mendirikan museum, keberhasilan yang patut disyukuri adalah dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Pangeran Antasari dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 06/tki/Tahun 1968 tanggal 27 Maret 1968.

Untuk memperjuangkan Antasari sebagai Pahlawan Nasional memang tidak mudah. Sejak tahun 1950-an, Pemerintah Daerah telah menyiapkan pengusulan itu dengan menghimpun data-data sejarah perjuangan Pangeran Antasari. Drs. M. Idwar Saleh ditugaskan untuk meneliti dan menulis sejarah perjuangan Pangeran Antasari, dan pemerintah daerah telah pula memindahkan kerangka jenazahnya yang sebelumnya berkubur di Bayan Begok, Purukcahu Kalimantan Tengah ke kompleks kubur pahlawan di Jalan Masjid Jami, Banjarmasin.

Pengalaman memperjuangkan Pangeran Antasari dijadikan pegangan untuk memperjuangkan Pangeran Hidayatullah sebagai pahlawan nasional, namun upaya itu belum membuahkan hasil atau belum disetujui Badan Pembina Pahlawan Pusat (BPPP). Masalahnya adalah menyangkut adanya data sejarah bahwa Pangeran Hidayatullah di akhir perjuangannya telah menyerahkan diri kepada Belanda dan kemudian diasingkan ke Cianjur dengan tanggungan dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda. Adanya penyerahan diri itu, dipandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepahlawanan, yakni pantang menyerah atau bekerjasama dengan pihak musuh. Adanya data tentang penyerahan diri Hidayatullah sesungguhnya masih kontroversi, karena adanya data/pendapat lain yang menyatakan bahwa ia tidak menyerah melainkan dijebak atau ditipu Belanda.

Di tahun 2001, salah seorang putera terbaik Kalimantan Selatan, yakni Brigjend H. Hassan Basry juga diakui sebagai pahlawan nasional. Seperti halnya Pangeran Antasari, maka Hassan Basry juga merupakan pemimpin perlawanan terhadap Belanda. Ia adalah Pimpinan Umum/Komandan/ Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang berjuang menegakkan

kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan pada tahun 1946-1949. Ia adalah putera Kandangan dan telah berteman denganku sejak kecil, masa perjuangan sampai ia meninggal tanggal 15 Juli 1984. Oleh karena itu, aku sangat mengenal kepribadiannya. Tahun 1949, ketika perjuangan ALRI Divisi IV sangat menonjol, aku telah menulis buku tentang profil diri Hassan Basry dalam sebuah buku sederhana dengan judul: "SIAPA HASAN BASRY DI KALIMANTAN?" Atau 4 tahun Gerilya di Hutan Rimba. Sebuah buku dengan harga sebelum terbit f 1.80 dan harga sesudah terbit f 2,-. Ukuran buku 15 x 21 cm, dengan kulit tebal (hardcover). Isi 80 halaman pakai gambar. Diterbitkan oleh Bd. Penerbit – Darurat "Dwiwarna" Parincahan C.84 Kandangan. Dalam buku yang kutulis itu, aku memakai nama Murya Artha, dan iklan penjualan buku itu pernah dimuat dalam surat kabar Suara Kalimantan, Selasa 30 Agustus 1949 Tahun Kelima Nomor 218.

Mungkin, karena aku dipandang sangat mengenal siapa Hassan Basry, maka dalam beberapa diskusi aku berperan sebagai pembicara, menulis perjuangan Hassan Basry dalam beberapa media lokal, dan melalui beberapa organisasi seperti Lembaga Budaya Banjar Kalimantan Selatan (LBB-KS) turut memperjuangkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Alhamdulillah, perjuangan dan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan berhasil diwujudkan. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 110/TK/tahun 2001 tanggal 3 November 2001 yang ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputeri, pemerintah memberikan anugerah kepada Brigjen H. Hassan Basry sebagai Pahlawan Nasional.

Begitulah kegiatanku di bidang kebudayaan, aku sangat menaruh perhatian pada kegiatan penelitian dan penulisan masalah kebudayaan Banjar dan masalah

pelestarian benda-benda budaya yang bernilai sejarah. Mungkin karena aktivitasku di bidang kebudayaan itulah, maka seringkali aku mendapatkan penghargaan dari beberapa lembaga pemerintah maupun organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan, meski ada di antaranya aku tidak bersedia menerimanya.

Tahun 1973, tepatnya tanggal 17 Agustus, aku pernah menerima hadiah seni dari Gubernur Kalimantan Selatan (Subardjo Surosarodjo) sebagai penghargaan atas prestasi, reputasi dan dedikasi yang menonjol di bidang penggalian dan pelestarian kebudayaan Banjar di Kalimantan Selatan.

E. KEPADA SEMUA ANAK CUCUKU

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, aku dikatakan orang penyair, sebab kata orang aku pandai menciptakan kalimat syair, pantun, puisi dan cerita pendek, juga menulis berita-berita.

Memang begitulah adanya, sejak zaman Hindia Belanda tepatnya tahun 1937 aku mulai membuat karya-karya sastra dan mengirimkannya untuk dimuat dalam media cetak seperti majalah “Terang Boelan” Surabaya, majalah “Keinsyafan” Gorontalo, dan majalah “Mandau” Surabaya, “Mimbar Indonesia” Jakarta, “Mutiaras” Jakarta, “Gelanggang/Siasat” Jakarta, “Pelopor” Jakarta, “Zenith” Jakarta, dan surat kabar “Borneo Simboen” Banjarmasin.

Orang bilang aku adalah seorang sastrawan Kalimantan Selatan zaman Kolonial Belanda 1930-1942. Selain sebagai penyair, aku sangat berminat terhadap persoalan sejarah dan kebudayaan, meneliti dan menuliskannya dalam surat kabar maupun dalam bentuk buku.

Di antara karya-karyaku yang telah diterbitkan menjadi buku antara lain adalah “Kumala Gadis Zaman

Kartini” (Novel, Penerbit Gemilang, Kandangan, 1949), “Tahanan Yang Hilang” (Novel, Pustaka Dirgahayu, Balikpapan, 1950), “Kepada Kekasihku Rokhayanah” (Novel, Mayang Mekar, Banjarmasin, 1951), “Dua Tahun Museum Bandjar di Pulau Tatas” (Banjarmasin, 1969), Putera Mahkota yang Terbuang” (Novel, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1978), “Kartamina” (Novel, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1978), “Unggunan Puisi Banjar” (Antologi Puisi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1978), “Masalah Kebudayaan Banjar” (Banjarmasin, 1974), “Album Pembangunan Kalimantan” (Rapi, Banjarmasin, 1975), “Sejarah Kota Banjarmasin” (Museum Banjar Lambung Mangkurat, 1970), “Wartawan-wartawan Kalimantan Raya” (Surabaya, 1981), “Palsafah Banjar” (Banjarmasin, 1985), “Kitab Undang-undang Sultan Adam 1825” (Banjarmasin, 1988).

Berkaitan dengan profesiku sebagai wartawan, maka aku antara lain pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah “Jantung Indonesia” Kandangan (1948), wartawan SKH “Kalimantan Berdjuaug” Banjarmasin (1948-1951), SKH “TUGAS” Balikpapan (1950-1951), SKH “Indonesia Merdeka” Banjarmasin (1952-1954), SKH “Utusan Kalimantan” (1957-1960), dan SKM “Banjarmasin Posat” Banjarmasin (1962-1963), dan pada tahun 1961-1963 menjadi Ketua PWI Kalimantan Selatan.

Bersama kawan-kawan seangkatanku, aku merupakan salah seorang dari 7 (tujuh) wartawan senior di Kalimantan Selatan yang pada tanggal 27 Februari 1985 dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional I di Banjarmasin menerima Surat Penghargaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Selatan Ir. H.M. Said.

Dikemukakan bahwa para penerima telah mengabdikan diri bagi pengembangan dan pembinaan pers di Kalimantan Selatan dan pengabdian tersebut semoga menjadi teladan di masa yang akan datang.

Surat penghargaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan itu diberikan sesuai dengan Surat Keputusan PWI Cabang Kalimantan Selatan Nomor 002/Ketua PWI Cabang Kalimantan Selatan H. Anang Adenansi dan Sekretaris Roestam Effendi Karel.

Wartawan Penerima Surat Penghargaan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan itu adalah:

1. H. Haspan Hadna (wartawan republiken, mantan Pemimpin Redaksi harian Kalimantan Berdjoang).
2. Zainal (wartawan republiken, mantan Redaktur Umum dan Pgs. Pemimpin Redaksi harian Kalimantan Berdjoang pada saat Agresi II Militer Belanda).
3. Artum Artha (wartawan republiken, mantan wartawan harian Kalimantan Berdjoang).
4. Yusni Antemas (wartawan republiken dari harian Terompet Rakyat di Amuntai, sempat bergabung dengan Harian Kalimantan Berdjoang di Banjarmasin sesudah Agresi II Militer Belanda).
5. Goembran Saleh (mantan wartawan harian Indonesia Berdjuang di Banjarmasin).
6. H. Aliansjah Ludji (wartawan republiken, mantan wartawan harian Terompet Rakyat di Amuntai).
7. Masdan Rozhany (wartawan di Martapura).

Demikianlah, jika satu generasi disebutkan meliputi 25 tahun, maka aku mungkin termasuk salah seorang dari wartawan lainnya di tanah air yang secara terus menerus bergelut dalam dunia kewartawanan sejak 1946 yakni bersamaan dengan terbentuknya PWI tanggal 9 Februari

1946, minimal terus menyumbangkan tulisan untuk dimuat dalam media cetak di saat pensiun sebagai wartawan.

Dalam hal pengabdian sebagai wartawan itu, belum termasuk kegiatanku dalam dunia tulis menulis dan profesi wartawan atau koresponden sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dan sejak tahun-tahun masa pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan. Semua itu kulakoni dengan sabar dan ikhlas, meski kadang suka dan duka silih berganti menghampiri. Lebih-lebih lagi di masa perjuangan.

Demikianlah kisah hidupku. Semoga apa yang kujalani dalam kehidupan di dunia ini menjadi bekal perjalananku di akhirat. Kepada Allah Subhanahu wata'ala, kupanjatkan do'a semoga damailah hati, damailah warga, damailah Republik Indonesia, "kekal abadi" untuk selamanya. Amin.

Kepada semua anak dan cucuku yang tercinta-tersayang. Kenang-kenanglah dan perhatikan: jarak bulan dan matahari.⁷

⁷ Artum Artha, "Cita-cita Mencapai Indonesia Mulia Merdeka dan Berdaulat", Banjarmasin, 1984.



Artum Artha (tanda X) saat menjadi siswa Sekolah Medan Antara di Kandangan



Sekolah Medan Antara Parindra Kandangan, pada saat pembukaan tanggal 15 Juli 1937. Berdiri di belakang dari kanan ke kiri, Artum Artha (X).



Wartawan/karyawan Semarak/Surat kabar Kalimantan Berdjuang (1947-1952). Searah jarum jam, berdiri: Siti Chasrimunah, Zafry Zamzam, Yusni Antemas, Zainal, Aliansyah Luji, A. Gafar (Tata Usaha). Berjongkok: Artum Artha, anak-anak, Abdul Gani (loper), Arifin (Pembantu Tata Usaha).



Artum Artha, Hadharyah M, dan A. Basuni di Yogyakarta 1950 (Kiri). Ketika bertugas di Balikpapan 1951-1952 (kanan).



Pada Konferensi Masyumi tanggal 19/21-5-1951 di Balikpapan, sebagai salah seorang pemrasaran (duduk paling kanan).



Konferensi Masyumi di Balikpapan dihadiri para ulama. Tampak pula hadir seorang tokoh gerilya Kalimantan Hassan Basry (Wakil Panglima Tentara Territorium Kalimantan).



Artum Artha (paling kiri) Ketua DPRD Kotapraja Banjarmasin
1959



Saat serah terima jabatan Ketua DPRD Kotapraja Banjarmasin dari
pejabat lama (Artum Artha) kepada kepada pejabat baru, Februari
1961 di Gubernuran, Jalan Tugu Banjarmasin.



Artum Artha (paling kanan) Ketua PWI Cabang Kalsel 1961-1963



Para seniman Kalsel pada saat persiapan Musyawarah Daerah Seniman Kalsel tahun 1963 di Banjarmasin. Digagalkan oleh Lekra karena tidak diikutsertakan.

DAFTAR PUSTAKA

Artha, Artum.

- 1975 *Album Pembangunan Kalimantan.*
Banjarmasin: Yayasan Pendidikan Seni
Budiman.

Artha, Artum.

- 1997 “Perjuangan Bangsa Indonesia Menuju Negara
Kesatuan Republik Indonesia”. Banjarmasin:
naskah ketikan.

Artha, Artum.

- 1984 “Cita-Cita Mencapai Indonesia Mulia Merdeka
dan Berdaulat”. Banjarmasin: naskah
ketikan.

Artha, Artum.

- 1995 “Mencapai Usia Lanjut 75 Tahun”.
Banjarmasin: naskah ketikan.

Artha, Artum.

- 1999 “Budi Pekerti Pejuang Kemerdekaan Haji
Hassan Basry”. Banjarmasin: naskah ketikan.

Artha, Artum.

- 1973 *Proklamasi Kemerdekaan Dalam Jiwa
Proklamasi.* Banjarmasin: Yayasan Pendidikan
Seni Budiman.

Artha, Artum.

- 1969 "Dua Tahun Museum Bandjar di Pulau Tatas".
Banjarmasin: naskah stensilan.

Artha, Arthum

- 1981 *Wartawan-Wartawan Kalimantan Raya*.
Surabaya:
Bina Ilmu Ofseet.

Artha, Artum

Nippon-Na-Indonesia, Sama-SMA, dalam
Dinamika Berita, Minggu 1 Maret 1992.

Antemas, Anggraini

- 1988 *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*.
Amuntai: Mega Sapura.

Gafuri, Ahmad.

- 1984 *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan
Republik Indonesia di Kalimantan Selatan
(1945-1949)*. Kandangan: Departemen
Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ganie, Tajuddin Noor.

- 1995 *Sejarah Lokal Kesusastraan Indonesia di
Kalimantan Selatan 1930-1995*. Banjarmasin:
Pusat Pengkajian Masalah Sastra
(Puskajimastra) Kalsel.

Jarkasi dan Tajuddin Noor Ganie.

2000 *Sketsa Sastrawan Kalimantan Selatan*.
Banjarmasin: Balai Bahasa Banjarmasin.

Majalah Mandau

1948 *Menuju Negara Kesatuan*, Majalah Ikatan
Perjuangan Kalimantan (IPK) Pusat
Penerangan Penyiaran, Jogjakarta.

Saleh, M. Idwar.

1981/1982 *Banjarmasih*. Banjarbaru: Museum Negeri
Lambung Mangkurat.

Wajidi

2007 *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan*
1901-1942. Banjarmasin: Pustaka Banua.

Lampiran

BIODATA SINGKAT HAJI ARTUM ARTHA

1. Nama : Artum Artha
2. Nama Orang
Tua : Abubakar (Ayah)
Zamrud (Ibu)
3. Tempat,
Tanggal lahir : Kandangan, 20 Agustus 1920
4. Agama : Islam
5. Nama Isteri : Saniah binti Muhammad
Idham Saleh Masdut
6. Pendidikan : Sekolah Medan Antara (SMA) 1939
Parindra di Kandangan
7. Organisasi :
 1. Kepanduan Bangsa 1932
Indonesia (KBI),
Kandangan
 2. Kandangan Padvinder 1934
Organisatie (KPO),
Kandangan
 3. Kepanduan Umum (KU), 1935
Kandangan
 4. Gezondheid Brigade (GB), 1935
Kandangan
 5. Gabungan Pemuda 1936
Indonesia Kalimantan
(GAPIKA) Kalimantan
8. Organisasi :
 1. Pemuda Surya Wirawan 1937
Partai Politik – Parindra Cabang 1942
Kandangan

		2.	Partai Indonesia Raya (Parindra) Cabang Kandangan	1938 1942	
		3.	Nahdlatul Ulama/Partai Nahdlatul Ulama Kandangan - Banjarmasin	1950 1972	
9.	Gerakan Perjuangan	1.	Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GEPERINDO)	1945	
		2.	Gerakan Merdeka Rakyat Indonesia (GERMERRI)	1946 1949	
		3.	Staf Departemen Penerangan/Keuangan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan	1948 1949	
		4.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan Selatan	1961 1963	
10 .	Pengalaman Kerja	:	1.	Staf Redaksi Pers Beureuw Pustaka Raya di Kandangan	1937 1938
			2.	Guru Sekolah Rakyat (SR) Parindra	1939
			3.	Anggota Badan Pengawas <i>Onderwijs Commisie</i> (BPOC.) Kandangan	1940 1942
			4.	Kakarico (Juru Tulis) maskapai Kasen Onkukai Kabushi Kaisha, Kandangan	1945

- | | | | |
|-----|--|--|--------------|
| | 5. | Pembantu Redaksi
Majalah Politik Republik
di Kandangan | 1946 |
| | 6. | Staf Redaksi SKH
Kalimantan Berdjung di
Banjarmasin | 1947
1950 |
| | 8. | Pimpinan Redaksi
Majalah Remadja | 1948
1949 |
| | 9. | Pimpinan Redaksi SK
TUGAS di Balikpapan | 1950
1951 |
| | 10. | Staf Redaksi SKH
Indonesia Merdeka di
Banjarmasin | 1952
1954 |
| | 11. | Pimpinan Redaksi SK
Utusan Kalimantan di
Banjarmasin | 1958
1960 |
| | 12. | Pimpinan Redaksi
Mingguan Banjarbaru
Post di Banjarmasin | 1960
1961 |
| | 13. | Koresponden LKBN
Antara daerah
pemberitaan Kalsel-
Kalteng | 1962
1963 |
| | 14. | Ketua Persatuan
Wartawan Indonesia
(PWI) Kalsel | 1961
1963 |
| 11. | Peristiwa
Pemeriksaan/
Penahanan | 1. Dipanggil dan
diinterogasi Kiai Kepala
(<i>Districthoofd</i>)
Kandangan Kota sekitar
peristiwa pelantikan
Pengurus Kring
(Ranting) Parindra Kring | Juli
1938 |

- Simpur Amandit Selatan.
Diberi peringatan keras,
jangan melakukan
kegiatan politik.
2. Ditangkap dan dihukum 1939
penjara selama 3 (tiga)
bulan: Juni, Juli, Agustus
1939 di Kandangan.
Dipersalahkan
Pemerintah Hindia
Belanda melanggar
Wilde Schoolen
Ordonnantie.
 3. Dipanggil/ diinterogasi Okt-
lebih kurang 10 menit 1939
oleh Kontelir Kandangan
(*Hoofd van Plaatselijke*
Bestuur) Onderafdeling
Kandangan berkenaan
dengan nama BC.
Swastika, hingga harus di
ganti namanya dengan
PBT Satya. Diberikan
peringatan agar nama
club “jangan berbau
politik”.
 4. Ditekan dan diinterogasi 10 Mei
Resersi P. I. D. 1940
Banjarmasin selama 90
menit (09.30-11.00),
berkaitan dengan
pelaksanaan Kongres
Parindra III di
Banjarmasin 10/13 Mei

- 1940 di Gedung Eldorado, dan Peristiwa menaikkan bendera Parindra dan Surya Wirawan serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peringatan keras dan dinyatakan Kepala P. I. D. bahwa Kongres Parindra di batalkan oleh Asisten Residen Banjarmasin.
5. Dipanggil Resersi P. I. D Des.
Kandangan, karena 1945
tulisan di majalah Islam Berjuang. Diinterogasi sekitar 10 menit. Ditahan selama 2 x 24 jam. Kemudian dibebaskan dengan peringatan keras dilarang menulis yang bersifat menghasut atau melawan pemerintah NICA- Belanda.
 6. Ditangkap Belanda di 1946
Kandangan. Dihukum tahanan rumah selama 7 hari 7 malam.
 7. Penggeledahan dan 1948
penyitaan surat-surat penting/dokumen perjuangan
 8. Ditangkap Belanda. 1949
Diinterogasi selama 6

jam, kemudian
dibebaskan. Masalahnya
ikut serta dalam gerakan
ALRI Kalsel

- | | | | | | |
|-----|---|---|----|--|--------------|
| 12. | Organisasi
Kesenian
Kebudayaan | : | 1. | Ikatan Seniman
Indonesia (ISI),
Banjarmasin | 1946
1948 |
| | | | 2. | Lembaga Kebudayaan
Daerah (LEKDA),
Banjarmasin | 1957
1960 |
| | | | 3. | Dewan Kesenian Daerah
(DKD) Kalimantan
Selatan | 1970
1990 |
| | | | 4. | Dewan Kesenian
Kalimantan Selatan | 1994
1998 |
| | | | 5 | Lembaga Budaya Banjar
(LBB) Kalsel | 1997
2003 |
| 13. | Pengalaman
Kerja Dalam
Pemerintahan | | 1. | Ketua DPRD Kotapraja
Banjarmasin | 1954
1961 |
| | | | 2. | Ketua Seksi “D”/DPRD
Kotamadya Banjarmasin
– Fraksi ABRI (Unsur
Angkatan 45) di
Banjarmasin | 1967
1972 |
| | | | 3. | Kepala Seksi Sejarah dan
Kebudayaan Pemerintah
Daerah TK. I Provinsi
Kalsel (rangkap jabatan
Ka Humas) | 1963
1966 |
| | | | 4. | Pimpinan Museum
Banjar | 1967
1972 |

14. Publikasi
Sastra, a.l.:

1. Majalah “Keinsyafan”
Gorontalo
2. Majalah “Mimbar
Indonesia” Jakarta
3. Majalah “Mutiar”
Jakarta
4. Majalah “Gelanggang/
Siasat” Jakarta
5. Majalah “Pelopor”
Jakarta
6. “Zenith” Jakarta
7. Majalah “Terang Boelan”
Surabaya
8. Majalah “Mandau”
Surabaya
9. Surat kabar “Borneo
Simboen” Banjarmasin

15. Karya tulis,
a.l.:

1. “Kumala Gadis Zaman
Kartini” (Novel, Penerbit
Gemilang, Kandangan,
1949).
2. “Siapa Hasan Basry Di
Kalimantan?” (Penerbit –
Darurat “Dwiwarna”
Parincahan C.84
Kandangan, 1949).
3. “Tahanan Yang Hilang”
(Novel, Pustaka
Dirgahayu, Balikpapan,
1950).
4. “Kepada Kekasihku
Rokhayanah” (Novel,

- Mayang Mekar,
Banjarmasin, 1951).
5. “Dua Tahun Museum
Bandjar di Pulau Tatas”
(Banjarmasin, 1969).
 6. “Sejarah Kota
Banjarmasin” (Museum
Banjar Lambung
Mangkurat, 1970).
 7. “Putera Mahkota yang
Terbuang” (Novel, Pusat
Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,
Jakarta, 1978).
 8. “Kartamina” (Novel,
Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,
Jakarta, 1978).
 9. “Unggunan Puisi Banjar”
(Antologi Puisi, Pusat
Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,
Jakarta, 1978).
 10. “Masalah Kebudayaan
Banjar” (Banjarmasin,
1974).
 11. “Album Pembangunan
Kalimantan” (Rapi,
Banjarmasin, 1975).
 12. “Wartawan-wartawan
Kalimantan Raya”
(Surabaya, 1981).
 13. “Palsafah Banjar “
(Banjarmasin, 1985).

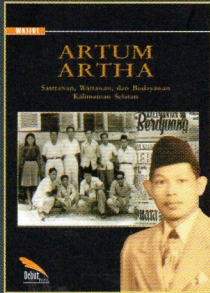
14. “Kitab Undang-undang
Sultan Adam 1825”
(Banjarmasin, 1988).

Penyusun Biodata,

Wajidi

ARTUM ARTHA

Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan
Kalimantan Selatan



Buku ini berisi kisah seorang sastrawan, wartawan, dan budayawan kawakan Kalimantan Selatan bernama Artum Artha yang redaksinya disusun dengan pola bertutur, sehingga dengan membaca buku ini, maka seakan-akan Pak Artum masih berada di antara kita; sedang bertutur, mengisahkan perjalanan hidupnya kepada para pembaca.

Pada diri seorang Artum Artha memang dapat dipetik beberapa suri tauladan, terutama aktivitasnya pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Pendudukan Tentara Jepang, Perang Kemerdekaan, dan di era pembangunan di Kalimantan Selatan.

Artum Artha memang telah tiada, namun kiprahnya akan terus dikenang. Setidaknya buku ini akan menjadi saksi dari perjalanan hidup beliau, di samping karya tulisnya sendiri yang cukup beragam.

ISBN 978-979-96468-36-X